SUGIARTO PRAMONO, SIP., MA.

PERGESERAN POLITIK LUAR NEGERI INDIA TERHADAP MYANMAR:

Kepentingan negara demokrasi terbesar di negara otoriter militeristik

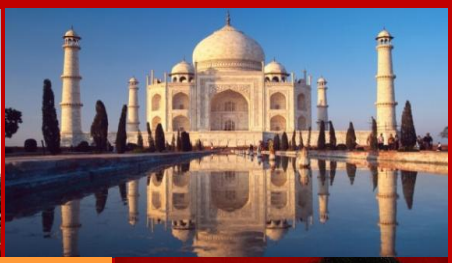
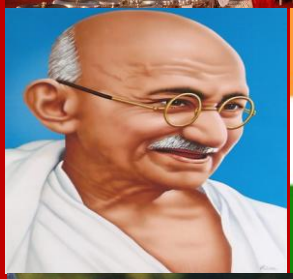

Wahid Hasyim University Press

SUGIARTO PRAMONO

PERGESERAN POLITIK LUAR NEGERI INDIA TERHADAP MYANMAR:

kepentingan negara demokrasi terbesar di negara otoriter militeristik

Wajib dibaca mahasiswa dan dosen Hubungan Internasional, pengamat dan para pelaku ekonomi, politik dan bisnis

Wahid Hasyim University Press

PERGESERAN POLITIK LUAR NEGERI INDIA TERHADAP MYANMAR:
Kepentingan negara demokrasi terbesar di negara otoriter militeristik

Penulis : SUGIARTO PRAMONO, SIP., MA.
Desain Cover: M. ARIF MAULANA
Panata Aksara: MUHAMMAD DHANI
Tanggal Terbit : 7 Januari 2012
Ukuran Buku : 15 cm X 23 cm
ISBN: 978-602-8273-41-1
Penerbit:
Wahid Hasyim Unversity Press
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Tlp. 0248505680/ Fax: 0248505681

MOTTO

HIDUP UNTUK IBADAH

PERSEMBAHAN

Darno dan Daimah, kedua orang tuaku
yang selalu menyebut-nyebut nama ku
dalam setiap doa mereka;
Rosyidah, istriku yang sangat mengenal diriku;
Buah hati kami yang hingga selesai penulisan buku ini
belum dikehendaki Nya lahir ke dunia.

KATA PENGANTAR

Prilaku India, menarik untuk diamati tidak hanya karena India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dan digadang-gadang menjadi pemain penting ekonomi di masa datang namun juga karena: *Pertama*, bagi Indonesia, mendekatnya India ke Myanmar yang juga berarti masuknya India ke dalam pusaran ekonomi Asia Tenggara menjadi pengimbang bagi dominasi ekonomi Cina di kawasan ini. Ketergantungan Asia Tenggara termasuk Indonesia terhadap Cina akan terkurangi seiring dengan semakin kuatnya penetrasi India ke kawasan ini.

Kedua, bagi ASEAN, masuknya India ke dalam arena ekonomi kawasan ini berarti *energi* baru yang akan meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara ASEAN secara kolektif. Jalinan rantai ekonomi yang saling terkoneksi di antara para pelaku ekonomi di kawasan ini akan semakin meluas seiring dengan terintegrasinya ekonomi India ke ASEAN yang maknanya progresifitas ekonomi kawasan akan terdorong.

Ketiga, di tingkat global. Myanmar menjadi jalur kunci yang menghubungkan tiga kekuatan ekonomi penting: Cina, India dan Indocina, bila bukan Asia Tenggara. Mencairnya hubungan India-Myanmar sudah barang tentu akan memiliki multi efek bagi ekonomi Asia yang pada akhirnya berkontribusi pada progresifitas ekonomi global. Pada tahap ini maka Asia memainkan peran krusial dalam konstalasi ekonomi global.

Selain penting mendekatnya India ke Myanmar juga menarik mengingat India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia menjalin relasi kuat dengan Junta militer yang anti demokrasi dan telah melakukan pelanggaran HAM berat. Dalam konteks mengejar kepentingan ekonomi nampaknya penegakan nilai-nilai HAM semakin terabaikan.

Dengan tidak mengabaikan peran negara, tesis ini sampai pada kesimpulan bahwa aktor-aktor non negara seperti perusahaan, kelompok kepentingan dan penekan bahkan hingga individu-individu berpengaruh memiliki porsi keterlibatan signifikan dalam turut menentukan prilaku negara.

Penulis sangat berhutang budi kepada banyak sekali orang yang telah membantu penulis merampungkan manuskrip ini. Tentu mustahil bagi penulis untuk menyebutkan satu persatu, sejumlah nama yang bisa penulis sebut diantaranya, yaitu: Sudarno dan Daimah, Ayah dan Ibu penulis yang selalu menyebut-nyebut nama penulis di setiap doa yang mereka panjatkan. Sungguh mulia kedudukan mereka di sisi penulis; Rosyidah, Istriku tercinta yang sangat sabar dalam mendampingi penulis. Memuakkan memiliki suami yang selalu menyibukan diri di depan *lap top* seharian dan enggan membantu pekerjaan istri, namun itu semua justru dibalas dengan kesetiaan dan perhatian penuh darinya;

Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor UNIVERSITAS WAHID HASYIM Dr. H. Noor Achmad, MA., yang selalu memberi dorongan dan

bimbingan pada penulis; Dekan FISIP UNWAHAS, Andi Purwono, SIP, MA., yang banyak memberi masukan kepada penulis; para guru dan sahabat di FISIP UNWAHAS yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, Bu Ismi, Bu Ana, Pak Agus, Mas Harun Ni'am, Pak Martin, Pak Adib dan Pak Joko; Mas Aji, Mas Adi, Gus Azmi dan Mas Zudi Setiawan.

Serta masih banyak lagi orang-orang penting lainnya yang tidak mungkin penulis tuliskan nama mereka satu persatu karena keterbatasan ruang. Semuga apapun dan seberapun bantuan mereka terhadap penulis dalam merampungkan tulisan ini, dibalas oleh Allah *subhanallahu wata'ala* dengan balasan yang berlipat-lipat. Amien.

Demak, 4 Januari 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR EDISI REVISI
KATA PENGANTAR ~V
BAB 1
PENDAHULUAN ~1

A. Latar belakang masalah ~1
B. Rumusan masalah ~5
C. Kerangka teori ~5
D. *Literature review* ~11
E. Hipotesa ~14
F. Metodologi ~14
G. Sistematika tulisan ~15

BAB 2
KENDALA DEMOKRASI DI MYANMAR ~17

A. Kendala di tingkat domestik ~18
B. Hambatan internasional ~19

BAB 3
PERGESERAN SIKAP INDIA TERHADAP MYANMAR DARI KONFRONTATIF MENUJU KOOPERATIF (1988-2011)~23

A. Sikap India terhadap Myanmar di era pasca kemerdekaan ~24
B. Periode Konfrontasi 1988-1992 ~26
C. Pergeseran menuju era kooperasi 1993-2011 ~29
D. Pola sikap India terhadap Myanmar ~43

BAB 4
KEPENTINGAN PARA AKTOR DI BALIK PERGESERAN SIKAP INDIA TERHADAP MYANMAR ~47
A. Identifikasi Para Aktor ~48
B. Interaksi kepentingan para aktor di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar ~ 55
C. Peta interaksi kepentingan para aktor ~ 79

BAB 5
RESPON TERHADAP DINAMIKA POLITIK DI TINGKAT INTERNASIONAL ~83
A. Runtuhnya Uni Soviet ~84
B. Perdagangan dengan Indocina (Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand) ~88
C. Upaya India mengurangi pengaruh Cina dan Pakistan di Myanmar ~92

BAB 6
MEMBACA MASA DEPAN
SIKAP INDIA TERHADAP MYANMAR ~99

BAB 7
PENUTUP ~103

BIBLIOGRAPHY ~107

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Peta Riset Hubungan India-Myanmar ~13
2. Bantuan Pembangunan India terhadap Myanmar 2000-2009 (*in rupees crores*) ~35
3. Proyek-proyek utama India di Myanmar (dalam juta dollar) ~36
4. *New Factories under the Ministry of Industry-2 funding by India ~37*
5. *New Factories under the Ministry of Industry-1 funding by India ~37*
6. Indikator perubahan sikap India terhadap Myanmar 1988-2011 ~42
7. Pola hubungan India Myanmar (1948-2011) ~46
8. *Top five commodities of Indian exports to Myanmar ~63*
9. *Top five commodities of India import from Myanmar ~66*
10. Investasi India dalam sektor energi di Myanmar ~96
11. Investasi Cina dalam sector energi di Myanmar ~96
12. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam pergeseran sikap India terhadap Myanmar ~97
13. Peta pengaruh aktor/ peristiwa/ konteks politik di berbagai tingkat terhadap pergeseran sikap India terhadap Myanmar ~98

DAFTAR GRAFIK

1. Perdagangan India-Myanmar 1999-2011 (dalam juta dollar) ~38
2. Jumlah Perjanjian India-Myanmar Meningkat~40
3. Komposisi kursi di Parlemen India pada periode 1991-1996 ~57
4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi India (1988-2011) ~60
5. Komposisi GDP India 1987-1988 ~62
6. Komposisi GDP India 2004-2005 ~62
7. Perdagangan India-Myanmar 1999-2011 (dalam Juta dollar) ~63
8. *India's oli production and consumption 2000-2010 ~70*
9. *India's natural gas production and consumption 2000-2010 ~70*
10. Pertumbuhan ekonomi Indocina (Thailand, Vietnam, Laos dan Kamboja) ~90
11. Perbandingan *trend* perdagangan India-Indocina dengan India-Myanmar 1997-2011 (dalam juta dolar) ~91
12. *Trend* perdagangan India dan Cina dengan Myanmar ~95

DAFTAR GAMBAR

1. Ilustrasi pengaruh kebijakan ekonomi terhadap pola pertumbuhan ekonomi ~60
2. Sekema penalaran pengaruh meningkatnya kebutuhan bahan baku produk farmasi di India terhadap merapatnya India ke Myanmar ~68

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat hingga rata-rata 8%—setidaknya dari tahun 2003, lihat Grafik Pertumbuhan Ekonomi India (Garafik 4)—prilaku India dalam sistem internasonal menarik untuk diperhatikan. Terlebih lagi prilaku negara demokrasi terbesar ini terhadap rezim Junta militer di Myanmar/ Burma[1]. Pola hubungan mengalami pasang surut dalam bentangan sejarah hubungan kedua negara. Sikap bangsa India terhadap Myanmar setidaknya hingga awal dekade 1990 an masih sangat idealis karena pengaruh ajaran pendahulu mereka, Gandhi dan Nehru.

[1] Otoritas Burma, *State Law and Order Restoration and Council* (SLORC) mengganti nama Burma menjadi Myanmar pada tahun 1989 dengan tujuan mendapat legitimasi politik dari etnis non Burma dan sejak saat itu nama "Myanmar" mulai digunakan secara meluas, namun kelompok-kelompok oposisi menolak menggunakannya dan tetap menyebutnya dengan "Burma" sebagai tanda perlawanan terhadap rezim militer. Sejumlah pemerintah dan organisasi media di negara-negara Barat juga memilih untuk tetap menggunakan "Burma" (www.bbc.co.uk: Pemerintah minta Aung San Suu Kyi gunakan nama Myanmar). Dalam buku ini istilah Myanmar dan Burma tidak dibedakan dan digunakan untuk merujuk negara yang sama.

India begitu keras terhadap Junta yang telah membantai dengan brutal para demonstran dalam aksi mereka di tahun 1988. Kebencian India terhadap negeri para Jenderal itu ditunjukan sedikitnya dalam dua hal, ***pertama*** sikap PMS Malik (Duta Besar India) yang begitu keras melawan rezim represif Junta dengan menjadikan kantor perwakilan India di Myanmar sebagai rumah sakit sementara bagi para demonstran; dan ***kedua*** kebijakan buka pintu (*open door policy*) untuk para pelarian politik dari Myanmar (Renaud, 2003, 3).

Hubungan India-Myanmar saat itu benar-benar telah beku, namun satu hal menarik telah terjadi, lima tahun paska tragedi pembantaian 1988 tersebut atau tepatnya pada tahun 1993 sikap India yang konfrontatif berubah 180 derajat. India mulai nampak melunak terhadap Myanmar, indikator yang dapat ditunjuk dari perubahan sikap India, diantaranya:

Pertama kunjungan J.N. Dixit (*Indian Foreign Secretary*) pada bulan Maret 1993 ke Yangon. Dalam kunjungan tersebut Pemerintah India—melalui Dixit—sepakat untuk tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar, yang artinya Pemerintah India menganggap isu gerakan demokrasi di Myanmar dan Aung San Suu Kyi sebagai urusan dalam negeri Myanmar; ***kedua***, lebih jauh kedua negara telah meneken *Border Trade Agreement* pada bulan Januari 1994 dan kerjasama militer, *Golden Bird* pada tahun 1995 (Renaud, 2003, 5); dan ***ketiga***, pada perkembangannya saling kunjung pejabat terus terjadi di antara kedua negara. Berbagai MoU dan *Agreement*, terutama dalam bidang ekonomi pun disepakati. Serta berbagai bantuan finansial untuk pembangunan infrastruktur juga mengalir ke negeri otoriter itu; ***keempat***, dan yang paling tegas yaitu dibukanya kembali kantor perwakilan resmi India di Yangon setelah sebelumnya telah dibekukan.

Catatan penting yang perlu digaris bawahi dalam riset ini adalah, riset ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan

ataupun menyalahkan kebijakan India merapatkan diri ke Myanmar, namun mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong India mendekati Myanmar. Hemat penulis mengetahui faktor-faktor itu tidak hanya penting namun menarik. ***Pertama***, India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, sementara Myanmar merupakan negara otoriter militeristik di bawah rezim Junta dengan kejahatan pelanggaran HAM berat, namun demikian hal itu tidak menjadi halangan bagi India untuk mendekati Myanmar;

Kedua, merapatnya India ke Myanmar yang nampak sejak setidaknya tahun 1993 terlihat sangat unik. Perubahan tersebut terjadi sangat ekstrem, dari yang sebelumnya sangat konfrontatif (8 Agustus 1988) menjadi sangat kooperatif dan pada perkembangannya hubungan kedua negara semakin dekat. Bahkan yang tidak kalah menariknya yaitu sikap kritis India terhadap Myanmar terjadi ketika masyarakat internasional belum begitu hirau terhadap isu HAM, namun anehnya pasca berakhirnya perang dingin ketika isu HAM muncul menjadi santer dan banyak negara mengecam Myanmar terutama tiga kekuatan kunci dunia (PBB, UE dan AS) yang telah mengembargo Myanmar, sikap India yang kritis justru berbalik melunak sembari mengabaikan berbagai kritik baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu kritik mendasar yang ditujukan terhadap para analis berpaham realis adalah mereka telah mereduksi hubungan internasional yang sangat kompleks menjadi hubungan antar aktor-aktor

Ketiga, kendati perubahan sikap India terjadi pada tahun 1993 atau 19 tahun sebelum naskah ini ditulis, namun penelitian ini tetap urgen: (1) India diyakini akan menjadi pemain penting

ekonomi dunia[2]. Peristiwa merapatnya India ke Myanmar itu sangat penting bahkan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan ekonomi India maupun Indocina atau bahkan Asia Tenggara pada umumnya. Peristiwa 19 tahun yang lalu itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi besar India terhadap negara-negara di sisi timurnya. Runtuhnya Uni Soviet sebagai mitra dagang India memaksa India mencari mitra dagang baru yang setidaknya seimbang; (2) kehadiran kembali India di Asia Tenggara[3] menciptakan kompetisi ekonomi di regional ini semakin dinamis karena Cina menemukan kompetitor sebanding di kawasan ini; dan (3) dalam lingkup yang lebih luas, ekonomi Asia di masa depan tidak dapat dilepaskan dari faktor India, nampaknya Myanmar akan dijadikan India sebagai jalur kunci yang akan mendistribusikan aneka barang perdagangannya terutama berbagai produk farmasi, besi dan baja serta bermacam produk otomotifnya menuju pasar Indocina yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi secara agresif (lihat Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indocina, Grafik 10), dari pada melalui jalur Selat Malaka dengan ongkos yang lebih mahal.

---

[2] Jim O'Neill (*Chairman, Goldman Sachs Asset Management*) meramalkan India bersama Cina, Brasil dan Rusia—yang kemudian dikenal dengan singkatan BRIC—akan menjadi kekuatan vital ekonomi dunia (*Goldman Sachs: Introducing "The Growth Map"*).

[3] Hubungan India dengan ASEAN—terutama Indonesia dan Malaysia—sebelumnya tidak harmonis. Buruknya hubungan mereka disebabkan kedekatan India dengan Uni Soviet. Negara komunis ini merupakan mitra dagang utama India, namun pemberontakan komunis di Indonesia dan Malaysia menjadi preseden buruk. Peristiwa tersebut selanjutnya membangun presepsi negatif kedua negara terhadap Uni Soviet yang komunis. Bila temannya musuh adalah musuh maka, kedekatan India terhadap Uni Soviet dimaknai Indonesia dan Malaysia sebagai pernyataan permusuhan India terhadap kedua negara pelopor ASEAN itu. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1989 India memulai lembaran baru hubungannya dengan negara-negara di sisi timurnya, dengan mendeklarasikan *look east policy*, pada tahun 1992.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang hendak diteliti dalam riset ini adalah: ***mengapa terjadi pergeseran sikap India terhadap Myanmar dari konfrontatif menjadi kooperatif?***

C. Kerangka Teoritik

Salah satu kritik mendasar yang ditujukan terhadap para analis berpaham realis adalah mereka telah mereduksi hubungan internasional yang sangat kompleks menjadi hubungan antar aktor-aktor yang berupa negara (Jemadu, Aleksius, 2008, 31). Semakin majemuknya aktor yang terlibat dan semakin beragamnya isu membuat analisa realisme menjadi kehilangan relevansinya. Berangkat dari argumen ini, maka untuk menjelaskan prilaku India yang merapatkan diri ke Myanmar, penulis meminjam sedikitnya dua perspektif yang dikembangkan Helen Milner (1988) dan Thomas Oatlay (2006).

Perspektif Milner di dasarkan pada kritik terhadap paradigma dominan dalam Studi Politik Internasional, Realis dan Neo Liberal Institutionalism (Milner, 1998, 759). Negara menurut para penganut paradigma dominan diyakini sebagai aktor utama untuk memahami Politik Luar Negeri, sementara aktor-aktor lain di balik negara seperti individu, kelompok kepentingan maupun perusahaan multi dan trans nasional dianggap tidak signifikan dalam memahami dinamika Politik Luar Negeri. Sementara itu politik internasional—yang disusun oleh interaksi dari Politik Luar Negeri sedikitnya dua negara—bersifat anarki, yakni tidak punya otoritas di atas negara. Ini berlawanan dengan politik nasional yang bersifat hierarki. Padahal faktanya sistem anarki internasional memiliki relasi-relasi dengan sistem hierarki di tingkat nasional.

Milner berusaha keluar dari cara berfikir fragmentatif "domestik-internasional". Sebab utama munculnya pemisahan kedua ranah tersebut adalah klaim bahwa politik dalam sistem internasional berbeda secara radikal dengan politik domestik (Milner 1998, 759). Kedua ranah itu menurutnya memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain sehingga memisahkannya justru akan mereduksi pemahaman kita terhadap politik internasional atau lebih sepesifik lagi Politik Luar Negeri. Kendati tentu bisa dibedakan isu dan aktor yang ada di kedua tingkat tersebut untuk keperluan teknis penelitian, namun di antara kedua ranah tersebut berbagai variabel berhubungan satu sama lain.

Menganalisa Politik Luar Negeri hanya dengan berpijak pada variabel-variabel di salah satu tingkat itu—internasional/ domestik—saja, diyakini akan menghasilkan pemahaman yang kurang menyeluruh—bila tidak sangat sempit—sehingga rekomendasinya adalah mengkombinasikan berbagai variabel di kedua tingkat tersebut (Milner, 1998, 760).

Menganalisa Politik Luar Negeri hanya dengan berpijak pada variabel-variabel di salah satu tingkat itu—internasional/ domestik—saja, diyakini akan menghasilkan pemahaman yang kurang menyeluruh—bila tidak sangat sempit—sehingga rekomendasinya adalah mengkombinasikan berbagai variabel di kedua tingkat tersebut (Milner, 1998, 760).

Dengan pemahaman seperti ini maka Politik Luar Negeri bisa dipahami sebagai refleksi dari interaksi secara dinamis

antara variabel-variabel di tingkat domestik, internasional atau domestik-internasional. Secara lebih operasional aktor-aktor seperti ONGC perusahaan minyak dari India, kelompok HAM seperti *Burma Campaign* UK, gerakan separatisme seperti *United Liberation Front of Asom* dan *National Socialist Council of Nagaland (IM & K),* individu seperti Aung San Suu Kyi hingga Pemerintah dan Parlemen mendapatkan perhatian seksama analis dan diyakini memiliki pengaruh terhadap arah Politik Luar Negeri kendati dalam porsi yang berbeda-beda.

Sejalan dengan perspektif Milner adalah perspektif Thomas Oatley. Kendati Oatley menggunakan perspektinya untuk menganalisa kebijakan ekonomi luar negeri, namun hemat penulis perspektif Oatley juga dapat dipakai untuk menafsiri kebijakan/ Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri sebagaimana kebijakan eknomi luar negeri—menurut Oatley—sejatinya merupakan produk dari interaksi kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*) dengan institusi politik (*political institutions*). Untuk memahami mengapa pemerintah India memilih kebijakan tertentu ditujukan kepada Myanmar, mengikuti alur berfikir Oatley sedikitnya ada dua aspek yang perlu dimengerti terlebih dahulu: (1) kita perlu memahami dari mana kepentingan atau preferensi kebijakan ekonomi/ politik kelompok atau aktor tertentu di dalam masyarakat berasal; dan (2) kita perlu menguji bagaimana institusi politik mengagregasikan, mendamaikan, dan akhirnya mengubah bentuk kepentingan ke dalam Politik Luar Negeri tertentu dan sebuah sitem ekonomi/ politik internasional yang lebih sepesifik (Oatley, 2006, 11).

Interest atau kepentingan, lebih lanjut dijelaskan oleh Oatley, merupakan tujuan atau sasaran kebijakan yang mana aktor-aktor sentral dalam sistem politik-ekonomi (individu-individu, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi buruh,

serta kelompok kepentingan lain dan pemerintah) ingin menggunakan kebijakan ekonomi luar negeri (Politik Luar Negeri) untuk mencapainya (Oatley, 2006, 12). Terkait dengan definisi tersebut maka penting untuk fokus pada dua mekanisme: ***pertama***, masyarakat (dengan beragam aktor baik individu maupun kelompok yang ada di dalamnya) memiliki kepentingan material (*material interests*) yang muncul dari posisi mereka dalam (sistem) ekonomi global. Esensi dari pendekatan ini, menurut Oatley, dapat diringkas dalam statmen sederhana: *tell me where you work and what you do, and I'll tell you what your foreign economic policy preferences are* (Oatley, 2006, 12).

Contoh mudah yang dapat ditunjuk adalah kasus kebijakan tarif baja di Amerika. Produsen baja di Amerika atau bahkan buruh pabrik baja di sana tentu menginginkan agar pemerintah memasang tarif yang tinggi untuk baja, karena dengan demikian mereka tidak perlu bersaing harga dengan baja import. Sebaliknya produsen mobil di Amerika tentu menginginkan tarif baja serendah mungkin karena bila tarif tinggi maka baja akan mahal dan mereka akan terbebani biaya dalam produksi mobil. Kedua aktor ini (produsen baja dan mobil di Amerika) memiliki preferensi kebijakan ekonomi yang berbeda karena posisi mereka yang berbda di dalam sistem ekonomi global.

Kedua, gagasan atau ide tentang preferensi kebijakan ekonomi yang berada dalam pikiran aktor-aktor tersebut. Atau lebih sepesifik seperangkat keyakinan dari para pelaku ekonomi terkait kebijakan pemerintah dengan hasil ekonomi. Gagasan sangat penting pengaruhnya terhadap prilaku aktor. Dalam hal ini teori menjadi sumber penting yang akan menginspirasi aktor untuk bertingkah laku. Teori keuntungan komparatif (*comparative adventage*)—yang mengajarkan: dengan mereduksi tarif, masayarakat dalam suatu negara akan

makmur—misalnya menuntun para elit pemerintah yang meyakininya untuk mengurangi tarif, namun bagi mereka yang meyakini sebaliknya maka justru akan berbuat sebaliknya. Demikianlah ide memiliki pengaruh terhadap tingkah laku aktor.

Gagasan atau ide di sini tidak berhubungan dengan nilai (benar atau salah, baik atau buruk) melainkan yang lebih penting justru apa gagasan atau ide tentang preferensi kebijakan ekonomi yang berada di benak aktor-aktor dan bagaimana para aktor mentransformasikannya. Terkait dengan hal ini maka kita juga tidak bisa abai terhadap distribusi kekuasaan yang tersebar di antara aktor-aktor yang berada di balik Politik Luar Negeri India terhadap Myanmar serta gagasan-gagasan tentang preferensi kebijakan ekonomi yang mereka miliki.

Selanjutnya, bagaimana interaksi kepentingan dari banyak aktor itu terjadi untuk kemudian dikonversikan menjadi kebijakan ekonomi luar negeri tertentu maka memahami *institusi-institusi politik* menjadi sangat penting. Institusi politik seperti lembaga eksekutif maupun legislatif bukanlah berada di dalam ruang vakum kepentingan. mereka dikontruksi sedemikian rupa dalam konteks tarik ulur kepentingan.Tak ayal, aneka pola bagaimana institusi politik mengubah *raw material input* menjadi produk kebijakan berupa Politik Luar Negeri tidak dapat dilepaskan dari peta kekuasaan baik yang berada di dalam maupun di luar institusi-intitusi politik dan bagaimana kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat berinteraksi dengannya.

Institusi politik (yang tidak kedap dari kepentingan) menciptakan prosedur yang menjadi arena bagi berbagi aktor untuk bertemu dan saling beradaptasi. Seberapa besar aktor tertentu memiliki akses ke dalam proses pembentukan kebijakan ditentukan oleh regulasi yang merupakan produk dari institusi-institusi politik yang tidak kedap dari kepentingan para

aktor di baliknya. Demikian pula seberapa besar akses para aktor terhadap keuntungan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan yang diproduksi oleh institusi-institusi politik ditentukan oleh peta kepentingan dan kekuasaan para aktor di balik kebijakan tersebut.

Berangkat dari cara berfikir tersebut maka dapat disarikan bahwa Politik Luar Negeri yang dipilih suatu negara sejatinya merupakan refleksi dari kepentingan banyak aktor yang telah dikonversikan melelui institusi-institusi politik. Para pejabat yang berada di dalam lingkaran birokrasi maupun kelompok-kelompok oposisi, aktivis lingkungan, organisasi buruh, para elit bisnis berpengaruh hingga kelompok-kelompok pengusaha serta masih banyak aktor lainnya yang berada di luar lingkaran birokrasi dengan beragam preferensi kebijakan ekonominya masing-masing saling berinteraksi satu sama lain, melakukan tawar-menawar, saling menyesuaikan hingga akhirnya melalui institusi-institusi politik memproduksi pilihan kebijakan/ Politik Luar Negeri tertentu.

Baik Oatley maupun Milner tidak mengabaikan peran negara yang dijalankan pemerintah dalam memoproduksi Politik Luar Negeri, hanya saja menurut Milner perlakuan eksklusif terhadap negara hanyak akan mengkaburkan peran aktor-aktor non negara yang sejatinya juga memiliki andil penting dalam turut menentukan corak Politik Luar Negeri (Milner 1998, 759) .

Perspektif Milner dan Oatley mensyaratkan identifikasi berbagai aktor dengan melihat kepentingan dan karakternya. Serta melihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk memperjuangkan preferensi kebijakannya masing-masing. Catatan penting lain yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Milner dan Oatley memahami Politik Luara Negeri dengan memberikan porsi yang porposional antara level domestik dan internasional. Pembedaan dua level tersebut

dipakai hanya diwilayah teknis penelitian sementara dalam substansinya kedua level tersebut sejatinya berhubungan satu sama lain, sehingga kepentingan nasional dengan demikian dalam pandangan Milner dan Oatley dipahami sebagai kepentingan para aktor yang memenangkan—tentu tidak secara mutlak karena proses saling menyesuaikan antara banyak aktor—kompetisi dalam mempengaruhi arah Politik Luar Negeri suatu negara. Dengan logika ini penulis berupaya menjelaskan pergeseran sikap India terhadap Myanmar.

D. *Literartur* review

Hingga riset ini dibuat telah banyak sekali riset-riset tentang hubungan India-Myanmar. *Literatur review* ini akan membuat peta perdebatan, kendati sederhana, terkait dengan berbagai riset tersebut. Secara garis besar riset terhadap hubungan India-Myanmar dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, ***pertama***, riset yang mengkaitkan hubungan kedua negara dengan keamanan dan HAM. Beberapa riset dalam kategori ini di antaranya yaitu riset yang dipublikasikan oleh *Burma Campaign UK* pada bulan Maret 2007 dengan judul *Burma India Relations: a Betrayal of democracy and human right* dan Riset yang dilakukan Rakhee Bhattacharya (2010) berjudul *Does Economic Cooperation Improve Security Situation: The Case of India-Myanmar Relations*.

Kedua, riset tandingan yang menolak hubungan India-Myanmar dengan pelanggaran HAM. Hyome (2009) dengan laporan risetnya yang berjudul *India- Myanmar Relations (1998-2008): a Decade of Redefining Bilateral Ties* adalah salah satu riset jenis ini. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa untuk kepentingan ekonomi kedua negara, India menginginkan kesetabilan politik di Myanmar, jadi tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa India berkontribusi pada instabilitas

politik dalam negeri Myanmar, bahkan dengan percaya diri Yhome meyakini bahwa mendekatnya India ke Myanmar berkontribusi pada demokrasi dan normalisasi situasi keamanan di Myanmar. Secara lebih implisit, misalnya, Hyome menulis:

> *Political stability in Myanmar remains an unpredictable area, with the potential of the deararailing relationship. A case in point is the 2007 September uprising. Althought it did not affectthe relationship in a major way, it did creat situation where India had to calibrate its policy in the reform of withholding arms suply to Myanmar. India-Myanmar relations are at a crucial juncture and care shall be taken by India to avoid any action or stance that would appeal intrusive to the Junta. At the same time, prolonged political instability in Myanmar is not in the interest of either country and India would be well-advised to do everything it can to help Myanmar move towards political normalization* (Yhome, K., 2009, 20).

Lebih jauh G. Parthasarathy berargumen:

> *New Delhi has successfully combined "efforts to facilitate moves for democratization in Myanmar.....with realism on issue of national interests*" (dikutip dalam Yhome, K., 2009, 19).

Dan riset kategori ***ketiga*** tentang hubungan kedua negara adalah riset yang relatif netral dari upaya mengkaitkannya dengan isu HAM dan keamanan. Riset yang termasuk dalam kategori ini di antaranya yaitu, tulisan Raja Mohan (2010) berjudul *Embracing Myanmar: India's Foreign Policy Realism,* Rada Kumar (2008); dengan judul riset *India as a Foreign Policy Actor–Normative Redux*; Srinjoy Bose (2007) dengan judul *Energy Politics: India-Bangladesh-Myanmar Relations*; dan riset yang dipublikasikan oleh International IDEA bertajuk *Challenges to Democratizaton in Burma, perspectives on multilateral and bilateral responses.* Dalam riset yang disebut

terakhir, hubungan India-Myanmar hanya menjadi salah satu bab dari beberapa bab lainnya saja.

Tabel 1
Peta Riset Hubungan India-Myanmar

No	Fitur	Interpretatif (Ideografis, relativis)		Saintifik (positifis, nomologis, model)
		Mengkaitkan dengan HAM	Memisahkan dengan HAM	
1	Peneliti	Bhattachara (2010), Burma Campaign UK (2007)	Yhome (2009)	Mohan (2010), Bose (2007), International IDEA (2001), Rada Kumar (2008), Ashrof (n.d.)
2	Argumentasi	Relasi India Myanmar berkontribusi pada basis ekonomi Junta dan pelanggaran HAM	Stabilitas politik di Myanmar menjadi kepentingan India, karena mengamankan investasinya di Myanmar	Beragam
3	Basis nilai	Penegakan Hak Asasi Manusia	Kepentingan Nasional (India)	Saintifik

Peta perdebatan yang terjadi di antara para ilmuan yang berada dalam kubu kategori pertama dan kedua sejatinya merefleksikan kepentingan yang mereka usung. Yhome—misalnya yang telah membangun argumentasinya berlawanan dengan riset-riset yang dilakukan para aktivis HAM dan demokrasi seperti Rakhee Bhattacharya—adalah seorang peneliti dari *Observer Research Foundation* yang tidak lain merupakan *public policy think-tank* untuk mempengaruhi formulasi kebijkan India. Lembaga riset ini didukung oleh para pemimpin publik figur lintas sektor India, akademisi dan yang

terpenting yaitu para pemimpin bisnis di India. Sementara kubu ketiga adalah yang secara kepentingan relatif moderat kendati tidak lantas kehilangan sikap kritisnya.

Pergeseran sikap India terhadap Myanmar pada dasarnya merupakan refleksi dari kepentingan beragam aktor dan konteks (ekonomi, sosial maupun politik) baik di tingkat domestik maupun internasional

Dalam riset ini penulis berupaya melihat kasus hubungan India-Myanmar dalam persepektif yang lebih luas dengan mengeksplorasi berbagai faktor baik di tingkat domestik maupun internasional. Sehingga harapannya dapat menyuguhkan gambar yang lebih luas tentang pola relasi hubungan kedua negara.

E. Hipotesa

Pergeseran sikap India terhadap Myanmar pada dasarnya merupakan refleksi dari kepentingan beragam aktor dan konteks (ekonomi, sosial maupun politik) baik di tingkat domestik maupun internasional. Peran para pelaku bisnis, kelompok kepentingan dan penekan tidak kalah pentingnya dengan peran partai penguasa di Parlemen, Perdana Menteri dan pejabat kunci terkait, di samping dinamika ekonomi politik di tingkat internasional seperti runtuhnya Uni Soviet maupun merapatnya rival India—Cina—ke Myanmar.

F. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode riset perpustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Data yang dipakai di sini merupakan data sekunder dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, aneka buku dan jurnal terkait, serta media massa dan sumber-sumber dari internet yang dianggap layak. Penelitian kualitatif membatasi diri hanya pada mengeksplorasi

apa yang menjadi sasaran penelitian dengan berbasis cara berfikir ilmiah.

G. Sistematika Tulisan

Untuk mempermudah penyampaian argumentasi, dalam laporan penelitian ini tulisan diuraikan dalam lima bab. **Bab pertama** berisi tentang proposal penelitian. Dalam bagian ini diuraikan berbagai rencana yang akan dilakukan dalam riset. Argumentasi yang dibangun dalam bagian ini diarahkan untuk meyakinkan bahwa penelitian terhadap pergeseran sikap India terhadap Myanmar tidak hanya penting namun juga menarik. Termasuk di dalam bagian ini adalah rumusan masalah yang membatasi substansi penelitian; kerangka teori yang membimbing alur logika; Hipotesa yang deduksikan dari kerangka teori; *literature review* yang merangkum riset serupa terdahulu*;* Metodologi penelitian; dan sistematika tulisan sebagai penutup dari bab ini.

Bab kedua berisi tentang indikator-indikator perubahan sikap India kepada Myanmar. Bab ini sangat penting tidak hanya karena menunjukkan secara empiris betapa telah terjadi pergeseran sikap India tersebut, namun juga karena isi bab ini adalah sasaran analisa yang hasilnya dipaparkan pada bab selanjutnya.

Bab ketiga dan keempat berisi hasil penelitian. Bila di bab ketiga dieksplorasi serangkaian variabel yang berhubungan dengan perubahan sikap India terhadap Myanmar dalam bingkai argumentasi bahwa dinamika ekonomi, sosial dan politik di tingkat domestik sejatinya berkorelasi dengan pilihan Politik Luar Negeri suatu negara, maka pada bab keempat variabel-variabel di tingkat internasional dieksplorasi dalam kerangka argumentasi bahwa perubahan sikap India terhadap Myanmar sejatinya merupakan respon terhadap dinamika internasional.

Sementara itu dalam **bab kelima** beberapa catatan diinduksikan dari uraian bab-bab sebelumnya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya dari bagian terakhir penelitian ini yaitu rekomendasi penelitian baik untuk para akademisi maupun para pembuat kebijakan.

BAB 2
KENDALA DEMOKRASI DI MYANMAR[4]

November 2010 pesta demokrasi di Myanmar telah dilaksanakan. Sejak itu sinyalemen bangkitnya demokrasi di Myanmar sudah menemukan titik terang. Kendati demikian tampaknya terdapat sejumlah hambatan, baik di tingkat domestik Myanmar sendiri maupun di tingkat intermestik yang akan mempersulit gerakan demokrasi di negeri para jenderal itu.

Tulisan ini bermaksud menganalisis sejumlah faktor yang menjadi batu ganjalan bagi demokrasi di Myanmar. Sebagai sistem pemerintahan yang diyakini terbaik di seluruh permukaan planet bumi, demokrasi tak ayal diperjuangkan habis-habisan oleh para pendukungnya.

Cepatnya ajaran demokrasi tersebar di pelosok-pelosok terpencil di Afrika dan Asia menjadi indikator betapa demokrasi merupakan nilai universal yang diakui oleh setiap insan di bumi

[4] Tulisan ini merupakan hasil revisi dari tulisan penulis yang pernah dimuat dalam Koran Wawasan 25 Agustus 2010 dengan judul asli *Quo Vadis Demokrasi Myanmar?*

ini, kendati tentunya, tidak sedikit aral melintang menghambat perjalanan demokrasi.

Myanmar adalah salah satu contoh negara yang tidak subur untuk demokrasi. Kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi, partai Aung San Suu Kyi, pada Pemilu 1990 yang telah dianulir oleh para jenderal kala itu misalnya adalah bukti nyata betapa demokrasi di Burma harus berdarah-darah untuk hanya sekadar bertahan hidup.

Pemilu 2010 menjadi tonggak baru bagi demokrasi di negeri tersebut. Namun tampaknya perjuangan demokrasi di Myanmar tidak semulus yang dibayangkan. Sejumlah faktor baik di tingkat domestik maupun internasional berpotensi untuk menghambat laju demokrasi di Burma.

A. Kendala di tingkat domestik

Pada tingkat domestik, sedikitnya terdapat dua kendala yang berpotensi menyulitkan demokrasi untuk berkeliyat di Myanmar. ***Pertama***, konstitusi buatan Junta yang mensyaratkan pegawai negeri sipil secara otomatis menjadi pemilih bagi partai berkuasa, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan. Dengan poin ini saja, maka secara itung-itungan di atas kertas sudah dapat diperkirakan hasil pemilu. Delapan juta dari 20 juta penduduk Burma sudah di tangan partai berkuasa.

Tidak mudah bagi rezim yang tengah berkuasa dalam waktu yang lama untuk memberikan begitu saja kekuasannya. Junta diyakini akan berjuang sekuat mungkin untuk tetap bertahan sebagai penguasa di Myanmar. Aneka fasilitas negara sudah bisa dipastikan menjadi instrumen bagi partai berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kedua, setidaknya terdapat 40 partai peserta pemilu di Burma. Tidak sedikit dari partai-partai tersebut berhaluan pro demokrasi, celakanya partai-partai itu belum menunjukkan indikasi untuk berkoalisi. Padahal andai saja mereka berkoalisi

pun tampaknya belum bisa menandingi partai penguasa yang jauh hari sebelum pemilu sudah mengantongi 8 juta suara pegawai negeri sipil.

Keadaan tersebut diperparah dengan perpecahan yang terjadi di tubuh partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Partai Aung San Suu Kyi itu, sebelumnya diharapkan menjadi partai penyeimbang bagi partai penguasa, namun perpecahan internal tampaknya akan semakin memperkuat posisi status quo.

Perpecahan di dalam tubuh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi diawali dari ketidaksukaan parati tersebut terhadap tidak terpenuhinya aneka syarat kondisi untuk pemilu yang adil dan bebas. Kendati demikian tidak semua anggota partai oposisi itu sepakat untuk tidak ikut pemilu.

Khin Maung Shwe, salah satu pentolan partai tersebut misalnya, justru berpendapat, inilah saatnya memainkan peran karena ada wadah untuk membangkitkan demokrasi di Burma (Tempo, 15 Agustus 2010, hal 111). Bahkan lebih jauh lagi Khin dengan empat orang rekannya membentuk partai baru, yang bernama Partai Kekuatan Nasional Demkratik yang langsung mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Langkah tersebut tentu dianggap sebagai pembelotan bagi rekan-rekannya di Liga Nasional.

B. Hambatan internasional

Sementara konsolidasi demokrasi di tingkat domestik belum matang, aneka kesulitan yang bersumber dari tingkat internasional tidak kunjung terurai. Sedikitnya terdapat 3 kendala di tingkat internasional yang sangat merepotkan kebangkitan demokrasi di Burma.

Pertama, sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Eropa dan Amerika yang sebelumnya dimaksudkan untuk memperlemah pemerintahan otoriter di Myanmar, justru

kontra produktif. Alih-alih membuat jera pemerintah berkuasa aneka sanksi tersebut justru semakin merepotkan rakyat. Kesulitan ekonomi yang diderita rakyat Burma akibat sanksi tersebut memberikan ruang yang lebar bagi partai pemerintah untuk melakukan politik uang; ***kedua*** di tingkat regional Asia Tenggara sendiri, tidak nampak indikasi kepeduilian yang riil dari Negara-negara di kawasan itu untuk membantu perjuangan demokrasi Burma.

Indonesia misalnya yang merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN—sebagaimana diungkapkan oleh Win Tin (Anggota Komite Eksekutif Pusat Liga Nasional untuk Demokrasi) dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo—tak bisa diharapkan untuk mendukung pemilu yang demokrastis, yang (dapat) mengubah kondisi Burma menjadi lebih baik (Tempo, 15 Agustus 2010).

Masih menurut Win Tin, satu-satunya Negara tetanga Burma di Asia Tenggara yang peduli dengan demokrasi di negerinya hanyalah Filipina. Sama seperti anggotanya yang tidak memberikan respon berarti kepada kesulitan demokrasi di Burma, ASEAN sebagai organisasi resmi di kawasan itu juga tidak memberikan kontribusi berarti selain hanya aneka pernyataan kecaman yang tidak berprestasi mengubah peta kekuatan penyumbat demokrasi di negeri tersebut.

Prinsip non-interfensi ASEAN diyakini sebagai salah satu penyebab mengapa organisasi regional ini tidak memberikan respon berarti terhadap kediktatoran rezim Junta di Burma. Sikap negara-negara di Asia Tenggara yang tidak peduli dengan perjuangan demokrasi di Myanmar menjadi indikasi betapa para pemimpin di negara-negara di Asia Tenggara tidak memiliki kepentingan dengan demokrasi di Myanmar.

Hubungan antar pemerintah yang terjalin dalam ASEAN justru melahirkan prinsi non-intervensi. Prinsip non-intervensi, dalam konteks ini, patut dicurigai sebagai upaya para rezim di

tingkat domestik untuk mempertahankan kekuasaannya dari intervensi asing.

Ketiga, Lebih parah lagi, India dan Cina sebagai dua raksasa ekonomi Asia justru memberikan bermacam fasilitas bagi pemerintahan Jenderal Than Shwe. Kedua negara itu tidak menunjukkan kepedulian berarti terhadap nasib demokrasi Myanmar.

Aneka bentuk bantuan ekonomi yang berasal dari kedua negara itu, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung dan rumah serta berbagai tawaran kerjasama dalam bidang teknologi seolah justru merestui kekuasaan rezim para jenderal di Myanmar.

Sikap India dan Cina yang terkesan sangat lunak tamapaknya wajar bila dilihat dari sudut pandang realisme politik. Aneka produk Cina yang membanjiri Myanmar membuat pemerintah Cina berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan rezim Junta. Sementara India kerapkali menerima pasokan bahan mentah dari Myanmar untuk kepentingan produksi, hal itu tampaknya membuat India bersikap lunak dengan Junta.

BAB 3
PERGESERAN SIKAP INDIA KEPADA MYANMAR DARI KONFRONTATIF MENUJU KOOPERATIF (1988-2011)

Dengan penduduk 1,2 milyar lebih, India menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia India pantas ditempatkan dalam barisan negara-negara penjaga demokrasi dunia, namun demikian harapan ini nampaknya sulit—bila enggan untuk mengatakan: tidak bisa—dicapai. India menjalin hubungan yang semakin lama semakin dekat dengan Junta setidaknya sejak tahun 1993 ketika J.N. Dixit (*Indian Foreign Secretary*) pada bulan Maret di tahun itu berkunjung ke Yangon untuk secara resmi menyatakan bahwa India sepakat untuk tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar (Renaud, 2003, 5). Bab ini akan menguraikan bagaimana proses merapatnya India ke Myanmar, sebelum akhirnya pada bab selanjutnya akan dianalisis mengapa negara demokrasi terbesar di dunia ini mendekatkan diri ke negara otoriter tersebut.

A. Sikap India terhadap Myanmar di era pasca kemerdekaan

Hubungan kedua negara sejatinya baru dimulai sejak mereka lepas dari kolonialisasi Inggris. India merdeka tahun 15 Agustus 1947, sementara Myanmar 5 bulan setelahnya yaitu 14 Januari 1948. Secara administratif Burma atau Burma Britain sebelum masa kemerdekaan merupakan propensi terbesar dan terkaya India Britain.

Setelah perang Anglo Burma di abad 19 (1824-5, 1852-3 dan 1885-6) Burma oleh Inggris diintegrasikan dengan koloninya, India. Provinsi baru tersebut dikendalikan dari Kalkota kemudian beralih ke New Delhi sejak tahun 1911. Desain Inggris terhadap Burma adalah sebagai pembatas yang memisahkan secara tegas antara 3 kekuasaan. Kekuasaan Prancis di Indocina; kekuasaan Cina; dan Inggris di India (Renaud, 2003, 1).

Perang Dunia II yang bermuara di Eropa menjadi berkah bagi koloni-koloni bangsa Eropa, gerakan nasionalisme mendapatkan momentum di daerah-daerah jajahan Eropa tersebut, termasuk India dan Myanmar. India merdeka dari Inggris pada tahun 1947 sementara Myanmar mengikutinya pada tahun 1948 setelah semangat nasionalisme dan anti penjajahan menjalar dari India ke negeri tersebut. Saat itulah permulaan hubungan antar kedua daerah bekas koloni itu berubah menjadi hubungan antar negara berdaulat.

Hubungan kedua negara cukup harmonis di masa awal pasca kemerdekaan, pada tahun 1951 misalnya kerjasama persahabatan telah ditandatangani kedua belah pihak (Yhome, 2009, 1). Sangat wajar bagi kedua negara memiliki hubungan dekat terutama pasca kemerdekaan, karena keduanya memiliki akar sejarah dan hubungan sosial kultural yang sangat dekat ribuan tahun sebelum mereka lahir sebagai negara modern. Bahkan dalam perkembangannya kedua negara tersebut juga

melakukan aktivitas bersama di kancah internasional, lihat saja misalnya bagaimana kedua negara terlibat aktif dalam Gerakan Non Blok (GNP) saat berkecamuknya perang dingin.

Hubungan baik antara kedua negara bukan tanpa ujian, tahun 1962 terjadi kudeta yang memaksa U Nu turun dari kekuasaannya. Saat itulah hubungan India-Myanmar yang sebelumnya sangat dekat menjadi terputus. Sedikitnya ada tiga alasan yang membuat hubungan kedua negara terputus: (1) Nehru memiliki relasi personal yang cukup dekat dengan U Nu untuk waktu yang cukup lama (Renaud, 2003, 2), sehingga menurut penulis peristiwa kudeta yang menggulingkan U Nu dari tampuk kepemimpinannya di Myanmar yang dilakukan oleh Ne Win menanamkan perasaan tidak suka Nehru terhadap Ne Win yang juga menjadi penggati U Nu sebagai kepala negara; (2) Ne Win tidak berpengalaman dalam menjalin hubungan dengan negara lain, sehingga pergantian kepemimpinan di Myanmar kontan berimplikasi pada putusnya relasi Burma dengan negara-negara tetangganya, termasuk India (Renaud, 2003, 2); dan (3) Ne win memimpin Burma secara represif. Gaya kepemimpinan Ne Win bertentangan dengan pandangan Nehru yang idealis.

Hingga setidaknya tiga dekade pasca kudeta 1962, hubungan India-Burma berjalan labil, India tidak berminat terhadap Myanmar sebagaimana pula sebaliknya. Sempat memang dalam kurun waktu 3 dekade tersebut Perdana Meneteri India berkunjung ke Myanmar (Indera Gandi pada tahun 1967 dan Rajiv pada tahun1987)[5], namun kedua kunjungan tersebut tidak memberikan kemajuan berarti bagi hubungan kedua negara. Stagnasi hubungan kedua negara semakin sulit dihindari ketika fokus India tertuju pada masalah

[5] Pada tahun 1967 India dan Myanmar menandatangani *Land Boundary Agreement,* sementara pada tahun 1986 kedua negara menandatangani *Maritime Boundary Agreement* (Yhome, 2009, 1).

perbatasan di sebelah baratnya, Pakistan (1971). Tidak adanya kemajuan berarti sikap India terhadap Myanmar terus berlangsung hingga terjadi tragedi yang merubahnya yaitu peristiwa gerakan massa yang menggemparkan di Myanmar pada tahun 1988.

B. Periode konfrontasi 1988-1992

Hubungan kedua negara yang dingin berubah menjadi beku ketika pada tahun 1988 Burma di guncang oleh gerakan massa, setelah sebelumnya selama 26 tahun rakyat Burma berada di bawah rezim militer. Cara otoritas Myanmar memerintah telah menanamkan kerinduan mendalam bangsa Myanmar terhadap kebebasan, perdamaian dan kesejahteraan. Terlebih lagi momen tersebut bersamaan dengan kembalinya tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Gerakan massa di jalan-jalan utama Rangoon dan kota-kota besar di Myanmar pun tak dapat dihindari. Melihat luapan demonstrasi yang luar biasa besar itu, otoritas Myanmar merasa eksistensinya sebagai penguasa terancam, sehingga upaya untuk mengontrol dan mengendalikan stabilitas Myanmar segera mereka lakukan. Cara-cara represif dan anti kemanusiaan mereka gunakan untuk menghentikan aksi tersebut. Ratusan demonstran disembelih dan ribuan lainnya dimasukan ke dalam penjara (Renaud, 2003, 3).

Peristiwa berdarah itu membuat India merubah sikapnya menjadi *garang*. *Kegarangan* India ditampakan misalnya oleh PMS Malik (Duta Besar India) yang begitu keras melawan rezim represif Junta, bahkan kantor perwakilan India di Myanmar kala itu menjadi rumah sakit sementara (*makeshift hospital*) bagi para demonstran yang terluka. Banyak mahasiswa yang memanjat tembok Kedutaan Besar India untuk meminta perlindungan. Pasca peristiwa itu New Delhi membekukan hubungannya dengan Yangon dan mendukung secara terbuka

gerakan pro demokrasi Myanmar (Ganesan, 2005, 39; Renaud, 2003, 3). Sikap India dipertegas dengan kebijakan buka pintu (*open door policy*) untuk mahasiswa, aktivis dan pemberontak dari Myanmar yang melarikan diri ke India pada bulan September 1988.

Bahkan yang menarik sikap anti Junta juga ditunjukan oleh publik di India. Hampir semua radio di India menyiarkan kebrutalan Militer Myanmar dan mengutuk aksi tersebut (Renaud, 2003, 3). Kebijakan luar negeri India terhadap Myanmar di masa itu dicirikan dengan aksi-aksi diplomatik yang idealis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Ganesan, 2005, 38).

Melihat aksi India, Myanmar tidak tinggal diam, para Jenderal di Myanmar menuduh India berkoalisi dengan kelompok rakyat pro demokrasi di Myanmar dan etnis-etnis minoritas yang membenci pemerintah. Bahkan India juga dituduh Junta memberikan bantuan kepada para pemberontak di Myanmar. Dalam hal ini misalnya India dituding memberi bantuan finansial dan teknik terhadap etnis Kachins (*Kachin Independence Organisation*) di perbatasan barat laut Myanmar dan etnis Karen (*Karen National Union*) di perbatasan dekat Thailand melalui konsulat di Chiang Mai, Thailand Utara, (Ganesan, 2005, 39; Renaud, 2003, 4).

Untuk meredam aksi massa yang berlangsung lama dan memiliki intensitas yang semakin tinggi bahkan berpotensi mengundang keterlibatan asing, otoritas Myanmar merespon dengan setidaknya 2 konsesi: (1) pengunduran diri Jenderal Ne Win. Ne Win mengumumkan pengunduran dirinya dihadapan konggres setelah menyampaikan penyesalannya atas tragedi menyedihkan yang terjadi selama beberapa bulan belakangan; (2) *State Law and Order Restoration and Council* (SLORC) sebagai

otoritas resmi baru kala itu menjanjikan pemilihan umum secepatnya (Illien, 2008).

Tak lama kemudian, untuk memenuhi Janji, pemilu pun segera diselanggarakan pada tahun 1990. *National League for Democracy* (NLD) di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi keluar sebagai pemenang dengan perolehan kursi lebih dari 2/3 kursi di Parlemen, namun sayangnya kemenangan itu tidak diterima SLORC. Bahkan lebih parah lagi Aung San Suu Kyi dipenjara rumahkan. Peristiwa itulah yang memicu respon internasional, termasuk India yang melanjutkan isolasinya terhadap Myanmar.

Indikator sikap konfrontatif India terhadap Myanmar

Kebijakan konfrontatif India terhadap Myanmar nampak sangat terang benderang pada sedikitnya 3 indikator: ***pertama***, dukungan Kedubes India terhadap demonstran di Myanmar. Salah satu pendorong utama aksi 1988 yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat di Myanmar adalah prilaku otoriter yang ditunjukkan oleh rezim Junta militer yang tidak dapat ditolelir lagi. Kesabaran rakyat Myanmar sampai pada tahap yang tidak bisa dibendung. Gerakan masyarakat sipil yang dimotori oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, buruh, mahasiswa hingga para biksu mengorganisir diri dan memposisikan diri secara frontal berhadap-hadapan dengan Junta militer.

Puncak dari rangkaian aksi itu adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988. Gerakan massa membludak turun ke jalan-jalan di kota-kota utama Myanmar. Kuatnya arus gerakan massa ini mendorong Junta untuk meresponnya dengan cara-cara represif dan anti kemanusiaan, hingga berjatuhannya korban di pihak para demonstran menjadi tidak dapat dihindari. Hari gelap itu kemudian dikenal sebagai peristiwa 8888.

Banyaknya korban yang berjatuhan akibat kekejaman Junta Militer mendorong Duta Besar India, PMS Malik, bersikap sangat keras melawan Junta. Dan memposisikan diri di barisan para demonstran. Sikap Duta Besar India yang begitu keras melawan rezim represif Junta, ditunjukkan misalnya dengan menjadikan kantor perwakilan India di Myanmar sebagai rumah sakit sementara (*makeshift hospital*) bagi para demonstran terluka. Banyak mahasiswa yang memanjat tembok Kedutaan Besar India untuk meminta perlindungan. Pasca peristiwa itu New Delhi membekukan hubungannya dengan Yangon dan mendukung secara terbuka gerakan pro demokrasi Myanmar (Ganesan, 2005, 39; Renaud, 2003, 3).

Kedua, sikap anti Junta India juga nampak dari kebijakan *buka pintu* bagi pelarian politik dari Myanmar. Militer Myamar secara agresif telah memburu para demonstran anti Junta. Terutama tokoh-tokoh yang memiliki basis massa dan menggunakannya untuk melawan Junta. Tak ayal buron pemerintah pun bermigrasi tersebar keluar Myanmar. Sebagian mereka lari ke India untuk mencari perlindungan.

Yang menarik—indikator ***Ketiga***—ternyata sikap anti Junta juga ditunjukan oleh publik di India. Hampir semua radio di India menyiarkan kebrutalan Militer Myanmar dan mengutuk aksi tersebut (Renaud, 2003, 3). Politik Luar Negeri India yang nampak dari aksi-aksi diplomatik dan opini publik di India kala itu benar-benar mencerminkan idealisme bangsa India yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Ganesan, 2005, 38).

C. Pergeseran menuju era kooperasi 1993-2011

Sikap konfrontatif India terhadap Myanmar terus berlangsung, hingga akhirnya pada tahun 1993, peristiwa mengejutkan terkait dengan sikap India terhadap Myanmar terjadi. J.N. Dixit (*Indian Foreign Secretary*) pada bulan Maret di

tahun itu berkunjung ke Yangon. Melalui Dixit India sepakat untuk tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar, yang artinya Pemerintah India menganggap isu gerakan demokrasi Myanmar dan Aung San Suu Kyi sebagai urusan dalam negeri Myanmar (Renaud, 2003, 5). Pada perkembangannya kedua negara menandatangani banyak sekali perjanjian kerjasama, dalam berbagai sektor (Lihat lampiran 2: India-Myanmar *Agreement* dan MoU *1951-2011*) cermati dalam tabel tersebut, betapa jumlah *Agreement* dan MoU kedua negara meningkat pesat terutama sejak tahun 2002.

Periode kooperatif 1993-2011

Setelah India menunjukkan gelagatnya mendekati Myanmar (1993), kedua negara mulai membuka kerjasama ekonomi terutama di perbatasan. *Border Trade Agreement* ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1994 yang tidak lama setelah itu tepatnya pada bulan April 1995 mulai diimplementasikan. Relasi perdagangan yang dirintis dari sekup kecil perbatasan tersebut melibatkan 2 daerah: Moreh di Negara Bagian Manipur, India dan Tamu di Provinsi Sagaing, Myanmar (Renaud, 2003, 5; Ashraf, n.d., 3).

Kerjasama perdagangan tersebut pada perkembangannya menyeret kerjasama militer. Operasi militer gabungan, *Golden Bird*, pun dilakukan kedua negara (Ganesan: 2005, 40; Renaud, 2003, 5). Selain *spillover effect*[6] dari *Border Trade Agreement*, konteks lain yang memicu operasi *Golden Bird* adalah eksistensi kelompok-kelompok pemberontak di perbatasan, sebut saja: *United Liberation Front of Asom, National Socialist Council of Nagaland (IM & K), People's Liberation Army*

[6] *Spillover effect* adalah perluasan kerjasama dari yang sebelumnya hanya satu bidang meluas ke bidang-bidang lainnya. Dalam konteks kerjasama kedua negara tersebut misalnya, kerjasama ekonomi yang berupa *Border Trade Agreement* meluas ke bidang militer yakni *Golden Bird.*

of Manipur, Manipur People's Liberation Front dan *Kuki National Army* yang bergerilya di daerah perbatasan ke dua negara(Renaud, 2003, 5).

Namun, jalinan hubungan kedua negara yang nampak dari relasi ekonomi dan militer itu, nampaknya bukan tanpa kendala. Masalah muncul ketika India menganugrhakan *Nehru Prize for International Understanding* terhadap Aung San Suu Kyi pada tahun 1995. Pilihan kebijakan pemerintah India tersebut, dimaknai oleh Rezim Junta sebagai ketidakseriusan India dalam menjalin hubungan dengan otoritas Myanmar. Hal inilah yang kemudian membuat junta marah dan menghentikan operasi *Golden Bird* (Ganesan: 2005, 40; Renaud, 2003, 5; Ashraf, n.d., 3). Pilihan kebijakan India dengan menganugrahkan *Prize for International Understanding* terhadap Suu Kyi, sejatinya merupakan indikator bahwa India masih bimbang di antara mendukung secara terbuka gerakan demokrasi Myanmar atau berhubungan dengan rezim Junta di negeri itu (Renaud, 2003, 6).

Pada tahun 1998 kehadiran Vajpayee (Perdana Menteri India) telah merubah—setidaknya di masa-masa awal kepemimpinannya—sikap India terhadap Myanmar menjadi bertentangan dengan Burma. Sikap Vajpayee sejalan dengan idealisme Georges Fernandes (Menteri Pertahanan India) yang dikenal sebagai politikus anti Cina. Ia menuduh rezim militer Myanmar sebagai alat Cina untuk melawan India. Dengan lantang dalam sebuah pidato di bulan Mei 1998 Ferdnandes menyatakan bahwa Cina adalah *enemy number one of India*. Retorika Fernandes tersebut mencerminkan komitmen terhadap HAM, demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Asia khususnya di Burma dan Tibet (Renaud, 2003, 6).

Pada tahap awal pemerintahan Vejpaye, kebijakan merapatkan India ke Myanmar memang sempat melemah,

namun itu tidak berlangsung lama karena Jaswant Singh, Menteri Luar Negeri India baru waktu itu, telah menguatkan kembali maksud India untuk mendekati Myanmar. Hal ini bisa dilihat misalnya dari dua kunjungan penting Jaswant Sing: *pertama*, kunjungan ke Tamu, pada bulan Pebruari 2001 untuk meresmikan proyek pembangunan jalan persahabatan India-Myanmar (*India-Myanmar Friendship Road*) sepanjang 160 km antara Tamu dan Kalemyo; dan *kedua* kunjungan ke Yangon (April 2002) untuk membuat kesepakatan proyek pembuatan *Trans Asia Highway* untuk meningkatkan hubungan ekonomi India-Myanmar. Kali ini nuansa realisme politik India di Myanmar terlihat sangat jelas. Dengan langkah tersebut kesan yang muncul yaitu komitmen India terhadap gerakan demokrasi di Myanmar melemah dan India lebih memilih menjalin hubungan dekat dengan penguasa otoriter di negeri itu.

Sebagaimana sebelumnya, hubungan ekonomi kali ini juga merambah ke hubungan lainnya, khususnya militer. Saling kunjung dan pertemuan antar pejabat militer kedua negara pun tak pelak dilakukan. Gen. V. P. Malik (*Indian Chief of Army*) pada bulan Januari 2000 bertemu dengan *counterpart* nya, Gen. Maung Aye, di Yangon, Shillong dan Turn. Orang nomor dua dalam *State Peace and Development Council/* SPDC (nama baru dari SLORC sejak 1997) tersebut juga melakukan kunjungan resmi setidaknya sebanyak 2 kali di tahun yang sama pada bulan Januari dan November.

Tahun berikutnya tepatnya pada bulan Januari 2001 ketua staf angkatan laut, Admiral Sushil Kumar, juga berkunjung ke Yangon. Di mana kunjungan balasan dilakukan di bulan November dalam tahun tersebut oleh Kyi Min (*Commander in Chief Vice Adm.*) selama sepekan. Pada kesempatan tersebut, Kyi Min singgah ke Delhi, Mumbai dan Kolkata.

Merapatnya India ke Myanmar dipertegas dengan dibukanya kembali kantor perwakilan resmi India di Mandalay

pada tahun 2002, dan sebaliknya Myanmar pun membuka kantor perwakilan resminya di Kalkota (Ganesan, 2005, 40). *Burma Canpaign UK* dalam artikel berjudul *"Burma-India Relations: Betrayal of democracy and human rights (A summary of the key issues relating to Burma India)"* yang dipublikasikan pada bulan Maret 2007 dengan tegas mengkritik agresifitas India di Myanmar: *India has shamelessly put its own economic and political interest before human rights and democracy in Burma* (Burma Canpaign UK, 2007, 1).

Pada perkembangannya, kerjasama ekonomi melimpah ke bidang-bidang lain seperti politik; perdagangan dan investasi; keamanan; energi; komunikasi; ilmu pengetahuan; teknologi; pendidikan; sosial dan budaya. Dengan aneka kerjasama dalam berbagai bidang tersebut menunjukan betapa India memiliki hajat yang sangat besar terhadap Mynamar.

Indikator sikap kooperatif India terhadap Myanmar 1993-2011

Pada tahun 1993 India secara radikal mengalihkan haluan Politik Luar Negeri terhadap Myanmar dari yang sebelumnya konfrontatif menjadi sangat kooperatif. Sejumlah indikator yang dapat ditunjuk dari perubahan sikap India tersebut di antaranya yaitu:

Pertama, pernyataan India tidak akan campur tangan ke dalam urusan internal Myanmar. J.N. Dixit (*Indian Foreign Secretary*) pada bulan Maret 1993 berkunjung ke Yangon. Melalui Dixit India sepakat untuk tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar. Artinya Pemerintah India menganggap isu gerakan demokrasi Myanmar dan Aung San Suu Kyi sebagai urusan dalam negeri Myanmar (Renaud, 2003, 5).

Setelah kedua negara memperbaiki hubungan yang sebelumnya tidak harmonis itu, kali pertama yang mereka tata

adalah relasi ekonomi. Secara lebih sepesifik kedua negara telah meneken Kesepakatan Perdagangan Perbatasan (*Border Trade Agreement*) yang sekaligus menjadi indikator ***kedua***. Kedua negara mulai membuka kerjasama ekonomi perbatasan. *Border Trade Agreement* ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1994 yang tidak lama setelah itu tepatnya pada bulan April 1995 mulai diimplementasikan. Relasi perdagangan yang dirintis dari sekup kecil perbatasan tersebut melibatkan 2 daerah: Moreh di Negara Bagian Manipur, India dan Tamu di Provinsi Sagaing, Myanmar (Renaud, 2003, 5; Ashraf, n.d., 3). Diharapkan dari area kecil perbatasan kedua negara tali temali ekonomi antara kedua pihak akan terjalin semakin erat.

Sejalan dengan relasi ekonomi yang kian menguat, kedua negara telah menyepakati dan merealisasikan proyek jalur transportasi India-Myanmar. Proyek ini sekaligus menjadi indikator ***ketiga*** merapatnya India ke Myanmar. Sedikitnya terdapat 4 proyek penting yang telah direalisasikan, yaitu: (1) proyek pembangunan jalan persahabatan India-Myanmar (*India-Myanmar Friendship Road*) sepanjang 160 km yang menghubungkan Tamu dengan Kalemyo telah diresmikan pada Pebruari 2001; (2) proyek pembuatan *Trans Asia Highway* untuk meningkatkan hubungan ekonomi India-Myanmar yang diresmikan pada April 2002; (3), *Trans Asia Railway* yang direncanakan akan menghubungkan 28 negara (*the Hindu*, 1 Juli 2007 dalam Yhome, 2009, 14), termasuk India dan Myanmar. Rencana, rute akan masuk India melalui Tamu, perbatasan Myanmar.; dan (4) Dalam kerangka kerjasama multilateral seperti BIMSTEC dan *Mekong Gangga Cooperation* (MGC) telah direalisasikan proyek pembuatan jalan raya *(highway project)* sepanjang 1.360 km yang menghubungkan India, Myanmar dan Thailand. Pada tahun 2007, tahap pertama proyek ini telah selesai 18 km, menghubungkan Myawaddy, jajaran pegunungan Taninthrayi.

Rencana jalur jalan raya besar itu akan melalui Moreh (India), Tamu, Bagan Myawaddy (Myanmar) dan Mae Sot (Thailand) (Yhome, 2009, 18). Berbagai proyek jalur utama transportasi yang menghubungkan kedua negara ini hemat penulis tidak hanya akan mempererat jalinan ekonomi kedua negara namun juga akan berimplikasi pada meningkatnya volume perdagangan India dengan Indocina bila bukan Asia Tenggara.

Merapatnya India ke Myanmar dimantapkan dengan indikator ***keempat***, yakni meningkatnya bantuan pembangunan India kepada Myanmar. India telah mengucurkan bantuan ke Myanmar melalui beberapa proyek penting setidaknya sejak 2001. Laporan tahunan yang disuguhkan *India's Ministery of External Affairs* menunjukan betapa bantuan India dari tahun-ke tahun terutama dalam dekade 2000-2009 terus meningkat. Tabel berikut menunjukkan betapa India begitu agresif untuk merapatkan diri ke Myanmar.

Tabel 2
Bantuan Pembangunan India terhadap Myanmar 2000-2009
(*in rupees crores*)

Years	Aid	Precentage of India' total aid
2000-1	19,5	3
2001-2	-	-
2002-3	-	-
2003-4	2,10	Less than 1
2004-5	6,21	1
2005-6	22,00	1
2006-7	40,00	3
2007-8	20,00	1,17
2008-9*	56,00 (proposed)	2,7
TOTAL	109,46	12,87

Sumber: *Ministry of External Affair, Government of India, Annual Report (1999 to 2008)* dalam Yhome, 2009, 11;
* data for 2008-9 were taken from Outcome Budgat 2008-9, Ministry of External Affair, Government of India, New Delhi

Kelima, sebangun dengan aneka bantuan yang digelontorkan kepada Myanmar, India juga meningkatkan investasinya di negeri militer itu. Kerjasama bilateral telah dilakukan kedua negara dalam bidang infrastruktur, telekomunikasi, *hydroelectronic generation*, pendidikan dan budaya (Globaltimes: *More India Companies to invest in Myanmar this year*). Secara lebih rinci, berikut adalah data proyek utama India di Myanmar dari tahun 1998 hingga 2008 yang menunjukkan *trend* positif investasi India di negeri otoriter Myanmar.

Tabel 3
Proyek-proyek utama India di Myanmar (dalam juta dollar)

Year	Credit Lines	Project	Remarks
April 1998	10		
Nov, 2000	15		
May 2001	-	Upgration of the 160 kmTamu-Kalewa road	Completed
		Construction and upgradation of the Rhi-Tiddim and Rhi Falam road Oil and Gas	
June 2002	-	Oil and Gas	
Oct. 2003	25	-	
2004	56	Upgradation of the Yangon-Mandalay rail line	
25 Oct. 2004	-	Thamanthi Hydro Electric power	
		Trilateral (India-Myanmar-Thailand) highway project	
	7	Financing a telecom project	
	20	Revamping of Thanlyin refinery	
Oct. 2007	60	Thathay Chaung hydropower project	
April 2008	100	Kaladan multimodal transport	

Sumber: Embassy of India, Yangon, http://www.indiaembassy.net.mm/ dalam Yhome, 2009, 13.

Selain itu India juga membangun sejumlah pabrik baru di bawah *Myanmar's Minister of Industry*-1 dan 2, lihat tabel berikut.

Tabel 4
New Factories under the Ministry of Industry-2 funding by India

No	Plant/ Factory	US$ (Million)
1	Oxygen Plant	0,38
2	Acetylene Plane	0,09
3	Bolt and Nut Factory	0,43
4	LPG Casing Plant	1,10
5	Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR) Plant	0,28

Sumber: Myoe, Maung Aung, 2007, 36

Table 5
New Factories under the Ministry of Industry-1 funding by India

No	Factory	Location	Completion	Industry
1	Bicycle Factory	Yangon	01-02-2000	MGMI
2	Bicycle Factory	Kyaukse	11-04-2002	MGMI
3	Sewing Machine Factory	Kyaukse	05-11-2002	MGMI
4	Dyeing and Printing Factory	Yemathin	21-03-2003	MTI
5	Sewing Machine Factory (Ext)	Kyaukse	16-06-2005	MGMI

Sumber: Myoe, Maung Aung, 2007, 40-1

Konsekuensi paling dekat dari sejumlah indikator yang telah dipaparkan sebelumnya seperti meningkatnya investasi dan terrealisasinya sejumlah proyek jalan raya utama adalah indikator ***keenam*** yaitu meningkatnya volume perdagangan. Perdagangan India-Myanmar dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan signifikan. India adalah *partner* dagang terbesar keempat Myanmar setelah Thailand, Cina dan Singapur; menjadi pasar terbesar kedua aneka produk Myanmar setelah Thailand; serta tidak kurang dari 25% eksport Myanmar mesuk ke pasar India (Globaltimes: *Myanmar president's India visit to boost bilateral ties*).

Sebaliknya India merupakan sumber import terpenting ke tujuh bagi Myanmar bahkan pada tahun anggaran 2006/7 kedua pemerintah memiliki target perdagangan US$ 1 milyar. Di tahun tersebut *the Indian Commerce Ministry* mencatat bahwa perdagangan kedua negara mencapai US$ 921, 87 juta, atau hampir memenuhi target (Yhome, 2009, 5). Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan voleme perdagangan kedua negara.

Grafik 1
Perdagangan India-Myanmar 1999-2011
(dalam juta dollar)

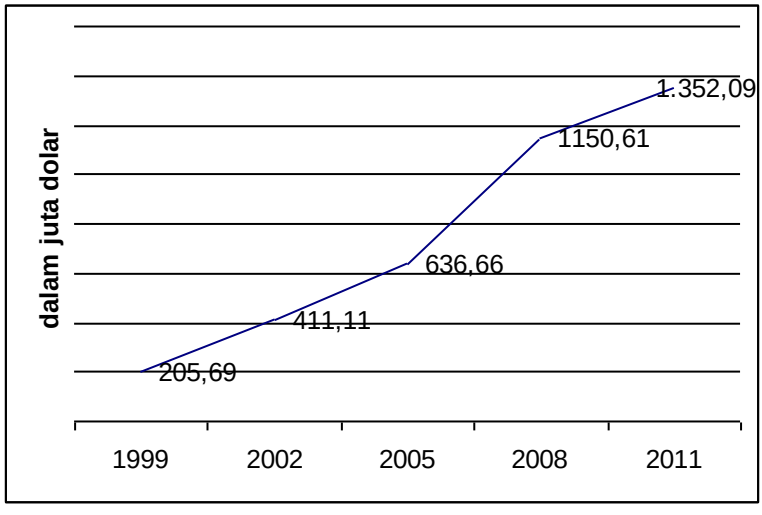

Sumber: *Department of Commerce*, *Export Import Data Bank* http://commerce.nic.in/eidb/ecntq.asp, diakses 1 Agustus 2011,
data diolah penulis sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengawal relasi ekonomi yang semakin terjalin erat tersebut, para pejabat kunci kedua negara itu menandatangani banyak sekali MoU terkait, dengan jumlah MoU yang semakin lama semalin banyak. Meningkatnya jumlah MoU yang diteken oleh para pejabat kunci di kedua negara tersebut menjadi indikator ***ke tujuh*** yang menunjukkan bahwa India semakin erat mendekap Myanmar. Semakin banyaknya MoU di antara kedua negara itu juga sekaligus menunjukkan betapa

tingginya intensitas saling kunjung antara pejabat dari kedua negara itu.

Pada tenggat waktu 1993 hingga 2001 atau sejak J.N. Dixit menyatakan India tidak akan campur tangan ke dalam urusan internal Myanmar hingga dibukanya Kedubes India di Yangon, tahun 2002, dalam catatan penulis hanya terdapat 3 perjanjian[7] yang disepakati kedua pemerintahan. Jumlah ini kemudian melonjak dalam tenggat waktu antara 2002 (setelah dibuka Kedubes India di Yangon) hingga 2011 (batas akhir riset ini). Terdapat setidaknya 31 perjanjian yang dibuat kedua pemerintah dalam tenggat waktu itu. Melonjaknya jumlah perjanjian tersebut yang tentu juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah kunjungan para pejabat terkait menjadi indikator bahwa intensitas hubungan kedua negara meningkat. Lihat lampiran 2: tabel MoU/ *Agreement* India-Myanmar 1951-2011. Grafik 1 berikut diolah dari tabel tersebut:

[7] Adapun perjanjian yang ditandatangani dalam periode tersebut diantaranya yaitu: *Trade Border Agreement* bulan Januari 1994 dan diimplementasikan pada 1995; kerjasama militer *Golden Bird* (1995); dan *Agreement on science and technology* pada tahun 1999.

Grafik 2
Jumlah Perjanjian India-Myanmar Meningkat

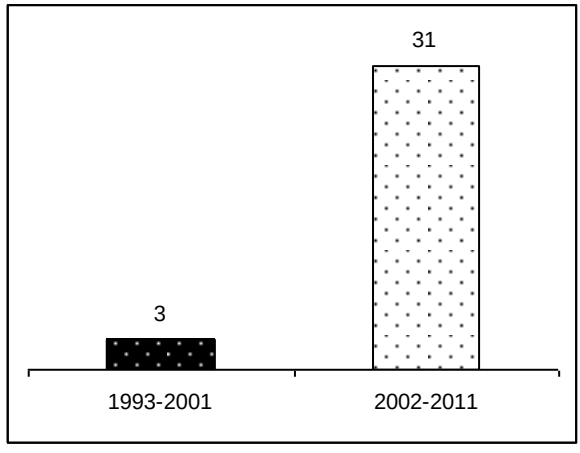

Sumber: Yhome, 2009, 23-26; Embassy of India, data diolah penulis.

Relasi ekonomi yang tumbuh diantara kedua negara—yang nampak dari sejumlah indikator di atas—memiliki efek *spillover*, yakni meluasnya kerjasama ke luar area ekonomi, salah satunya yaitu meluas ke ranah militer. Terjalinnya hubungan militer kedua belah pihak menjadi penanda ***ke delapan*** semakin eratnya hubungan kedua negara. Secara lebih khusus kerjasama militer *Golden Bird* mulai dirintis. Kedua negara telah merealisasikan operasi militer gabungan ini (Ganesan: 2005, 40; Renaud, 2003, 5). Saling kunjung dan pertemuan antar pejabat militer kedua negara pun tak pelak telah dilakukan. Gen. V. P. Malik (*Indian Chief of Army*), misalnya, pada bulan Januari 2000 bertemu dengan *counterpart* nya, Gen. Maung Aye, di Yangon, Shillong dan Turn.

Maung Aye juga melakukan kunjungan resmi setidaknya sebanyak 2 kali di tahun yang sama pada bulan Januari dan November. Tahun berikutnya tepatnya pada bulan Januari 2001 ketua staf angkatan laut, Admiral Sushil Kumar, juga berkunjung

ke Yangon. Di mana kunjungan balasan dilakukan di bulan November dalam tahun tersebut oleh Kyi Min (*Commander in Chief Vice Adm.*) selama sepekan. Pada kesempatan tersebut, Kyi Min singgah ke Delhi, Mumbai dan Kolkata.

Puncak dari serangkaian relasi kedua belah pihak baik yang berada dalam ranah ekonomi maupun militer adalah dibukanya kembali Kedubes India di Mandalay, Myanmar pada 2002, indikator ***ke sembilan***. Sebaliknya Myanmar juga membuka kantor perwakilan resminya di Kalkota (Ganesan, 2005, 40). Indikator ini sangat penting bagi arah baru hubungan kedua negara. Dibukanya kedua kantor perwakilan resmi di masing-masing negara tersebut menunjukkan betapa secara formal hubungan kedua negara telah meninggalkan fase konfrontatif dan menuju fase baru, hubungan yang jauh lebih kooperatif dan progresif bila enggan untuk mengatakan ambisius .

Tabel 6
Indikator perubahan sikap India terhadap Myanmar 1988-2011

Indikator perubahan sikap India 1991-2011	
Konfrontatif (1988-1992)	**Kooperatif (1993-2011)**
1. Kantor perwakilan India di Myanmar menjadi rumah sakit sementara para demonstran terluka dan akhirnya ditutup; 2. Kebijakan *buka pintu* India bagi pelarian politik dari Myanmar. 3. Hampir semua radio di India menyiarkan kebrutalan Militer Myanmar dan mengutuk aksi tersebut (Renaud, 2003, 3)	1. Pernyataan India tidak akan turut campur ke dalam urusan internal Myanmar (1993); *2.* kerjasama ekonomi perbatasan (1994); *3.* Realisasi proyek jalur transportasi India-Myanmar (2001, 2002); *4.* Bantuan pembangunan ke Mynamar; *5.* Investasi India di Myanmar; *6.* *Trend* positif perdagangan kedua negara. *7.* Meningkatnya jumlah MoU dan *Agreement*; *8.* Diwujudkannya kerjasama militer *Golden Bird* (1995); *9.* Dibukanya kembali Kedubes India di Mandalay pada tahun 2002;

D. Pola sikap India terhadap Myanmar

Setelah diuraikan dinamika perjalanan hubungan kedua negara, kini saatnya dalam bagian terakhir bab ini akan diinduksikan sejumlah pola yang terbentuk dalam relasi kedua negara itu. Hemat peneliti sedikitnya terdapat 3 (tiga) pola yang dapat ditarik dari sikap India kepada Myanmar, yaitu: kooperatif, stagnasi dan konfliktual.

Ketiga pola tersebut tidak berjalan secara linier melainkan bergantian secara simultan. Tenggat waktu antara tahun 1948 hingga 1961 hubungan New Delhi-Yangon berpola kooperatif. Keaktifan kedua negara dalam Gerakan Non-Blok menunjukan betapa kepentingan keduanya selaras. Selain itu kedua negara juga telah menjalin kerjasama persahabatan pada tahun 1951 (Yhome, 2009,1).

Pada perkembangannya pola hubungan kedua negara berubah secara ekstrim menjadi sangat kooperatif (1993-2011). Indikator yang dapat ditunjuk adalah: India sepakat tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar (1993); *Trade Border Agreement* Januari 1994 yang diimplementasikan pada tahun 1995; Kerjasama militer *Golden Bird* (1995); Realisasi proyek jalur transportasi India-Myanmar; Dibukanya kembali kantor perwakilan resmi India di Mandalay pada tahun 2002; Bantuan pembangunan ke Mynamar; Meningkatnya jumlah MoU dan *Agreement*; Investasi India di Myanmar; serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya volume perdagangan kedua negara

Pola kooperatif diantara keduanya sejatinya dapat dipahami dengan mudah. Pengalaman kolonialisasi Inggris membuat kedua negara merasa memiliki nasib serupa. Belum lagi secara fisik kedua bangsa tersebut memiliki relasi sejarah, alam, sosial dan budaya yang sangat lama sebagai konsekuensi dari letak mereka

yang secara geografis bertemu secara darat. Selain itu, dan ini tidak kalah pentingnya, Nehru dan U Nu memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Kedua tokoh tersebut terlibat sangat aktif dalam proses perjuangan kemerdekaan.

Pola hubungan selanjutnya adalah stagnasi yang terjadi dalam kurun waktu 1962-1987. Instabilitas politik terjadi di Mynamar, hingga puncaknya pada tahun 1962 terjadi kudeta militer di negeri itu. U Nu dijungkalkan dari tampuk kekuasaannya oleh Jenderal Ne Win[8]. Dengan elit politik baru, paska kudeta, hubungan Myanmar dengan India terputus. Hemat penulis ada tiga sebab: (1) Nehru tidak suka dengan Ne Win yang telah mengkudeta sahabatnya, U Nu; (2) Ne Win tidak memiliki pengalaman diplomasi internasional; dan (3) pola kepemimpinan Ne Win yang otoriter tidak sejalan dengan idealisme Nehru.

Indikator yang menunjukkan stagnasi hubungan kedua negara adalah saling abainya kedua negara terhadap yang lain. India fokus kepada masalah keamanan di sebelah baratnya, Pakistan dan kemerdekaan Banglades pada 1971 (Renaud, 2003, 2), sementara Myanmar disibukkan dengan program nasionalisasi Ne Win yang membuat pemerintah Myanmar fokus ke masalah-masalah dalam negeri ketimbang internasional.

Hubungan yang stagnan itu kemudian berubah menjadi berpola konflik pada rentang waktu tahun 1988-1992.

[8] Kegagalan U Nu dalam mengembalikan stabilitas politik di Myanmar memaksa Militer di bawah pimpinan Ne Win pada tahun 1962 mengambil alih kekuasaan nasional dari U Nu. Dua kebijakan U Nu yang membuat stabilitas politik semakin tidak terkendali yaitu: *pertama*, rencana U Nu membentuk Negara Bagian baru untuk etnis Mons dan Arakan yang telah mendorong etnis-etnis lain mengajukan tuntutan serupa dan; *kedua*, rencana U Nu menjadikan Budhisme sebagai agama negara yang juga telah ditentang kuat oleh para penganut agama-agama minoritas. Situasi ini kembali mendorong Myanmar memasuki kekacauan panjang dan keos (Ilien, 2008).

Pembantaian yang dilakukan militer terhadap para demonstran pada tanggal 8 Agustus 1988 membuat India sangat geram terhadap pemerintah militer Myanmar. Bahkan kantor perwakilan India di Myanmar menjadi rumah sakit sementara para demonstran. India mengutuk aksi Junta dan membekukan hubungannya dengan Myanmar. Aksi India paling ekstrem adalah kebijakan ”buka pintu” bagi pelarian politik dari Myanmar (Renaud, 2003, 3).

Pada perkembangannya pola hubungan kedua negara berubah secara ekstrim menjadi sangat kooperatif (1993-2011). Indikator yang dapat ditunjuk adalah: India sepakat tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar (1993); *Trade Border Agreement* Januari 1994 yang diimplementasikan pada tahun 1995; Kerjasama militer *Golden Bird* (1995); Realisasi proyek jalur transportasi India-Myanmar; Dibukanya kembali kantor perwakilan resmi India di Mandalay pada tahun 2002; Bantuan pembangunan ke Mynamar; Meningkatnya jumlah MoU dan *Agreement*; Investasi India di Myanmar; serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya volume perdagangan kedua negara.

Bab selanjutnya akan menjawab pertanyaan: mengapa terjadi pergeseran sikap India terhadap Myanmar dari konfrontatif menjadi kooperatif?, terutama dalam tenggat waktu 1991 hingga 2011.

Tabel 7
Pola hubungan India Myanmar (1948-2011)

Priode	Pola	Indikator	Isu
1948-1961	Kooperatif	• Aktivitas bersama dalam GNB; • kerjasama persahabatan (1951) (Yhome, 2009,1)	*National building*
1962-1987	Stagnasi	• abainya kedua negara terhadap yang lain. India fokus kepada masalah keamanan di sebelah baratnya, Pakistan dan kemerdekaan Banglades pada 1971 (Renaud, 2003, 2), sementara Myanmar disibukkan dengan program nasionalisasi Ne .	-
1988-1992	Konfliktual	• Kantor perwakilan India di Myanmar menjadi ”rumah sakit sementara” para demonstran (8/8/88); • *Open Door Policy* untuk para pelarian politik dari Myanmar (1988-89) (Renaud, 2003, 3). • Hampir semua radio di India menyiarkan kebrutalan Militer Myanmar dan mengutuk aksi tersebut (Renaud, 2003, 3)	HAM dan demokrasi
1993-2011	Kooperatif	• Penyataan India tidak akan turut campur ke dalam urusan internal Myanmar (1993); • Kerjasama ekonomi(1994); • Diwujudkannya Kerjasama militer, *Golden Bird* (1995).(Renaud, 2003, 5); • Realisasi proyek jalur transportasi India-Myanmar (2000, 2001); • Dibukanya Kedubes India di Mandalay tahun 2002; • Bantuan pembangunan ke Myanmar; • Meningkatnya jumlah *MoU* dan *Agreement*; • Investasi India di Myanmar meningkat (Ganesan, 2005, 40); • Pertumbuhan perdagangan (K. Yhome, 2009, 23-26);	Ekonomi, keamanan

BAB 4
KEPENTINGAN PARA AKTOR DI BALIK PERGESERAN SIKAP INDIA TERHADAP MYANMAR

Baik Milner maupun Oatley—sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelunya—sepakat bahwa sejatinya Politik Luar Negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi maupun politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di kedua level tersebut digerakan oleh aktor yang majemuk. Memperhatikan prilaku negara secara eksklusif dengan mengabaikan aktor-aktor lain tidak hanya akan menghasilkan analisa yang bias namun juga tidak komprehensif. Ini disebabkan karena senyatanya aktor-aktor yang berinteraksi bukan hanya aktor negara saja, berbagai aktor non negara seperti kelompok kepentingan, para pelaku bisnis maupun individu-individu berpengaruh saling berhubungan baik di dalam maupun antar negera baik dalam konteks sosial, ekonomi maupun politik.

Sejalan dengan perspektif Milner dan Oatley tersebut, Interdependensi kompleks—sebagaimana diteorikan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1997)—yang nampak dari *multiple channels* (banyak jalur di samping jalur resmi pemerintah); *multiple issues* (banyak isu); dan tidak selalu relevannya kekuatan militer sebagai instrument dalam politik global (Jemadu, A., 2008, 46), membuat analisis *state centric* terkesan menyederhanakan hubungan internasional yang sejatinya begitu kompleks. Kasus pergeseran sikap India terhadap Myanmar dari konfrontatif menuju kooperatif dipahami dengan asumsi-asumsi ini.

Untuk mempermudah uraian eksplanasi pergeseran sikap India tersebut, penulis akan berfokus pada analisa di tingkat domestik dan internasional. Bab ini akan berfokus pada dinamika di tingkat domestik yang meliputi: identivikasi aktor-aktor yang terkait dengan pergeseran sikap India terhadap Myanmar; interaksi kepentingan para aktor di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar; dan peta interaksi kepentingan para aktor di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar. Sementara analisa variabel-variabel di tingkat internasional akan diuraikan pada bab IV.

A. Identifikasi Para Aktor

Terdapat banyak aktor yang terkait dengan pergeseran sikap India terhadap Myanmar. Hemat penulis aktor-aktor tersebut diantaranya yaitu: *India National Congres* (INC) sebagai partai dominan di Legislatif; Perdana Menteri Narashima Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh di Eksekutif yang juga berasal dari partai INC; sementara di luar lingkaran birokrasi eksekutif dan legislatif terdapat aktor-aktor seperti: para pelaku bisnis; masyarakat luas di India dengan presepsinya terhadap Myanmar; serta kelompok-kelompok separatis di perbatasan.

Identifikasi para aktor tersebut akan meliputi sedikitnya 3 hal, yaitu: karakteristik, kepentingan dan preferensi kebijakan.

India National Congres (INC)

INC merupakan partai tertua dan terbesar di India yang berdiri pada tahun 1885. Di masa kolonial INC memposisikan diri sebagai gerakan perjuangan yang berhadap-hadapan dengan kolonial Inggris. Partai ini mengusung ideologi nasionalisme. Kendati beberapa kali pernah tidak berkuasa, namun kemampuannya dalam mempertahankan kesinambungan dukungan pemilih India relatif stabil. Ini nampak misalnya dari banyaknya kader partai INC yang menjabat sebagai Perdana Menteri[9].

Lihat saja misalnya setelah Nehru yang menjabat sejak tahun 1947 hingga 1964, Lal Bahadur Shastri dari kader Partai yang sama meneruskan dari 1964 hingga 1966, dilanjutkan oleh Indira Gandhi yang menjadi Perdana Menteri dua kali (pada 1966-77 dan 1980-84), lalu Rajiv Gandhi (1984-89), P.V. Narasimha Rao (1991-96) hingga Manmohan Singh yang sama seperti Indira menjabat dua kali yaitu 2004–09 dan 2009 sampai tulisan ini dibuat. Banyaknya Perdana Menteri India yang berasal dari INC menjadi indikator betapa partai tersebut merupakan partai yang relatif stabil dalam menjaga suara pendukungnya.

Ideologi, preferensi kebijakan dan kepentingan INC

Oatley (2006) berpendapat bahwa gagasan, ide atau semacamnya yang dipercaya seseorang atau kelompok orang

[9] Dalam sistem pemerintahan di India, Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas yang memiliki sedikitnya 272 dari 511 kursi di Parlemen, atau bila tidak ada, maka Perdana Menteri berasal dari koalisi mayoritas dominan. Banyaknya kader Partai INC yang menjabat sebagai Perdana Menteri menjadi indikator betapa Partai tersebut sering menjadi partai mayoritas atau setidaknya bagian koalisi yang cukup berpengaruh di Parlemen.

akan mempengaruhi prilaku politik mereka. Gagasan atau ide akan membuat seseorang atau kelompok yang meyakininya mengidentifikasi diri dan merumuskan kepentingan mereka. Kepentingan itulah yang selanjutnya akan menuntun perilaku politik orang atau kelompok tersebut. Sampai tahap ini, maka penting bagi kita sebelum memahami prilaku partai INC mengetahui gagasan atau ide yang berada di balik eksistensi partai itu.

INC merupakan partai yang memiliki kesetiaan kepada ajaran leluhur mereka, Nehru dan Gandhi. Ajaran kedua tokoh kunci partai ini menjadi sangat keramat dan sangat dihormati oleh bangsa India bahkan puluhan tahun setelah mereka berdua wafat. Di masa kolonial, INC memposisikan diri sebagai gerakan perjuangan melawan kolonialisasi Inggris dengan mengusung ideologi nasionalisme yang kuat. Kecurigaan terhadap segala sesuatu yang bersifat asing membuat Nehru (pemimpin INC dan Perdana Menteri pertama India) menjadi sangat antipati terhadap asing, sehingga, bahkan, sangat sulit bagi investor asing untuk memasuki India di era sebelum reformasi ekonomi 1991.

Nehru juga membawa gerbong besar INC memasuki ideologi kiri ala Soviet yang Ia kombinasikan dengan semangat swadeshi yang diprakarsai oleh Mahatma Gandhi. Pada saat yang bersamaan Ia juga mengagumi nilai-nilai demokrasi masyarakat kapitalisme Barat (Winarno, Budi, 2010, 214-215).

Ringkasnya ideologi INC adalah percampuran antara nasionalisme, sosialisme dan demokrasi yang sangat anti kolonialisasi.

Di sisi lain INC sebagai partai politik di dalam sistem politik demokrasi memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan baik di Legislatif maupun di Eksekutif. Pertanya: apa yang dilakukan INC setelah berkuasa? Atau apa preferensi kebijakan

INC? Dan apah INC cukup konsisten dengan ideologi yang diusungnya. Untuk keperluan menjawab pertanyaan ini, mengetahui orang kunci dan perannya di dalam partai akan sangat membantu.

Manmohan Singh dan transformasi ideologi INC

Empat puluh tahun lebih perjalanan sejarah India sebagai bangsa merdeka (1947-1991) menjadi bukti telak betapa gagasan para pendiri negeri tentang pembangunan ekonomi India tidak begitu menggembirakan. Untuk waktu yang cukup lama bangsa India berada dalam kemiskinan akut hingga akhirnya di masa Perdana Menteri Narasima Rao, India mulai dikemudikan menuju arah pembangunan ekonomi yang condong ke liberal atas rekomendasi teknokrat Manmohan Sing (Meredith, 2010, 35) yang kala itu menjabat sebagai menteri keuangan India. Atau dengan kata lain Manmohan Sing adalah inisiator dan konseptor reformasi kebijakan ekonomi India 1991.

Dua hal penting yang perlu di garis bawahi terkait dengan pandangan Manmohan terhadap ekonomi yaitu ***Pertama***, Manmohan Singh adalah ekonom produk pendidikan barat. Ia meraih gelar sarjana (1957) dari Universitas Cambridge (St. John's College) dan gelar Ph.D (1962) dari Universitas Oxford (Nuffield College); dan ***kedua*** Manmohan meniti karirnya di jalur ekonomi selain sebagai tenaga pengajar di banyak perguruan tinggi di India. Adapun karir ekonom Singh di antaranya yaitu: *Chief Financing for Trade Section* UNCTAD PBB, yang bersekretariat di New York; *Economic Advisor, Ministry of Foreign Trade*, India (1971-72); *Chief Economic Advisor* Menteri Keuangan India (1972-76); Direktur Riset Bank India (1976-80); Direktur Pembangunan Industri Bank India (1976-80); Sekretaris Menteri Keuangan (*Departement of Economic Affairs*) Pemerintahan India (1977-80); Gubernur Riset Bank India

(1982-1985); Wakil Ketua, Komisi Perencanaan India, (1985-87); *Advisor* Perdana Menteri India bidang *Economic Affairs* (1990-91); Menteri Keuangan India, (21 Juni 1991-15 Mei 1996); Ketua Oposisi di Rajya Sabha; dan Ia menjadi Perdana Menteri India untuk dua periode (22 Mei 2004 – 09 dan 2009 hingga ketika manuskrip ini ditulis beliau masih menjabat).

Bila melihat serangkaian rekam jejak perjalanan Manmohan Singh maka dapat dibuat kesimpulan kasar bahwa Ia memiliki pandangan ekonomi yang berbeda dengan INC yang nasionalis dan sosial demokrat, namun pilihan kebijakan liberalisasi ekonomi yang diinisiasi oleh Singh tidak membawa gejolak internal berarti di tubuh partai besar itu. Hal ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh keberhasilan terobosan Manmohan Singh yang telah mendorong India bangkit dari krisis ekonomi. Atau dengan kata lain Manmohan telah berhasil mentranformasikan paradigma ekonomi partainya dari yang semula anti pati terhadap asing menjadi tidak.

Perdana Menteri Narashima Rao

Narashima Rao adalah Perdana Menteri India pada periode 1991-1996. Di bawah kepemimpinan Rao India memulai pergeseran sikapnya kepada Myanmar, atau tepatnya pada bulan Maret 1993. Kebijakan pergeseran sikap India tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Rao.

Rao lahir di negara bagian Andhra Prades pada 28 Juni 1921, Ayahnya P. Ranga Rao dan ibunya Rukminiamma berasal dari keluarga petani. Kendati di zamannya kelak (ketika menjabat sebagai Perdana Menteri) reformasi ekonomi bersejarah India merupakan buah dari kebijakan politiknya, namun sejatinya Rao tidak begitu banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ekonomi. Hal ini nampak dari latar belakang pendidikannya. Ia memperoleh gelar sarjana

dalam bidang seni dari Osmania University dan gelar master di bidang hukum dari Fergussan College dari Universitas Mumbai atau dengan kata lain latar belakang pendidikan maupun pengalamannya dalam bidang ekonomi sangat terbatas.

Ia seorang pejuang kemerdekaan di masa kolonial Inggris. Pasca kemerdekaan, Rao meniti karir politik dari Andhara Prades tempat di mana Ia dilahirkan. Sejumlah jabatan penting Rao di Andara Pradesh di antaranya yaitu: Menteri Hukum dan Informasi 1962-64, Menteri Hukum dan Wakaf 1964-67, Menteri Kesehatan dan Kedokteran 1967, Menteri Pendidikan 1968-71 hingga Kepala Menteri Andhra Pradesh pada tahun 1971-1973.

Ketika partai INC pecah pada tahun 1969, Rao berada di pihak Indira Gandhi dan konsisten hingga akhir hayat. Bukan tidak mungkin karir politik Rao di tingkat nasional yang dirintisnya mulai tahun 1970 an atau setahun setelah perpecahan INC merupakan buah dari keberpihakan Rao pada kubu Indira Gandhi, sehingga pada perkembangannya sejumlah jabatan penting di tingkat nasional dicapai oleh Rao, diantaranya yaitu: Menteri Luar Negeri 1980-84; Menteri Dalam Negeri 1984; Menteri Pertahanan 1984-85 hingga puncaknya jabatan sebagai Perdana Menteri India pada tahun 1991-96 ketika INC kubu Indira Gandhi memenangkan 232 kursi di Parlemen atau menjadi partai dengan kursi terbanyak di lembaga legislatif India.

Para Pelaku Bisnis

Banyak sekali para pelaku bisnis yang diuntungkan oleh mencairnya hubungan India-Myanmar. Kepentingan mereka jelas dan tegas yakni mencari keuntungan finansial. Sementara preferensi kebijakan mereka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni sebelum liberalisasi ekonomi dan setelahnya. Sebelum

liberalisasi ekonomi mereka menghendaki agar negara memberikan perlindungan kepada mereka dengan subsidi dan tarif import yang tinggi. Sementara pasca liberalisasi setelah mereka tumbuh kuat seiring dengan pertumbuhan ekonomi India maka kebanyakan mereka menginginkan kemudahan-kemudahan perdagangan luar negeri.

Beberapa sektor bisnis yang diuntungkan dengan mencairnya hubungan India-Myanmar di antaranya yaitu: perusahaan-perusahaan energi seperti *The Oil and Natural Gas Corp* (ONGC), *Gas Authority of India Ltd* (GAIL) dan *Essar Oil Ltd* (EOL); perusahaan-perusahaan farmasi seperti *Ranbaxy, Dr. Reddy's, Wockhardt, apla, Nicolas Piramal, Lupin Laboratories, dan Sun Pharmaceutical Industries* hingga Tata Motor di sektor otomotif.

Sementara di sisi lain banyak juga perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh dan berada di bawah menteri perindustrian India 1 dan 2 seperti: *Oxygen Plant, Acetylene Plane, Bolt and Nut Factory, LPG Casing Plant, Aluminium Conductor Steel Reinforced* (ACSR) *Plant, Bicycle Factory, Bicycle Factory, Sewing Machine Factory, Dyeing and Printing Factory, Sewing Machine Factory* (Ext).

Banyaknya pengusaha yang diuntungkan dengan peristiwa mencairnya sikap India kepada Myanmar, membuat mereka secara koleknif mendorong kebijakan merapatnya India terhadap Myanmar. Sulit—bila bukan mustahil—mengabaikan keterlibatan bisnis dalam relasi India-Myanmar, sehingga bisa dipastikan bahwa mereka terlibat dalam ranah kebijakan.

Kelompok separatisme di perbatasan

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, distribusi penduduk yang sangat luas dengan berbagai jenis fragmentasi mulai dari ide, keyakinan, kepentingan hingga

prilaku politik yang beragam maka salah satu tantangan besar India adalah gangguan separatisme.

Di India terdapat banyak kelompok separatisme. Mereka memiliki motif dan startegi yang beragam, namun secara umum motif mereka adalah ingin melepaskan diri dari pemerintahan India karena presepsi mereka tentang buruknya pemerataan ekonomi di India. Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki basis gerakan di perbatasan.

Di perbatasan India-Myanmar seperti di Arunachal Prades, Manipur, Mizoram, dan Nagaland misalnya terdapat kelompok-kelompok separatis, tunjuk saja kelompok-kelompok seperti: *United Liberation Front of Asom, National Socialist Council of Nagaland (IM & K), People's Liberation Army of Manipur, Manipur People's Liberation Front* dan *Kuki National Army* (Renaud, 2003, 5)

Kelompok-kelompok separatis tersebut tak ayal cukup merepotkan pemerintah. Bahkan tidak tanggung-tanggung demi mewujudkan integrasi nasional pemerintah India tidak segan untuk bekerjasam dengan negara yang sejara idealisme bertolak belakang, Myanmar.

B. Interaksi kepentingan para aktor di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar

Pilihan kebijakan India untuk merapat ke Myanmar yang nampak dari tahun 1993 hingga sekarang (ketika manuskrip ini dibuat) merupakan produk dari interaksi banyak kepentingan para aktor. Tarik ulur, saling menyesuaikan dan upaya untuk mensinergiskan kepentingan, bahkan hingga adu kekuatan yang terjadi di antara para aktor di berbagai level secara konsisten memposisikan India untuk mendekatkan diri ke Myanmar. "Interaksi kepentingan" menjadi kata kunci untuk memahami prilaku India. Bagian ini berupaya untuk menyusun potongan-

potongan informasi sehingga menjadi suatu gambar utuh yang dapat bercerita kepada kita tentang penyebab merapatnya India kepada Myanmar.

Kekuatan INC di Parlemen

India memiliki sistem pemerintahan Parlementer. Perbedaan mendasar sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan presedensial adalah bahwa dalam sistem pemerintahan Parlementer pemerintahan di pimpin oleh Perdana Menteri, sementara dalam sistem persedensial pemerintahan langsung di bawah Presiden. Perdana Menteri di India berasal dari partai mayoritas di Parlemen atau yang memiliki kursi minimal 272 dari 511 kursi di Parlemen. Bila tidak ada Partai yang memiliki kursi sampai batas minimal tersebut maka diperkenankan melakukan koalisi.

Dengan format kelembagaan seperti itu, maka kebijakan—termasuk kebijakan luar negeri—dalam sebuah sistem pemerintahan Parlementer akan mengalami perdebatan panjang dulu di Parlemen sebelum akhirnya hasilnya dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah koordinasi Perdana Menteri. Perlu di catat: ***pertama*** ingat, Perdana Menteri di India adalah pemimpin partai dominan atau koalisi partai di Parlemen artinya preferensi kebijakan seorang Perdana Menteri dengan partai mayoritas atau koalisi yang dipimpinnya di Parlemen memiliki peran penting dalam menuntun arah kebijakan; konsekuensinya adalah ***kedua*** kecil sekali kemungkinan terjadi perbedaan signifikan antara Parlemen dan Pemerintah terkait dengan preferensi kebijakan, mengingat pemimpin partai mayoritas atau koalisi merangkap posisi sebagai Perdana Menteri.

Perubahan sikap India terhadap Myanamr dari koonfrontatif menjadi kooperatif terjadai pada tahun 1993 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narashima Rao (1991-

1996) yang berasal dari Partai INC. Berikut adalah komposisi kursi di Parlemen India pada periode 1991-1996.

Grafik 3
Komposisi kursi di Parlemen India pada periode 1991-1996

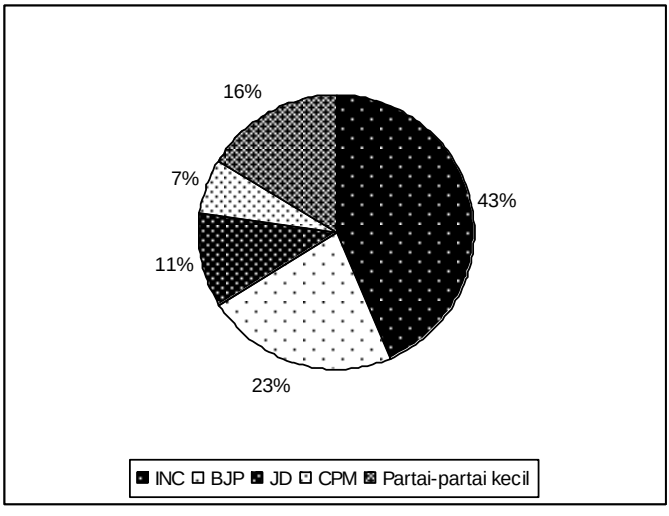

Sumber: http://www.indian-electionaffairs.com/results/nationwide1991.html, diakses 23April 2012, data diolah penulis.

Dengan komposisi kursi di Parlemen seperti terlihat pada grafik di atas maka peluang INC untuk memenangkan setiap perdebatan di Parlemen lebih besar, setidaknya secara voting. Ini artinya di tingkat Legislatif maupun Eksekutif, INC memiliki kekuasaan untuk mentransformasikan kepentingan-kepentingannya dengan relatif lebih mudah.

Ketika itu India berada dalam awal masa perbaikan ekonomi pasca liberalisasi 1991, INC sebagai Partai dominan di Parlemen dituntut untuk mampu menyelamatkan perekonomian nasional, atau jika gagal berarti INC akan ditinggalkan para pemilihnya dalam pemilu di masa yang akan datang.

Pada saat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi India dalam waktu-waktu dekat pasca liberalisasi dibarengi dengan 3 efek berantai, yaitu: perluasan pasar; meningkatnya konsumsi

energi; dan meningkatnya kebutuhan bahan baku terutama di bidang farmasi mendororong INC untuk berinisiatif mendekatkan diri ke Myanmar terutama karena aneka kebutuhan India pasca liberalisasi ekonomi nampaknya paralel dengan berbagai potensi yang terkandung di Myanmar.

Kepentingan para pebisnis India di Myanmar

Sebelum reformasi 1991, para pelaku bisnis di India tidak sebebas setelahnya, pemerintah memegang kendali di banyak sektor ekonomi. Pajak yang tinggi dan perijinan yang terlampau sulit membuat sektor swasta tidak dapat tumbuh subur di India. Di awal-awal tahun kemerdekaannya, pemerintah India dengan kebijakan ekonomi proteksionis memang bisa mendirikan sejumlah perusahaan, namun tidak dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang tepat sehingga perusahaan-perusahaan di India menjadi tidak kompetitif.

Jemsetji Tata adalah salah satu elit bisnis India yang terkait secara langsung dengan perjuangan pembangunan India di awal kemerdekaan negeri itu. Jemsetji Tata, pendiri Tatat Group, kala itu, adalah seorang nasionalis yang bermipi akan swasembada negaranya (Meredith, 2010, 40). Paham serupa juga diturunkan pada anaknya, pendiri Tata Iron and Steel pada tahun 1907 yang juga telah mendirikan maskapai pertama India (kelak menjadi Air India), yaitu J.R.D. Tata. Ia juga mendirikan pabrik kosmetik India pertama yang bernama Lakme, atas permintaan Nehru di tahun 1952 (Meredith, 2010, 40). Demikianlah karakteristik para pebisnis India di awal-awal kemerdekaannya. Mereka memiliki pandangan nasionalistik yang kuat dan kurang kompetitif. Ringkasnya, secara umum dinamika perindustrian India di bawah kendali pemerintah pra 1991 menciptakan pola perusahaan-perusahaan kurang kompetitif.

Ini berbeda dengan pola prilaku para pebisnis pasca reformasi ekonomi 1991 ketika India—karena syarat yang harus dibayar sebagai konsekuensi pinjaman IMF—membuat kebijakan ekonominya jauh lebih longgar. Di mana investasi asing menjadi lebih mudah masuk; perijinan bisnis lebih sederhana dan mudah setidaknya bila dibandingkan dengan masa sebelumnya; serta tarif perdagangan relatif rendah. Dalam seting kebijakan seperti ini tak ayal perusahaan-perusahaan di India menjadi berkembang. Mereka lebih inovatif dan kompetitif sehingga produktivitas bertambah dan pertumbuhan ekonomi pun mengikutinya. Dalam tata perekonomian baru paska reformasi, eksistensi para pebisnis di India semakin diakui dan pengaruhnya terhadap arah kebijakan ekonomi juga semakin kuat.

Perubahan struktur ekonomi di India pasca liberalisasi diikuti dengan perubahan karakteristik para pebisnis di negeri tersebut. Sebelumnya dalam sistem ekonomi yang terpusat para pebisnis relatif berkarakter konservatif. Hal ini dikarenakan subsidi pemerintah dan sangat sedikitnya kompetitor terutama yang berasal dari luar negeri, namun setelah liberalisasi ekonomi karakteritik tersebut berubah, para pelaku ekonomi India sekarang lebih kompetitif. Kehadiran para investor asing dan terbatasnya subsidi karena aneka regulasi yang berbasis pasar bebas membuat mereka dituntut untuk mampu bertahan dalam situasi baru itu, sehingga satu-satunya pilihan bagi mereka adalah berinovasi.

Pertumbuhan ekonomi di India

Kebijakan liberalisasi ekonomi India 1991 diikuti dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dengan sangat menggairahkan pertumbuhan ekonomi menyentuh angka rata-rata 8 % setidaknya sejak tahun 2003. Cermati grafik pertumbuhan ekonomi India dan tabel berikut.

Grafik 4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi India (1988-2011)

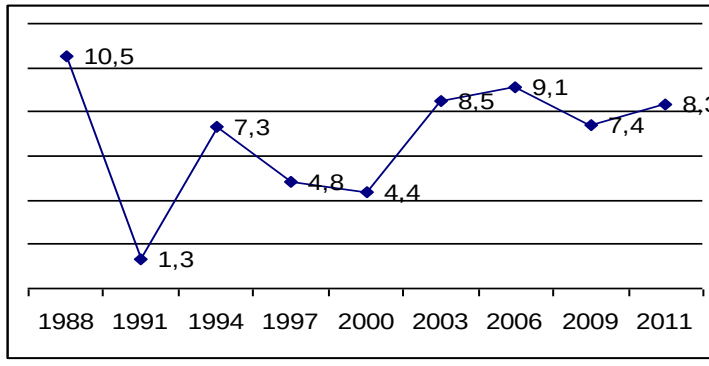

Catatan: data dari tahun 1988 hingga 2006 diambil dari *hand book of statistic on India Economy* 2006, table 2, col 2 yang dikutip oleh Arvind (2006), hal: 5, sementara data tahun 2009 dan 2011 berasal dari: http://business.mapsofindia.com/india-gdp/

Gambar 1
Ilustrasi pengaruh kebijakan ekonomi terhadap pola pertumbuhan ekonomi

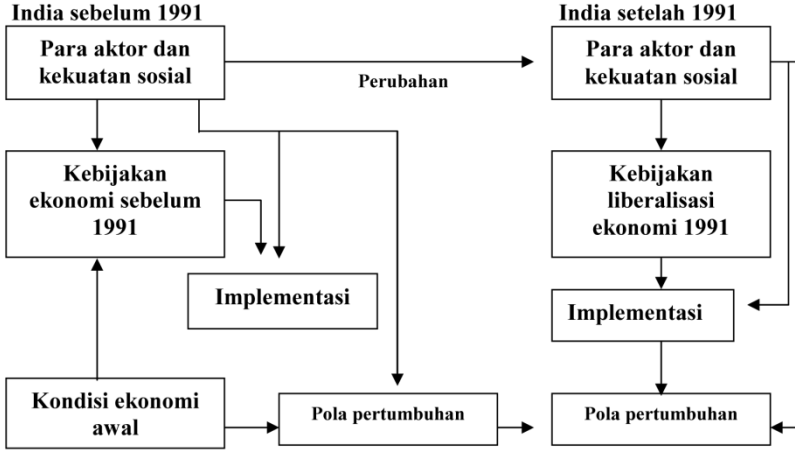

Catatan: Bagan diadaptasikan dari: Degnobol, J. dan Martinussen, 2001, 24.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan terbukanya tiga ranah penting yang menjadi peluang bagi para pelaku bisnis, yaitu: ***pertama***, perluasan pasar ke Myanmar dan Indocina sebagai konsekuensi dari meningkatnya

perindustrian di India; ***kedua***, meningkatnya konsumsi energi untuk menggerakkan perekonomian India sebagai konsekuensi tingginya tingkat pertumbuhan; dan ***ketiga***, meningkatnya jumlah bahan baku terutama untuk aneka produk obat-obatan.

Perluasan pasar ke Myanmar

Perluasan pasar ke Myanmar menjadi konsekuensi logis dari meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap GDP India. Pada tahun 1987/8 atau ketika kebijakan liberalisasi di India belum direalisasikan sumbangan sektor Industri terhadap total GDP di India hanya 22 % sementara sektor pertanian jauh lebih tinggi yakni mencapai 28 %. Kemudian pada tahun 2004/5 atau 13 tahun paska kebijakan liberalisasi ekonomi diimplementasikan pertanian turun menjadi 18 % sementara Industri naik menjadi 23 %.

Meningkatnya kontribusi sektor industri tersebut dibarengi dengan meningkatnya perdagangan India-Myanmar. Bila pada tahun 1999 perdagangan kedua negara hanya mencapai angka 205, 69 juta dolar maka pola perdagangan terus meningkat hingga mencapai angka 1.352, 09 juta dolar pada tahun 2011. Sementara itu aneka produk India yang dieksport ke Myanmar dipimpin oleh barang-barang hasil produksi, terutama produksi baja, besi, obat-obatan dan berbagai produk alat-alat elektronik rumah tangga.

Data-data tersebut menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi perluasan pasar aneka produk India ke Myanmar atau dengan kata lain para pebisnis India mendapatkan berkah yang teramat besar dari kebijakan merapatnya India ke Myanmar. Perusahaan-perusahaan farmasi dan berbagai produsen alat-alat elektronik sangat diuntungkan (lihat tabel 8, *top five commodities of Indian exports to Myanmar*).

Grafik 5
Komposisi GDP India 1987-1988

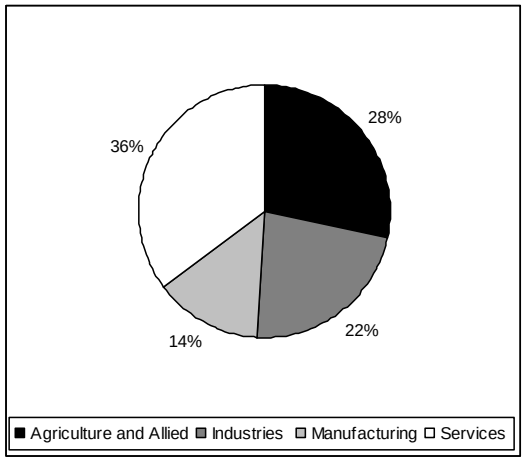

Sumber: *handbook of statistics on Indian economy*. 2006, table 3, dalam Arvind, 2006, 13, data diolah penulis.

Grafik 6
Komposisi GDP India 2004-2005

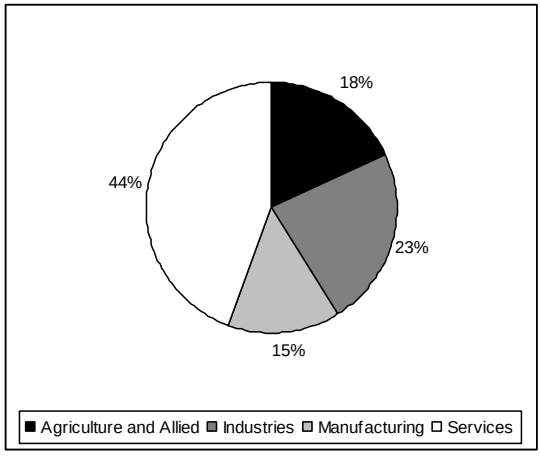

Sumber: *handbook of statistics on Indian economy*. 2006, table 3. dalam Arvind, 2006, 11, data dimodivikasi penulis.

.

Grafik 7
Perdagangan India-Myanmar 1999-2011
(dalam juta dollar)

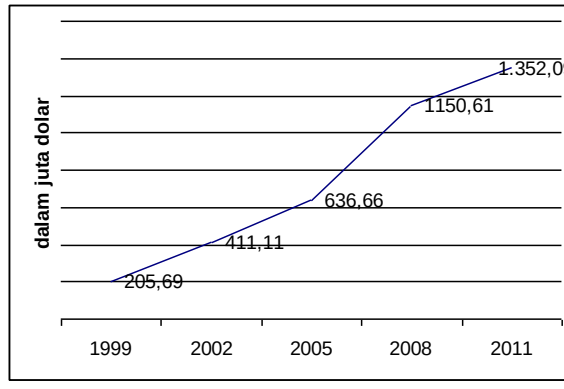

Sumber: *Department of Commerce, Export Import Data Bank* http://commerce.nic.in/eidb/ecntq.asp, diakses 1 Agustus 2011, data diolah penulis sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 8
Top five commodities of Indian exports to Myanmar

HS Code	Commodity	2007-2008	2008-2009	Growth (%)
72	Iron and steel	29,89	52,03	74,06
30	Pharmaceutical products	42,41	49,92	17,7
84	Nuclear reactor, boilers, machinery, mechanical appliances; parts there of.	18,9	17,41	-7,9
85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers television image and sound recorders and reproducers , and parts.	12,88	13,62	5,8
73	Articles of iron or steel.	12,1	11,09	-8,39

Sumber: *India Department of Commerce*

Meningkatnya kebutuhan bahan baku industri farmasi di India

Ranah kedua yang menjadi peluang bagi para pelaku bisnis India yaitu meningkatnya kebutuhan India terhadap bahan baku untuk aneka produk-produknya. Sama seperti

kebutuhan India terhadap ekspansi pasar, kebutuhan terhadap bahan baku juga meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan produktivitas di India, sehingga tak pelak India sangat berkepentingan terhadap berbagai potensi alam yang terkandung di Myanmar. Contoh bagus untuk kasus ini adalah kebutuhan perusahaan-perusahaan farmasi di India terhadap aneka akar-akaran seperti kunyit dan jahe yang diimport dari Myanmar. Terkait dengan hal ini ada dua hal yang hendak penulis ketengahkan, yaitu: pertumbuhan produksi farmasi di India; dan impor bermacam bahan mentah produk farmasi dari Myanmar.

Pertumbuhan produksi farmasi di India[10]

Setidaknya hingga 2007 volume produksi farmasi India menempatkan negeri itu sebagai produsen ke 4 terbesar di dunia atau 8% dari total produksi global, dan peringkat ke 13 dari sisi nilai produksi atau 1,5% dari total nilai produksi global. Bahkan untuk produksi obat curah (*bulk*) India merupakan satu dari lima produsen terbesar di dunia dan memasok 40% kebutuhan global. Tidak hanya itu sekitar 40% total produksi farmasi India juga memenuhi pasar eksport.

Direktorat Intlejen Komersial dan Statistik (DGCIS) India melaporkan eksport produk obat-obatan India meningkat 15% selama kurun waktu 1999-2000; 20,7% pada 2000-2001; 11,13 % pada tahun 2001-2002; dan 21,2% pada 2002-2003. Bahkan pada tahun 2004-2005 eksport India mencapai 3,7 milyar dollar (55% dalam bentuk formula dan 45% curah). *Parmaceutical Export Promotion Council* melaporkan India tidak hanya mampu memenuhi pasokan kebutuhan obat dalam negeri hingga setidaknya 95%, bahkan India juga menjadi pemasok 40% kebutuhan obat-obatan curah dunia.

[10] Bagian ini disarikan dari tulisan Samhadi dalam buku yang diedit oleh Suhanda, (2007, 117-22).

Saat ini sudah banyak perusahaan farmasi India yang mengantungi izin dari berbagai organisasi resmi farmasi dunia. Tunjuk saja misalnya *United State Food Drugs Administration* (USFDA) telah memberikan izin resmi kepada sedikitnya 100 perusahaan farmasi di India; *Medicine Control Agency* (MCA) Inggris telah memberikan persetujuan kepada 45 perusahaan; sementara *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia memberikan persetujuan setidaknya kepada 19 perusahaan.

India menyalip Italia sebagai pemasok unsur farmasi aktif (*Active Pharmaceutical Ingredients*/ API). Bila pemain global lain memberi upah pekerja hingga 18-20% harga produk, maka India bisa menekan hingga batas 7-8% saja. Bersama Brazil dan Cina, India juga merupakan pemain besar untuk produk farmasi generik. Biaya produksi obat generik di India 45 % lebih murah dari negara-negara barat, sementara itu untuk biaya infrastruktur India bahakan bisa 40 % lebih murah.

★★★★★★★★★★
India menyalip Italia sebagai pemasok unsur farmasi aktif (*Active Pharmaceutical Ingredients* / API). Bila pemain global lain memberi upah pekerja hingga 18-20% harga produk, maka India bisa menekan hingga batas 7-8% saja.
★★★★★★★★★★

India mampu memproduksi 10 obat generik baru dalam setahun sementara produsen asing maksimal hanya 2 produk. Dengan kekuatan dibidang sintetis organik dan rekayasa proses, India dikenal sebagai produsen berbiaya rendah untuk *Antiretroviral* dan pemasok bagi perusahaan-perusahaan farmasi besar di dunia untuk produk tersebut.

Dewasa ini India memiliki sedikitnya 20.000 perusahaan farmasi, 260 di antaranya sekala kecil dan menengah. Dari jumlah tersebut 45 perusahaan sudah memiliki cabang atau fasilitas produksi di luar negeri. Beberapa nama yang bisa disebut dari perusahaan-perusahaan farmasi India di

anataranya adalah Ranbaxy, Dr. Reddy's, Wockhardt, Apla, Nicolas Piramal, Lupin Laboratories, dan Sun Pharmaceutical Industries.

Pertumbuhan industri farmasi di India sejatinya berawal dari kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Paten (*Paten Act*) pada tahun 1970. UU tersebut telah berhasil melepaskan India dari ketergantungan terhadap obat-obatan asing dan menjadikan India sebagai swasembada obat dengan melarang paten terhadap produk obat, produk pertanian dan energi atom sehingga memungkinkan perusahaan farmasi lokal mengembangkan aneka rekayasa dan riset di bidang farmasi. Kebijakan tersebut semakin dirasakan manfaatnya bagi perkembangan produksi farmasi di India terutama ketika kebijakan liberalisasi ekonomi diterapkan pada tahun 1991.

Impor bahan mentah dari Myanmar untuk produk farmasi di India

Statistik import India dari Myanmar yang disuguhkan oleh *Department of Commerce* menunjukkan betapa import akar-akaran bersama sayur-sayuran menempati rating tertinggi import India dari Myanmar.

Tabel 9
Top five commodities of India import from Myanmar

HS Code	Commodity	2007-2008	2008-2009	Growth (%)
7	Edible vagetables and certain roots and tubers	441,7	611,78	38,51
44	Wood and articles of wood; wood charcoal	357,42	311,01	-12,99
5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included		2,93	
41	Raw, hides and skins (other then furkins) and leather	1,71	1,16	-32,03
9	Caffer, tea, mate ang spices	0,47	0,91	91,9

Sumber: *India department of Commerce*

Seting kebutuhan terhadap bahan baku untuk berbagai produksi farmasi di India nampakanya paralel dengan aneka potensi alam yang dimiliki Myanmar. Myanmar merupakan daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga daratan tersebut memiliki kandungan tanah yang subur dan tentunya menjadi basis bagi rempah-rempah, kayu, serta aneka hasil hutan lainnya. Beragam hasil alam tersebut berpotensi menjadi bahan baku bagi berbagai produk perusahaan-perusahaan di India. Akar-akaran misalnya, dibutuhkan perusahaan farmasi di India untuk aneka produk mereka.

Basis sumber daya alam yang dimiliki Myanmar membuat berbagai macam barang-barang ekspor negeri ini ke India didominasi oleh tanam-tanaman dan akar-akaran seperti kunir, jahe, kayu, arang dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain Myanmar menjadi salah satu basis penting bagi bahan baku aneka produk obat-obatan India, sehingga berkonflik dengan Myanmar hanya akan mempersulit geliat para pelaku bisnis farmasi di dalam negeri.

Gambar 2
Sekema penalaran pengaruh meningkatnya kebutuhan bahan baku produk farmasi di India terhadap merapatnya India ke Myanmar

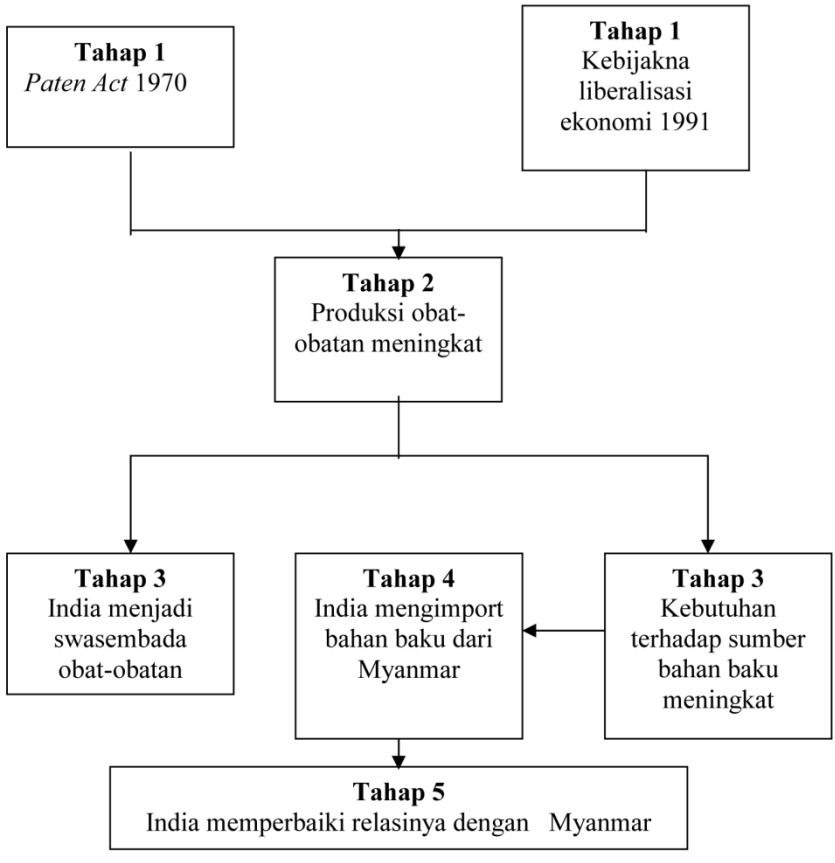

Investor energi India di Myanmar

Tak dapat disangkal kebutuhan akan energi menjadi masalah utama ketika perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan. Data statistik dari *U.S. Energy Informations Administration* seperti yang akan ditampilkan di bawah menunjukkan betapa terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kebutuhan dan kemampuan produksi energi di India. Konteks kebutuhan terhadap energi ini ternyata paralel dengan

meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan sektor energi asal India di Myanmar.

Sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat hingga rata-rata 8% setidaknya sejak tahun 2003, tak ayal perusahaan-perusahaan di India sangat membutuhkan pasokan energi untuk aktivitas produksi mereka. Konsumsi minyak India diperkirakan hampir sama dengan Jerman 2,6 juta barel perhari, kendati masih di bawah Cina yang 6,9 juta barel perhari dan masih jauh di bawah Amerika 20,6 juta barel per hari (Meredith, 2010, 177), namun ketika pendapatan orang India bertambah maka akan dibarengi dengan meningkatnya permintaan mobil, yang maknanya akan menambah besar konsumsi minyak. Lihat saja misalnya pada Maret 2002 penjualan mobil di India hanya 675.000 melonjak sangat tajam dalam waktu tiga tahun, pada 2006 penjualan mobil di sana mencapai 1,14 juta (Meredith, 2010, 231).

Kesenjangan produksi dan konsumsi antara minyak dan gas perusahaan-perusahaan di India sangat lebar. Seting kebutuhan akan energi yang sangat besar sebagai implikasi dari perekonomian India yang melaju pesat menjadi pra kondisi yang mendorong perusahaan-perusahaan energi India tersebut berekspansi ke daerah-daerah penghasil sumber energi di luar negeri.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak dan gas perusahaan-perusahaan di India sangat lebar. Seting kebutuhan akan energi yang sangat besar sebagai implikasi dari perekonomian India yang melaju pesat menjadi pra kondisi yang mendorong perusahaan-perusahaan energi India tersebut berekspansi ke daerah-daerah penghasil sumber energi di luar negeri. Berikut adalah grafik yang menunjukkan kesenjangan produksi dan konsumsi energi di India.

Grafik 8

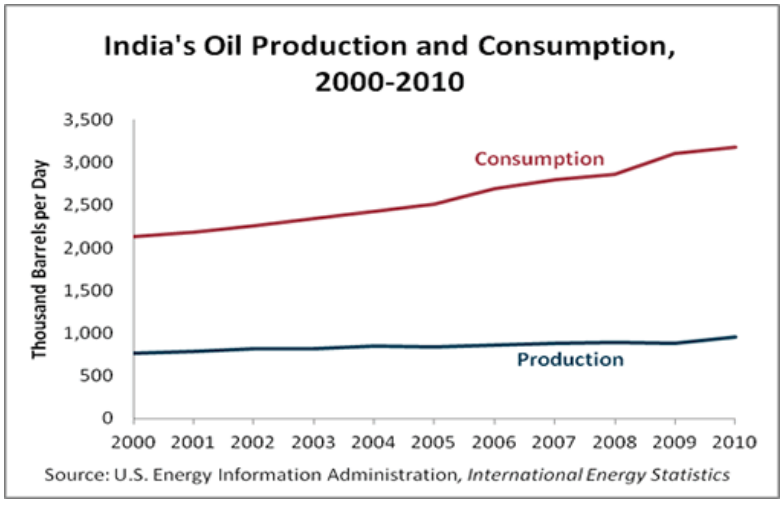

Sumber: http://www.eia.gov/cabs/india/Full.html.

Grafik 9

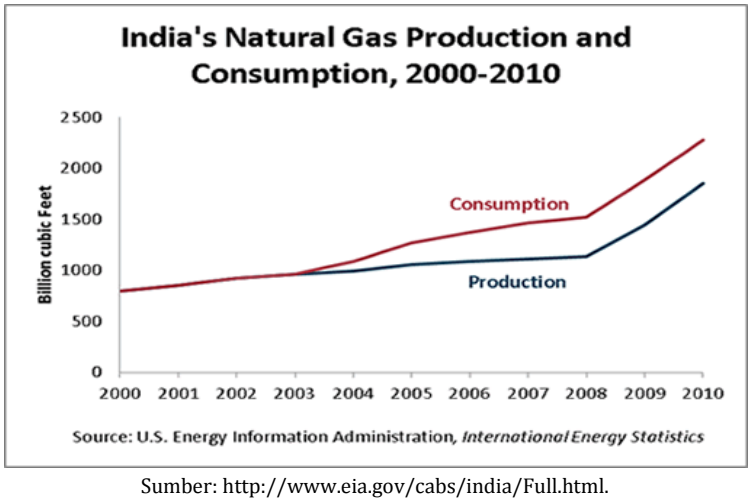

Sumber: http://www.eia.gov/cabs/india/Full.html.

Ada sedikitnya 2 jenis investasi energi India di Myanmar: energi konvensional yakni: minyak dan gas alam; dan energi alternatif, yakni *hydropower*. ***Pertama***, dalam sektor minyak dan gas alam, ada sejumlah perusahaan India yang telah berinvestasi di negeri para Jenderal tersebut (Yhome, 2009), yaitu:

1. *The Oil and Natural Gas Corp* (ONGC) yang menanamkan sahamnya di ladang minyak lepas pantai (*offshore*) blok: AD-2, AD-3, dan AD-9 dengan masing-masing saham 100% serta di *offshore* blok: A-1 dan A-3 yang masing-masing 20%. Pada tangal 24 September 2007, ONGC menandatangani kesepakatan dengan *Myanmar Oil and Gas Enterprise* (MOGE) untuk mengeksplorasi gas di setidaknya 3 blok lepas pantai. Dalam kesepakatan tersebut, ONGC menjanjikan investasi sebesar US$ 150 juta. Dengan kesepakatan itu maka—setidaknya hingga 2007—India memiliki investasi di 7 blok ladang gas dan minyak di Myanmar;
2. *Gas Authority of India Ltd* (GAIL), perusahaan sektor energi ini berinvestasi di *offshore* blok: A-1 dan A-3 dengan porsi masing-masing 20% dan 10%. Desember 2006, GAIL menggarap blok A-7 di area *offshore* Rakhine berkonsorsium dengan *Silver Wave Energy,* namun di bulan Juli 2007 GAIL telah memutuskan untuk menarik sahamnya. Penarikan saham GAIL merupakan permintaan pemerintah Myanmar untuk menjual gas Shwe kepada Cina, walaupun dua perusahaan minyak dan gas India tersebut memiliki 30% saham di ladang gas Shwe. Peristiwa tersebut tidak membuat para investor India urung niat untuk kembali menanamkan sahamnya di Myanmar;

3. *Essar Oil Ltd* (EOL)—perusahaan sektor privat pertama India—telah menandatangani dua *Production Sharing Contracts* (PSCS) dengan Myanmar untuk eksplorasi di dua blok sekaligus, satu *offshore* (blok A-2) dan satu *onshore* (blok L) di bulan Mei 2005;
4. Hingga setidaknya 2008, *Adany Energy* (sebuah perusahaan India swasta) telah bernegosiasi dengan Pemerintah Myanmar untuk mengerjakan pendistribusian gas di Yangon (ibu kota lama Myanmar) dan Naypyidaw (ibu kota baru).

Agresifitas investor energi India di Myanmar terlihat sangat wajar, mengingat: minyak dan gas alam ternyata menjadi salah satu sumber alam utama yang dikandung Myanmar. Myanmar adalah salah satu produsen minyak tertua di dunia dan telah mengeksportnya sejak tahun 1853 (birmanie.total.com: *Oil and Gas in Myanmar*). Myanmar juga memiliki sumber gas alam yang melimpah dengan 3 *offshore* dan 19 *onshore* dengan total cadangan energi diperkirakan 89.722 (TCF/ *trillion cubic feet*) atau 2.54 (BCM/ *Billion cubic meters*) (www.istockanalyst.com: *Indian Companies to invest more in Myanmar offshore gas projects*).

Lebih jauh, negeri ini juga memiliki setidaknya 18.012 TFC atau 510 BMC sumber energi di luar cadangan gas di *offshore* dan *onshore*. Banyak perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi dalam sektor ini, sebut saja misalnya: Total dari Prancis, CNOOC dan SNPC dari Cina, Daewoo dari Korea Selatan, ONGC dari India, Danford Equities dari Australia, PTTEP dari Thailand termasuk perusahaan-perusahaan minyak dari Inggris, Kanada, Indonesia, Malaysia dan Rusia.

***Kedua*,** selain dari sektor minyak dan gas, kebutuhan India terhadap energi, mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut sangat berminat

mengembangkan energi alternatif, *hyodropower*. Pemerintah India kini sedang mengupayakan import energi dari negara-negara tetangganya. Proyek ini dilakukan dengan cara mendorong pengembangkan *hydropower* di negara-negara seperti Bhutan, Nepal dan Myanmar (Yhome, 2009, 10). Terkait dengan proyek hydropower, beberapa langkah penting dilakukan:

1. di Myanmar, India telah mengembangkan proyek *hydropower* dengan kapasitas hingga 100.000 MW.
2. Tidak tanggung-tanggung, Bank EXIM India menandatangani *line of Credit* hingga US$ 60 juta dengan *Myanmar Foreign Trade Bank* (MFTB) untuk membangun proyek *Thathay Chaung Hydropower* di Rakhine (29 Oktober 2007).
3. *National Hydropower Corporation* (NHPC) telah menandatangani MoU dengan Myanmar pada 16 September 2008 untuk *joint ventures* di lembah sungai Chindwin. Sedikitnya ada dua proyek yang dimasukan dalam kesepakatan tersebut: (a) sebuah dam *hydropower* dengan 1.200 MW di Thamanthi; dan (b) dam dengan kapasitas 600 MW di Shwezaye. Pemerintah India tidak lepas tangan begitu saja, bahkan menganggarkan dua proyek tersebut. Rencananya listrik yang diproduksi akan disalurkan ke India melalui Manipur.
4. Pada 2009 India telah mengerjakan desain dan mesin untuk *the Sedawgyi hydroelectric project*, 25 MW.
5. Perkembangan lebih lanjut menurut pejabat senior NHPC—sebagaimana dilaporkan CRI di bawah tajuk berita: *India Bakal Bangun PLTA di Myanmar*—India akan menanam modal 5,6 miliar dolar Amerika untuk membangun dua pusat listrik tenaga air berkapasitas

masing-masing 510 megawatt dan 520 megawatt di perbatasan Myanmar. Dua tim pakar India telah dikirim untuk melakukan survei di Myanmar.

Lebih jauh India juga berupaya memasang jalur pipa dari Myanmar ke India melalui Banglades, namun sayang upaya tersebut gagal. Sebagai gantinya India berencana membangun jalur pipa dari Myanmar melalui timur laut India. Pipa rencana melalui sungai Kaladan dari Sittwe di Myanmar menuju Negara Bagian Mizoram, Asam, Bengal Barat dan menyambung ke Haldia-Jagdishpur di Gaya Bihar. Estimasi biaya untuk pembuatan pipa tersebut mencapai US$ 3 milyar. Rute baru jalur pipa tersebut berjarak 1.400 km, lebih panjang dari rute lama yang direncanakan melalui Bangladesh dengan panjang hanya 950 km.

Kebutuhan energi India yang merupakan akibat dari pertumbuhan perekonomian negeri tersebut mendorong perusahaan-perusahaan di India untuk selalu mencari sumber energi baru, sementara di sisi lain Myanmar merupakan negara yang memiliki potensi energi.

Investasi perusahaan otomotif India di Myanmar

Kehadiran Tata Motor di Myanmar telah menambah daftar panjang investasi perusahaan-perusahaan India di Myanmar. Perusahaan pembuat truk terbesar keempat di dunia ini telah menjalin kerjasama dengan *Myanmar Automobile and Diesel Industries* untuk membuat pabrik truk berat di Magwe, sekitar 480 kilometer dari Yangon, dan mulai beroperasi pada kuartal terakhir tahun anggaran yang berakhir Maret 2011 (channelnewsasia.com: India's Tata Motors invests in Myanmar).

Masih dari sumber yang sama, juru bicara Tata Motor mengatakan, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas 1.000

kendaraan per tahun, yang dapat diperluas menjadi 5.000 kendaraan. Tidak ada rincian keuangan yang diberikan, tetapi pabrik tersebut akan dibiayai oleh sebuah lini kredit dari pemerintah India. *"Ini adalah jalur kredit langsung dari pemerintah India kepada Pemerintah Myanmar,"* kata juru bicara tersebut.

Ringkasnya pertumbuhan ekonomi di India yang dibarengi dengan terbukanya tiga area peluang bisnis: perluasan pasar, kebutuhan bahan baku dan meningkatnya konsumsi energi mendorong para pelaku bisnis India terutama yang bergerak dalam sektor farmasi, energi serta aneka produk elektronik termasuk otomotif untuk berekpansi ke Myanmar. Sementara itu pemerintah yang di topang oleh kekuasaan INC di Parlemen memberikan fasilitas berupa infrastruktur baik yang berupa regulasi maupun infrastruktur fisik berupa jalur-jalur transportasi untuk mempermudah arus perdagangan kedua negara.

Hingga tahap ini maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan saling menguntungkan antara para pelaku bisnis dengan penguasa. Di satu sisi penguasa atau dalam hal ini adalah paratai INC mendapat legitimasi politik yang kuat, terutama dari para pelaku bisnis, di sisi lain para pelaku bisnis, terutama perusahaan-perusahaan energi dan farmasi diuntungkan dengan berbagai macam kemudahan untuk berekspansi ke Myanmar dan, pada perkembangannya, Indocina.

Opini publik di india terhadap isu HAM di Myanmar

Bangsa India sangat mengagumi ajaran leluhur mereka, Jawaherul Nehru dan Gandhi. Kedua tokoh India tersebut memiliki ajaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terutama Gandhi merupakan pribadi yang sangat disegani karena ajaran-ajarannya tentang Hak Asasi Manusia. Konteks nilai-nilai yang diyakini masyarakat India tersebut tak dapat disangkal membuat sebagian masyarakat di India

merospon dengan sangat keras terhadap aneka pelanggaran nilai-nilai HAM yang dilakukan Junta di Myanmar.

Pada tahun 1988 gerakan massa di Myanmar muncul sebagai akibat dari kepemimpinan rezim militer yang represif. Militer didominasi oleh suku Birma. Mereka mengelola negara dengan cara-cara anti kemanusiaan. Akibatnya gerakan massa mendapat respon yang sangat memilukan. Ratusan demonstran disembelih dan ribuan lainnya dimasukan ke dalam penjara (Renaud, 2003, 3).

Sikap anti Junta di India tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintahan India yang nampak dari dibekukannya hubungan kedua negara secara sepihak oleh India pada tahun 1988, namun masyarakat secara luas di India juga mengutuk aksi Junta tersebut. Hampir semua radio di India menyiarkan kebrutalan Militer Myanmar dan mengutuk aksi tersebut (Renaud, 2003, 3). Intensitas siaran radio di India dalam memberitakan perkembangan demi perkembangan situasi politik di Myanmar telah membentuk pandangan warga negara India terhadap Junta.

Publik memiliki penilaiannya sendiri terhadap isu krusial. Kendati standarisasi yang dipakai publik dalam memberikan penilaian tidak selamanya menggunakan barometer ilmiah, namun kebenaran versi publik memiliki otoritasnya sendiri. Andai saja presepsi publik bertentangan dengan presepsi elit di India maka itu sudah cukup untuk memaksa elit menuruti kemauan publik dalam sistem perpolitikan demokrasi. Warga negara bisa menghukum elit yang tidak sejalan dengan kemauan mereka dengan menarik kedukungan politiknya, padahal di India waktu itu presepsi publik sejalan dengan presepsi elit.

Di dalam negeri, publik di India mengutuk kekejaman Junta, sementara Duta Besar Malik merubah kantor perwakilan India di Myanmar sebagai rumah sakit sementara bagi para

demonstran yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan buka pintu pemerintah India bagi para pelarian politik dari Myanmar. Sinergitas antara presepsi publik dan elit India dalam merespon prilaku Junta menjadi basis yang kokoh bagi soliditas sikap India terhadap Junta. Kebijakan luar negeri India yang nampak dari aksi-aksi diplomatik dan opini publik di India kala itu benar-benar mencerminkan ideologi bangsa India yang idealis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Ganesan, 2005, 38).

Namun demikian, sinergitas kepentingan antara pemerintah dan publik di India tidak berlangsung lama, pasca merapatnya India ke Myanmar para elit di India tidak seidealis sebelumnya, porsi perhatian elit terhadap isu HAM di Myanmar mulai berkurang. Sikap publik terhadap pelanggaran HAM di Myanmar juga terfragmentasi ke dalam dua kelompok. ***Pertama***, para pelaku bisnis yang diuntungkan dengan mencairnya hubungan kedua negara; dan yang ***kedua*** kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hirauan terhadap HAM dan gerakan pro demokrasi di Myanmar. Namun nampaknya kelompok yang kedua tidak memiliki akses ke para pembuat kebijakan sekuat kelompok pertama.

Pengaruh gangguan kelompok separatisme di perbatasan India-Myanmar

Di daerah perbatasan India Myanmar terdapat banyak kelompok-kelompok separatis. Secara umum kepentingan mereka adalah memisahkan diri dari India. Keinginan tersebut muncul sebagai akibat kekecewaan mereka terhadap buruknya pemerataan pembangunan. Pembangunan di India hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu seperti New Delhi, sementara di daerah yang jauh dari pusat pembangunan terkesan diabaikan. Beberapa daerah tersebut berada di wilayah perbatasan India-Myanmar sepanjang 1643 km. Adapun daerah-

daerah dimaksud yaitu: Arunachal Prades, Manipur, Mizoram, dan Nagaland.

Di daerah-daerah itulah kelompok-kelompok separatis seperti *United Liberation Front of Asom, National Socialist Council of Nagaland (IM & K), People's Liberation Army of Manipur, Manipur People's Liberation Front* dan *Kuki National Army* berada (Renaud, 2003, 5). Gangguan keamanan di perbatasan India-Myanmar akibat keberadaan kelompok-kelompok separatis mengancam integrasi India. Keamanan teretorial menjadi kepentigan nasional kunci bagi setiap negara, apapun akan dilakukan negara bila keamanan teretorialnya terancam. Gerakan separatisme sangat merepotkan Pemerintah India yang harus mengelola daratan dengan luas hingga lebih dari 3,2 Juta km2 dan penduduk yang lebih dari 1.2 milyar.

Belum lagi ditambah perseteruan India dengan Myanmar tentu derajat kerepotan Pemerintah India akan bertambah, sehingga langkah paling rasional bagi Pemerintah India untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan di perbatasannya adalah dengan menjalin kerjasama dengan Junta di Myanmar. Pada tahun 1995 Pemerintah India melalui Departemen Keamanan India menyepakati kerjasama *Golden Bird* dengan Myanmar. Kerjasama militer tersebut dilakukan segera setelah untuk kali pertama India melalui J.N. Dixit (*Indian Foreign Secretary*) pada bulan Maret 1993 berkunjung ke Yangon dan menyepakati tidak akan turut campur ke dalam urusan internal Myanmar lagi.

Dalam konteks tersebut maka merapatnya Pemerintah India ke Myanmar merupakan pilihan tindakan paling aman dilakukan dalam rangka untuk membendung gerakan separatis di perbatasan timur laut India. Bila Pemerintah India tidak segera menjalin kerjasama keamanan dengan tetangga di sebelah timur lautnya, berarti Pemerintah India telah lepas kontrol terhadap aneka aktivitas gerakan separatis itu. Ingat,

pada tahun 1988 Pemerintah India pernah mengeluarkan kebijakan *buka pintu* bagi pelarian politik dari Myanmar ketika hubungan kedua negara sedang tidak harmonis.

Bila Pemerintah India tidak memperbaiki hubungannya dengan Myanmar maka bukan tidak mungkin gerakan separatis tersebut akan mendapat dukungan dari Junta, sebagai balasan negara tersebut atas kebijakan *buka pintu* India sebelumnya. Argumentasi ini sejalan dengan pendapat Ashraf (n.d.) dalam artikelnya *India-Myanmar Relations*.

C. Peta interaksi kepentingan para aktor

Sistem pemerintahan Parlementer di India memungkinkan perdebatan terkait kebijakan dilokalisir di tingkat Parlemen. Sementara Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri hanya mengimplementasikan apa yang telah diputuskan di dalam Parlemen. Hal ini disebabkan, karena Perdana Menteri berasal dari partai atau koalisi mayoritas di Parlemen maka kemungkinan perbedaan pandangan yang muncul diantara Parlemen dan Pemerintah sangat kecil, bila enggan untuk mengatakan tidak ada.

Pada saat pergeseran sikap India terhadap Myanmar terjadi, yakni ketika pada tahun 1993 J.N. Dixit (*India Foreign Secretary*) atas nama pemerintahan India menyatakan tidak akan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Myanmar, Parlemen di India di kuasai oleh INC yang artinya Perdana Menteri juga berasal dari Partai sama, yaitu Narashima Rao. INC sejatinya merupakan Partai dengan basis ideologi nasionalisme yang sangat kuat dengan preferensi kebijakan proteksionis, namun dalam perkembangannya krisis ekonomi yang melanda India pada tahun 1990[11] membuat strategi proteksionis INC

[11] Krisis ekonomi India kendati merupakan masalah di tingkat domestik namun sejatinya terjadi karena efek berantai dari sedikitnya 2

yang selama ini dijadikan *jurus andalan* tidak dapat diandalkan lagi. Dalam konteks ini INC tidak dapat terus mengandalkan strategi proteksionis. Di bawah manajer Menteri Keuangan Manmohan Singh India akhirnya harus menerima dana bantuan dari IMF dengan serangkaian syarat liberalisasi ekonominya.

Gagasan Manmohan Singh sebenarnya bukanlah gagasan populer di India, terutama di dalam Partai INC, namun keberhasilan transformasi ekonomi membuat kekuasaan INC mendapat legitimasi politik yang semakin kuat. Dalam tubuh INC sendiri yang memiliki basis ideologi nasionalisme dan preferensi kebijakan proteksionis, keberhasilan liberalisasi ekonomi India mendorong transformasi ideologi dan preferensi kebijakan partai ini menjadi condong ke liberal.

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan terbukanya 3 ranah peluang bisnis bagi para pelaku ekonomi di India yang membuat negeri ini pada perkembangannya harus merapatkan diri ke Myanmar, yaitu: perluasan ekspansi pasar ke Myanmar dan Indocina; meningkatnya kebutuhan energi; dan import aneka akar dan tumbuhan sebagai bahan baku produk obat-obatan dari Myanmar. Sejumlah perusahaan India yang bergerak dalam bidang elektronik, otomotif, farmasi hingga energi mendapat berkah dari merapatnya India ke Myanmar.

Sampai tahap ini dapat dibaca bahwa sedikitnya terdapat dua kelompok aktor yang ber *simbiosis mutualisme* dalam konteks mendekatnya India ke Myanmar, yaitu *pertama*, para penguasa yang diperankan partai INC termasuk Perdana Menteri Narashima Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh yang diuntungkan dengan menguatnya legitimasi politik terutama dari para pelaku bisnis; dan *kedua*, kelompok pebisnis

momen penting di tingkat internasional. *Pertama*, runtuhnya mitra dagang utama India, Uni Soviet pada tahun 1989; dan *kedua*, krisis teluk yang berakibat pada melambungnya harga minyak dunia, padahal India merupakan salah satu konsumen penting minyak dunia.

yang diuntungkan dengan serangkaian infrastruktur baik berupa jalur-jalur transportasi yang menghubungkan India-Myanmar-Indocina seperti *India-Myanmar Friendship Road*; *Trans Asia Highway*; dan *Trans Asia Railway* maupun berupa regulasi bisnis di Myanmar seperti yang nampak dari *Bilateral Investmen Promotion Agreement* (BIPA) untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih besar bagi para investor India di Myanmar maupun di Indocina.

Secara umum masyarakat India juga diuntungkan oleh perluasan ekonomi ke arah timur India tersebut. Perekonomian India memiliki *trend* pertumbuhan posistif, setidaknya sejak tahun 2003 dengan rata-rata pertumbuhan hingga 8% pertahun. Kendati demikian di dalam masyarakat India ada juga kelompok-kelompok yang anti Myanmar. Idealisme ajaran Gandhi dan Nehru yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan membuat mereka sangat membenci pemerintahan militer di Myanmar. Hampir semua radio di India menyiarkan kebrutalan Militer Myanmar dan mengutuk aksi tersebut (Renaud, 2003, 3). Sayangnya gerakan masyarakat anti Junta di India tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap Pemerintah India terhadap Myanmar terutama pasca 1993 ketika India mulai merapatkan diri ke Myanmar. Hemat penulis karena kelompok ini tidak memiliki jalur aspirasi yang kuat di Parlemen.

Di sisi lain kuatnya gerakan separatisme di perbatasan India-Myanmar, menurut penulis, menjadi alasan cukup meyakinkan bagi Pemerintah untuk mendekatkan diri ke Myanmar. Bersikap kritis kepada Myanmar hanya akan membuat Myanmar berkolaborasi dengan gerakan separatisme di perbatasan yang pada akhirnya hanya akan semakin mengacam integrasi India. Kebijakan *open door* India bagi para pelarian politik dari Myanmar pada tahun 1988 berpotensi mendorong Myanmar untuk membantu kelompok separatisme

di daerah-daerah seperti Arunachal Prades, Manipur, Mizoram, dan Nagaland. Dalam seting interaksi aktor semacam ini maka kepentingan para pebinis dan penguasa di India menempati porsi yang cukup besar di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar.

Ada beberapa catatan dalam upaya pemetaan kepentingan para aktor di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar. ***Pertama***, terdapat hubungan saling menguntungkan antara penguasa dengan pelaku bisnis. Di satu sisi penguasa mendapat legitimasi politik dari para pelaku bisnis di sisi sebaliknya para pelaku bisnis mendapat aneka fasilitas baik berupa infrastruktur maupun regulasi bisnis;

Kedua, Keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menguatkan legitimasi politik pemerintah. Merapatnya India ke Myanmar sulit disangkal memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi India. Dominasi wacana keberhasilan pembangunan di India nampaknya mampu mensubordinasikan isu HAM Myanmar di benak publik di India. Warga negara baik secara langsung maupun tidak mendapatkan manfaat dari relasi India-Myanmar yang semakin menguat dan menggerus perspektif kritis.

Ketiga, hubungan berpola konflik antara penguasa India dengan kelompok-kelompok separatisme di perbatasan India-Myanmar, mendorong penguasa untuk berdamai dengan Junta, bila tidak ingin kelompok-kelompok separatisme berkolaborasi dengan Junta;

Demikian seting interaksi antar aktor yang berada di balik pergeseran sikap India terhadap Myanmar. Kendati ada aktor-aktor yang berinteraksi secara langsung, seperti para pelaku bisnis dan penguasa namun ada juga yang tidak secara langsung berinteraksi. Untuk melengkapi analisis di tingkat domestik yang telah diuraikan dalam bab ini, bab berikutnya akan menganalisa faktor-faktor di tingkat internasional.

BAB 5
RESPON TERHADAP DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL

Selain dinamika politik di tingkat domestik Milner dan Oatley juga memberikan perhatian pada dinamika politik di tingkat internasional. Hubungan dinamis banyak variabel di tingkat domestik sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu tidak berada di dalam ruang vakum, melainkan berada di dalam ruang yang lebih luas yakni dinamika variabel di tingkat internasional. Terdapat banyak relasi di antara variabel yang berada di dua level yang berbeda itu. Krisis ekonomi yang akhirnya mendorong reformasi ekonomi di India misalnya disebabkan oleh sedikitnya dua faktor di tingkat internasional: *pertama*, runtuhnya mitra dagang terbesar India, Uni Soviet, yang berdampak pada banyaknya para pebisnis, eksportir maupun importir di India yang gulung tikar; dan *kedua*, krisis teluk yang memicu kelangkaan minyak.

Dalam konteks hubungan India-Myanmar pergeseran sikap India terhadap Myanmar tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di tingkat internasional. Sejumlah perubahan

penting seperti runtuhnya Uni Soviet, perdagangan India dengan Indocina serta pengaruh Cina dan Pakistan di Myanmar menjadi konteks penting di tingkat internasional yang di respon India dengan menggeser sikapnya dari konfrontatif menjadi kooperatif terhadap Myanmar.

Bagi India runtuhnya Uni Soviet merupakan pukulan telak perekonomiannya karena negeri komunis itu merupakan mitra dagang utama India dan pihak yang paling dirugikan adalah para pelaku bisnis.

A. Runtuhnya Uni Soviet

Apa akibat runtuhnya Uni Soviet bagi politik internasional dan secara lebih sepesifik—dalam konteks penelitian ini—bagi India? Di level internasional, Fisty Ichti Cahya (2007) menjawab, runtuhnya negara komunis terbesar itu kontan mengahiri perang dingin[12] dan liberalisme muncul sebagai ideologi dominan yang hingga manuskrip ini ditulis belum menemukan tandingannya.

[12] Perang dingin terjadi selama tahun 1945 hingga 1989. Berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945 melahirkan dua kekuatan utama di dunia. Amerika sebagai promotor ideologoi liberalisme dan Uni Soviet sebagai sebagai promotor komunisme. Masing-masing pihak menjadi kutub kekuatan yang ditandai dengan terfragmentasinya dunia ke dalam dua pengaruh utama tersebut. Secara lebih mudah perang dingin dapat dipahami sebagai "perang urat syaraf" yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet. Tidak terjadi konfrontasi senjata secara langsung antara kedua negara itu, namun perang-perang kecil yang merepresentasikan kedua kekuatan utama dunia itu terjadi di banyak negara. Tunjuk saja misalnya perang Korea dan Vietnam. Perang dingin berakhir pada tahun 1989 ketika Uni Soviet runtuh.

Mengapa Uni Soviet runtuh? dan Bagaimana ia runtuh? Fisty (2007) menunjukkan, sedikitnya ada 3 pendorong runtuhnya negeri komunis ini: (1) krisis (politik, ekonomi, sosial); (2) Glasnost dan Perestroika; dan (3) konflik etnis. Krisis politik di Uni Soviet disebabkan oleh Leninisme. Krisis ekonomi di Uni Soviet terjadi karena inefisiensi yang kronis dari sistem yang dikolektivasi, keborosan ekonomi, keterbelakangan teknologi dan sistem hegemoni. Sementara krisis sosial budaya di Uni Soviet terjadi karena adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet, rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet, serta tidak diperbolehkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah Uni Soviet.

Sementara Glasnost dan Perestroika yang dicanangkan oleh Gorbachev merupakan pemicu bagi meledaknya revolusi sosial di negara-negara Eropa Timur. Glasnost dan Perestroika membuat dunia komunis meragukan sistem sosial-komunis

Hemat penulis yang terpenting dari momentum runtuhnya Uni Soviet dalam konteks memahami prilaku India adalah perubahan konstalasi politik internasional yang terjadi akibat runtuhnya negara komunis itu. Secara lebih sepesifik perubahan struktur bipolar menjadi unipolar di mana Amerika menjadi poros utama mempengaruhi prilaku negara-negara lain di dunia, termasuk India.

Untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet—sebelum kehancurannya—India harus mengorbankan hubungannya dengan Asia Tenggara terutama dua negara intinya Indonesia dan Malaysia. Pemberontakan komunis di dua negara yang disebut terakhir tersebut telah mempengaruhi presepsi buruk dua negara pendiri ASEAN itu terhadap Uni Soviet. Bila temannya musuh adalah musuh maka India yang berkawan dengan Soviet juga diposisikan musuh oleh Indonesia dan Malaysia.

Pada perkembangannya, runtuhnya mitra dagang utama India—Uni Soviet—telah memukul telak dunia bisnis di India. Banyak eksportir maupun importir India yang jatuh bangkrut. Relasi-relasi bisnis yang terjadi di antara India dan Uni Soviet kontan terputus, dan dalam waktu singkat membawa efek bombastis bagi perekonomian domestik India. India pun jatuh krisis. Keadaan ini diperparah dengan krisis teluk di Timur Tengah yang memicu melambungnya harga minyak.

---

mereka untuk dapat tetap menjawab tantangan zaman. Di sisi lain konflik etnis di Uni Soviet tumbuh dari kesadaran akan eksistensi kelompok. Gorbachev terlambat dalam menyadari pentingnya permasalahan etnis, sehingga sudah telanjur banyak terjadi kerusuhan, demonstrasi dan protes dari etnis-etnis di beberapa tempat di Uni Soviet yang terjadi secara berturut-turut, namun sporadis.

Bagaimana uni Soviet Runtuh? Runtuhnya Uni Soviet terjadi setelah satu persatu republik-republik di Uni Soviet melepaskan diri dari Uni Soviet. Banyak cara telah dilakukan Gorbachev untuk mencegah disintegrasi Uni Soviet, namun gagal. Pemerintah Uni Soviet berakhir ditandai dengan pengunduran diri Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev pada tanggal 25 Desember 1991 dan pembentukan CIS oleh pemimpin Rusia, Boris Yeltsin.

Situasi ini kemudian mendorong dunia bisnis India untuk mencari alternatif pengganti Uni Soviet sebagai *partner* dagang. Indocina, nampaknya menjadi alternatif pilihan. Dipilihnya daratan di sisi timur India tersebut cukup beralasan, tidak hanya karena pertumbuhan perekonomian yang menggairahkan, di bawah pimpinan Vietnam yang melaju cepat, namun juga karena persaingannya yang masih relatif longgar, bila dibandingkan dengan Eropa yang sangat ketat, maupun Timur Tengah yang penuh konflik.

Seting baru struktur internasional pasca perang dingin pada akhirnya mendorong India untuk mereposisi Politik Luar Negerinya kepada negara-negara di sisi timurnya dengan merilis *kebijakan melihat ke timur* (*look east policy*)[13] pada tahun 1992.

[13] *Look east policy* atau kebijakan melihat ke Timur dirilis India kali pertama pada tahun 1992 atau tiga tahun setelah mitra dagang utama India, Uni Soviet hancur. Mansur (2008, 79-100) menjelaskan secara operasional *look east policy* diimplementasikan India dengan melakukan kerjasama baik di tingkat regional yakni dengan ASEAN maupun di tingkat nasional yakni dengan negara-negara anggota ASEAN secara bilateral.

Di tingkat regional pada tahun 1992 India mendaftarkan diri sebagai mitra dialog ASEAN. Kemudian pada tahun 1995 India memperkuat kemitraan tersebut menjadi mitra dialog penuh ASEAN dan lebih jauh menjadi anggota *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada tahun 1996. Tidak puas dengan hanya menjadi anggota ARF, India melangkah pada tahap yang lebih maju yakni meng-institusionalisasi hubungannya dengan ASEAN, kali ini bersama ASEAN India mengadakan *India-ASEAN summit* pada 5 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Hingga tahun 2007 *India-ASEAN summit* sudah dilaksanakan lima kali. Rangkaian kesepakatan tersebut berada dalam sebuah kerangka kerjasama komperhensif (*Framework Agreement on comprehensive economic cooperation between ASEAN and India*) yang ditandatangani oleh Atal Bihari Vajpayee (Perdana Menteri India) dengan para pemimipin ASEAN pada tahun 2003.

Untuk meningkatkan dinamika hubungan di antara India dan ASEAN telah disepakati pula *India-ASEAN Business Summit* dalam rangka meningkatkan dialog di antara para pembuat kebijakan dengan para pebisnis. Kegiatan ini untuk kali pertama dilaksanakan pada tahun 2002 di New Delhi. Kebijakan melihat ke Timur semakin dimantapkan dengan *Mekong-Gangga Cooperation Initiative* (MGCI) dan *Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC).

Pertama MGCI, dibentuk pada tanggal 10 November 2000 di Vientiane, Laos. Untuk menunjang perdagangan dan investasi di negara MGCI ada 4 sektor yang menjadi cakupan kerjasama ini, yaitu: turisme; kebudayaan; pendidikan dan transportasi; dan komunikasi. MGCI sejatinya merupakan upaya untuk memperdalam

Yang terpenting dari *kebijakan melihat ke Timur* dalam konteks memahami pergeseran sikap India kepada Myanmar adalah bahwa kebijakan tersebut dirilis India pada tahun 1992, sekitar satu tahun setelah pengunduran diri Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev pada tanggal 25 Desember 1991 serta pembentukan CIS oleh pemimpin Rusia, Boris Yeltsin; dan sekitar satu tahun sebelum India melalui J.N. Dixit (*Indian Foreign Secretary*) sepakat untuk tidak turut campur ke dalam urusan internal Myanmar pada bulan Maret 1993.

Hemat penulis, mendekatnya India ke Myanmar sejatinya merupakan "potongan pazel" dari sebuah sekema besar *look east policy*. Secara operasional India akan kesulitan mengimplementasikan kebijakan tersebut tanpa memiliki hubungan erat dengan Myanmar.

---

kerjasama India-ASEAN, terutama negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) ditambah Thailand.

Kedua, BIMSTEC. Kerjasama ini sebelumnya bernama BIST-EC (*Bangladesh, India, Sri Langka, Thailand Economic Cooperation*) yang didirikan pada 6 Juni 1997. Menariknya Myanmar yang secara geografis justru berbatasan secara darat dengan India baru bergabung setengah tahun kemudian yakni pada Desember 1997. Dengan masuknya Myanmar, nama kerjasama regional tersebut diubah menjadi *Bangladesh, India, Sri Langka, Myanmar, Thailand Economic Cooperation* (BIMST-EC). Kemudian pada tahun 2003 Bhutan dan Nepal ikut bergabung, barulah nama kerjasama itu diubah menjadi BIMSTEC. Sedikitnya terdapat 13 sektor yang tercakup dalam kerjasama BIMSTEC, yaitu: (1) *Trade and Investment* yang dipimpin oleh Bangladesh; (2) *Technology* oleh Sri Langka; (3) *Energy*; (4) *Agricultural* yang dipimpin Myanmar; (5) *Transportation and Communication*; (6) *Tourism*; (7) *Environment and Disaster Management*; (8) *Counter Terrorism* yang dipimpin oleh India; (9) *Fisheries*; (10) *Public Health*; (11) *People to People Contact* yang dipimpin oleh Thailand; (12) *Cultural Cooperation* oleh Bhutan; dan (13) *Poverty Alleviation* yang dipimpin oleh Nepal. Sementara di tingkat bilateral India menjalin kerjasama dengan masing-masing negara anggota ASEAN.

Demikian serangkaian kerjasama yang terjadi di antara India-ASEAN yang digerakan tidak hanya oleh para elit politik, namun juga oleh partisipasi sangat aktif para pelaku bisnis dalam kerangka besar kebijakan melihat ke timur telah membawa India lebih condong ke sisi timurnya dari pada di masa-masa sebelumnya ketika Uni Soviet belum hancur.

B. Perdagangan dengan Indocina (Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand)

Sejalan dengan upayanya mencari pengganti Uni Soviet sebagai mitra dagang, India secara konsisten—setelah mendeklarasikan *look east policy*—memulai untuk membangun relasi-relasi bisnis, baik dengan Indocina, maupun Myanmar. Secara geografis Myanmar terletak di sebelah timur laut India dan menghubungkan India dengan Laos, Kamboja, Vietnam dan Thailand. Myanmar dengan luas daratan 261, 970 mil atau 678.500 km2, berbatasan secara langsung dengan Thailand dan Laos. Bersama Thailand, Myanmar berbagi batas sepanjang 1.314 mil, sementara dengan Laos memiliki perbatasan darat sepanjang 125 mil (Steinberg, D. I., 2010, xxvi). Dan yang menarik lagi, Laos berbatasan secara darat dengan Vietnam sedangkan Thailand dengan Kamboja. Apa maknanya bagi India?

Myanmar menjadi jembatan darat (atau *Bridge Land*, meminjam istilah Raja Mohan, 2010, 1) bagi perdagangan India dengan Indocina. Berbagai produk para pengusaha India dapat mencapai pasar di Indocina tanpa melalui Selat Malaka.

Pertama, Myanmar menjadi jembatan darat (atau *Bridge Land*, meminjam istilah Raja Mohan, 2010, 1) bagi perdagangan India dengan Indocina. Berbagai produk para pengusaha India dapat mencapai pasar di Indocina tanpa melalui Selat Malaka. Jalur darat Myanmar lebih efesien dan efektif untuk rute perdagangan para pebisnis India dengan pasar mereka di daratan tersebut. Asumsi ini menjadi meyakinkan, mengingat sejumlah fakta berikut:

(1) Indocina menjadi sasaran paling favorit bagi para investor dari India di ASEAN, terutama setelah tahun 2007. Para investor menggarap sektor publik maupun privat di daratan ini. di Vietnam misalnya, melalui *Oil and Natural Gas Corporation*

(Videsh) Ltd (OVL); Essar; dan *Tata Steel* total investasi India di negeri komunis itu menempati peringkat terbesar ke 6 di tahun 2007 (naik 22 peringkat dari tahun sebelumnya) dengan nilai total investasi sebesar US$ 6 juta milyar, atau terbesar di ASEAN (Shekar, 2008);

(2) baik India maupun maupun Indocina mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat (lihat grafik 10 pertumbuhan ekonomi Indocina). Indocina yang terdiri dari negara *late comers* tak ayal menjadi sasaran FDI global. Seting pertumbuhan ekonomi di Indocina tak pelak menarik perhatian para investor India sehingga sejumlah proyek jalur transportasi pun digarap.

Grafik 10
Pertumbuhan ekonomi Indocina
(Thailand, Vietnam, Laos dan Kamboja)

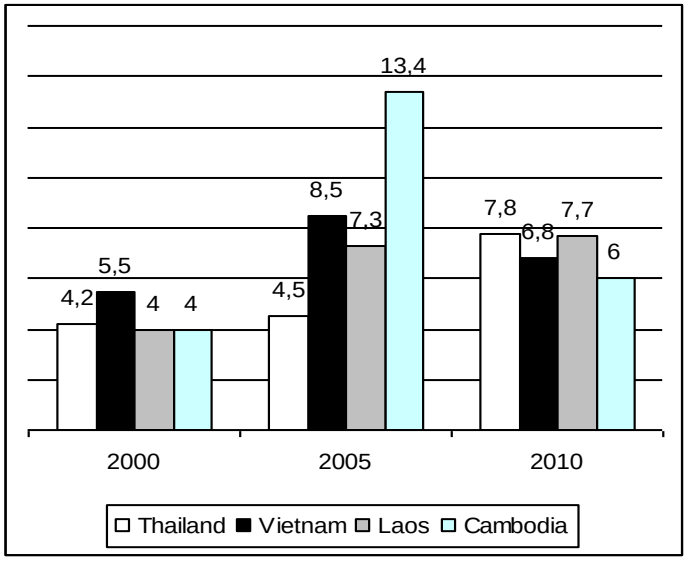

Sumber: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=th&v=66
data dimodivikasi oleh penulis.

Dalam hal ini sedikitnya terdapat 4 proyek penting jalur transportasi: (a) proyek pembangunan jalan persahabatan India-Myanmar (*India-Myanmar Friendship Road*) sepanjang 160 km antara Tamu dengan Kalemyo yang diresmikan pada Februari 2001; (b) proyek pembuatan *Trans Asia Highway* untuk meningkatkan hubungan ekonomi India-Myanmar yang diresmikan pada April 2002; (c), *Trans Asia Railway* yang direncanakan akan menghubungkan 28 negara (*the Hindu*, 1 Juli 2007 dalam Yhome, 2009, 14) termasuk India, Myanmar dan Indocina. Rencana, rute akan masuk India melalui Tamu, perbatasan Myanmar. Proyek tersebut akan menguatkan mobilitas ekonomi India dengan negara-negara di Indocina; dan (d) proyek jalan raya *(trial highway project)* sepanjang 1.360 km dalam kerangka kerjasama multilateral BIMSTEC dan *Mekong Gangga Cooperation* (MGC) yang menghubungkan India,

Myanmar dan Thailand. Pada tahun 2007, tahap pertama proyek ini telah selesai 18 km, menghubungkan Myawaddy, jajaran pegunungan Taninthrayi. Rencana jalur jalan raya besar itu akan melalui Moreh (India), Tamu, Bagan Myawaddy (Myanmar), Mae Sot (Thailand) (Yhome, 2009, 13).

Kedua, Terbukanya jalur-jalur darat tersebut membuat para pebisnis India memiliki akses menuju ratusan juta masyarakat di keempat negara itu yang berarti membawa sedkitnya dua implikasi: konsumen bagi aneka produk India dan buruh murah. Jalur darat Myanmar akan memangkas harga produk-produk India sehingga relatif lebih bisa bersaing dengan aneka produk dari Cina. Argumentasi ini paralel dengan kerjasama *Mekong Gangga Cooperation* yang mengikat kelima negara tersebut dalam radius pengaruh ekonomi India.

Grafik 11
Perbandingan *trend* perdagangan
India-Indocina dengan India-Myanmar 1997-2011
(dalam juta dolar)

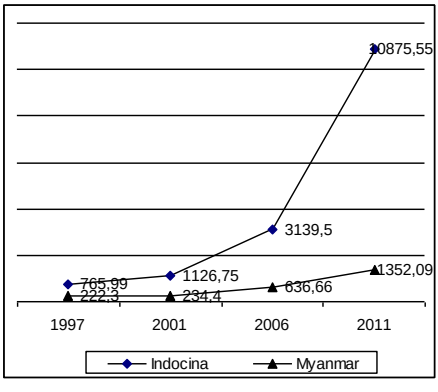

Sumber: *Export Import Data Bank, Department of Commerce , Ministry of Commerce and Industry, Government of India official,* data diolah penulis sesuai kebutuhan.
website: commerce.nic.in/eidb/default.asp

Trend perdagangan India-Indocina, sebagaimana terlihat dalam grafik di atas, mulai meroket sekitar tahun 2002 atau bertepatan dengan dibukanya kembali kantor perwakilan India di Myanmar (2002). Ini maknanya ada korelasi positif antara

mencairnya hubungan India-Myanmar dengan pertumbuhan perdagangan India-Indocina.

Peluang yang terbuka bagi para pengusaha India yang disebabkan oleh mencairnya hubungan kedua negara, telah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku bisnis. Tunjuk saja misalnya, dari target perdagangan kedua pemerintah senilai US$ 1 milyar pada tahun 2006/7, *The Indian Commerce Ministry* sebagaimana dikutip Yhome (2009, 5) melaporkan capaian perdagangan di tahun tersebut hingga US$ 921,87 juta, atau kurang sedikit menyentuh target. Optimisme para pelaku bisnis India untuk berekspansi ke Indocina nampak dari *trend* positif perdagangan India dengan daratan tersebut terutama setelah tahun 2002.

C. Upaya India mengurangi pengaruh Cina dan Pakistan di Myanmar

Argumentasi pada bagian ini dibangun di atas asumsi bahwa: baik Cina maupun Pakistan keduanya memiliki relasi harmonis dengan Myanmar. Di sisi lain keduanya juga memiliki relasi buruk dengan India. Bagi India merapatnya Cina dan Pakistan ke Myanmar akan semakin mengucilkan India, sehingga langkah paling rasional bagi India adalah ikut mendekat ke Myanmar untuk mengurangi pengaruh Cina dan Paistan di Myanmar.

Pertama, dalam perspektif Cina, Myanmar merupakan rute terpendek yang menghubungkannya dengan Samudera India bagian utara. Dari pada melalui jalur laut dengan aneka konsekuensi biaya ekonominya yang tinggi maka hubungan baik dengan Myanmar bagi Cina akan memangkas biaya tinggi jalur perdagangannya dengan Timur Tengah.

Cina telah menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan Myanmar untuk eksploitasi cadangan hidrokarbon dan transportasi minyak melalui jalur darat dengan menggunakan

pipa sepanjang 1.100 km dari pelabuhan Kyaukryu, Myanmar hingga perbatasan kota Ruili di Yunan, Cina. Jaringan pipa minyak dan gas tersebut membuat Cina menjadi tidak lagi bergantung pada Selat Malaka (Kanwal, Gurmeet, 2010).

Kedua, Bagi Pakistan, Myanmar adalah mitra yang sangat baik. Pada tahun 1989 ketika kebijakan India pada Myanmar masih berada dalam masa konfrontatif, Pakistan—sebagaimana dilaporkan William Ashton (2009)—telah mendekati Myanmar. Seorang pejabat senior dari perusahaan senjata pemerintah Pakistan telah berkunjung ke Yangon dan menawarkan kepada SLORC peralatan perang. Peristiwa tersebut diikuti dengan kunjungan sekelompok perwira *Tadmadaw* senior di bawah pimpinan Jenderal Tin Tun ke Pakistan dua bulan kemudian. Masih menurut William Ashton: Bertil Lintner melaporkan kesepakatan segera dicapai dengan Pakistan untuk menjual 150 senapan mesin; 50.000 butir amunisi; dan 5.000 bom mortir 120mm kepada SLORC.

Hubungan saling menguntungkan antara kedua negara tak ayal berpengaruh pada kesinambungan hubungan kedua negara. Di satu sisi Myanmar telah memberikan informasi intelejen kepada Pakistan terkait dengan perkembangan di Bangladesh, di sisi lain, sebagai balasan, Pakistan membatu menangkis kritik yang ditujukan kepada Myanmar di forum multilateral seperti PBB.

Contoh bentuk balas budi Pakistan kepada Myanmar yang dapat ditunjuk adalah selama akhir tahun 1980 an bersama Cina, Pakistan menentang resolusi yang ditujukan kepada Myanmar di Komisi HAM PBB. Di tingkat regional Timur Tengah, Pakistan juga dapat membantu melindungi kepentingan Myanmar dengan negara-negara Islam, yang telah mengungkapkan keprihatinan tentang pengobatan Muslim di Myanmar, termasuk nasib Rohingya di negara bagian Arakan.

Manfaat praktis terpenting yang timbul dari hubungan Myanmar-Pakistan bagi rezim militer di Myanmar adalah mereka memiliki pemasok amunisi dan suku cadang untuk persediaan persenjataan mereka. Kedua negara sangat bergantung pada senjata dan peralatan teknologi militer Cina bahkan ada juga senapan otomatis yang berasal dari Jerman, sementara senapan mesin ringan dan amunisi diproduksi di tingkat lokal (Ashton, William: 2009).

Ketiga, di Mata India: Cina dan Pakistan memiliki hubungan sejarah yang kurang harmonis dengan negara demokrasi terbesar ini. Dengan Cina, India memiliki relasi kurang harmonis: (1) faktor sejarah. India memiliki masalah perbatasan dengan Cina di daerah Arunachal Prades disebabkan perbedaan perspektif terhadap tapal batas Mc Mahon yang dibuat Inggris pada tahun 1913. Konflik perbatasan tersebut memang telah diupayakan jalan damai melalui jalur diplomasi, namun masalah itu masih sangat berpotensi muncul kembali di masa depan. (2) baik India maupun Cina diprediksi menjadi kekuatan ekonomi raksasa di masa depan. Jim O'Neill (*Chairman, Goldman Sachs Asset Management*) meramalkan India dan Cina—disamping Brasil dan Rusia yang kemudian dikenal dengan singkatan BRIC—akan menjadi kekuatan vital ekonomi dunia. Secara lebih sepesifik Jim O'Neill menulis:

> *The economic might of many of the Growth Market countries—certainly the four BRICs (Brazil, Russia, India and China)—is so vital to the world economy that people have to start thinking about just how much the world is changing, and what a better place it is as a result of it.* (*Goldman Sachs: Introducing "The Growth Map"*)

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang terjadi di kedua negara tersebut sedikitnya membawa tiga implikasi: ekspansi pasar; meningkatnya sumber konsumsi energi; dan meningkatnya kebutuhan bahan baku (lihat penjelasan pada bab

sebelumnya). Seting itulah yang menciptakan relasi persaingan kedua negara terutama di Myanmar dan umumnya Indocina.

Secara lebih rinci rivalitas India-Cina di Myanmar nampak dari: ***pertama*** perdagangan. Kendati perdagangan India dengan Myanmar tidak seagresif perdagangan Cina dengan negeri Junta itu, namun *trend* perdagangan India-Myanmar melaju cukup tajam. Persaingan sengit perdagangan kedua negara nampak dari pola perdagangan kedua negara dengan Myanmar, sebagaimana nampak dalam grafik berikut.

Grafik 12
***Trend* perdagangan India dan Cina dengan Myanmar**

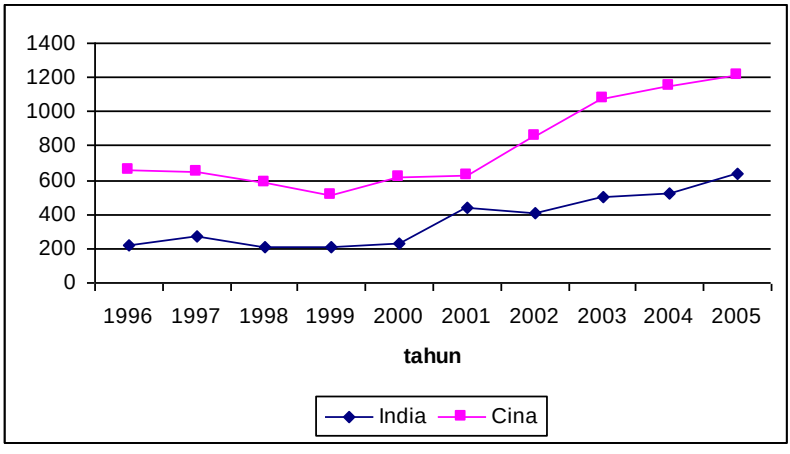

Sumber: *Export Import Data Bank, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India official*, website: commerce.nic.in/eidb/default.asp
data telah diolah penulis sesuai dengan kebutuhan, data Cina diperoleh dari *China Statistical Year Book* dalam Myoe (2007), hal: 6.

Kedua, rivalitas kedua negara juga nampak dari keberadaan perusahaan-perusahaan energi India dan Cina di Myanmar. Sebagai negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, India dan Cina memiliki produktivitas ekonomi yang tinggi pula, sehingga konsekuensinya adalah kedua negara tersebut tidak bisa lebas dari upayanya untuk selalu mencari sumber energi baru.

Tabel 10
Investasi India dalam sektor energi di Myanmar

No	Company	Blocks (offshore)	Total
1	ONGC Videsh Ltd	AD-2, AD-3, AD-9 (100% stake); A-1 dan A-3 (20%)	5
2	GAIL	A-1 dan A-3 (10%)	2
3	Essar Oil Ltd	A-2 and block L	2

Sumber: Yhome, 2009, 9

Tabel 11
Investasi Cina dalam sector energi di Myanmar

No	Company	Blocks (offshore)	Total
1	CNOOC	A-4, M-2, M-10, PSC-M, PSC-C1, PSC-C2	6
2	SINOPEC	PSC-D	1
3	CNPC	IOR-3, RSF-2, RSF-3, IOR-4, AD-1, AD-6, AD-8	7

Sumber: Myoe, 2007, 16

Sementara dengan Pakistan India memiliki kenangan sejarah yang sangat buruk. Selama berpuluh tahun India telah berkonflik dengan Pakistan terutama terkait dengan masalah Kasmir. Bukan di sini temptnya menguraikan konflik India-Pakistan.

Ringkasnya, bila Cina dan Pakistan berhubungan harmonis dengan Myanmar, sementara di sisi lain kedua negara berkonflik dengan India, maka mendekatnya kedua negara itu ke Myanmar sangat wajar bila menarik perhatian India dan mendorong negeri ini untuk merapatkan diri ke Myanmar dalam rangka untuk mengurangi pengaruh Cina dan Pakistan di negeri Junta itu.

Tabel 12
Siapa yang diuntungkan dan dirugikan
dalam pergeseran sikap India terhadap Myanmar?

Diuntungkan	Dirugikan
INC, Narashima Rao, Manmohan Singh: *mendapat legitimasi politik dari para pelaku bisnis.*	Gerakan demokratisasi di Myanmar dan HAM: *melemah.*
Pebisnis di sektor energi, farmasi, aneka barang-barang elektronik dan otomotif: *dimudahkan oleh infrastruktur berupa regulasi maupun infrastruktur fisik berupa jalur perdagangan menuju Myanmar dan Indocina.*	Masyarakat di Myanmar: *Junta semakin kuat, kemungkinan tindakan represif meningkat.*
Masyarakat di India: *pertumbuhan ekonomi India secara umum.*	Kelompok separatisme di pebatasan: *hadirnya ancaman dari operasi militer gabungan India-Myanmar, Golden Bird.*
Pemerintahan militer di Myanmar: *embargo barat tidak efektif, basis ekonomi menguat.*	Cina dan Pakistan: *seiring dengan menguatnya pengaruh India di Myanmar, pengaruh kedua negara ini berkurang .*

Tabel 13
Peta pengaruh aktor/ peristiwa/ konteks di berbagai tingkat terhadap pergeseran sikap India terhadap Myanmar

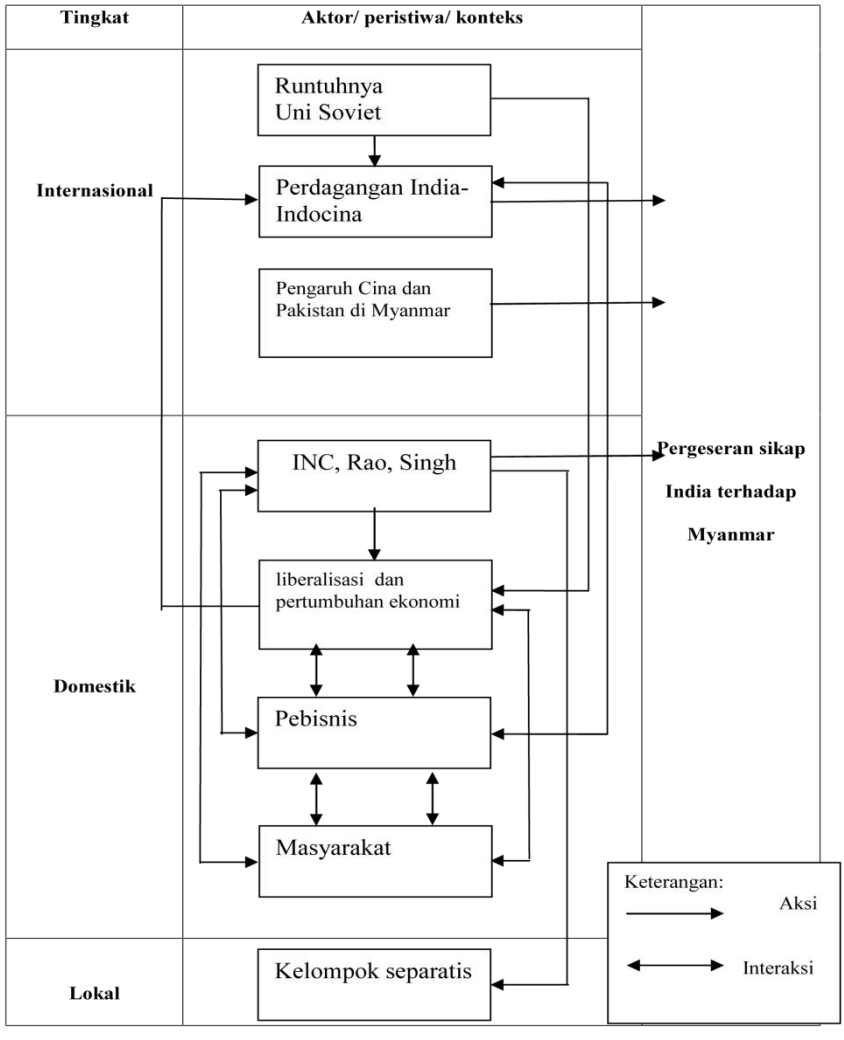

BAB 6
MEMBACA MASA DEPAN SIKAP INDIA TERHADAP MYANMAR

Pemilu November 2010 yang melahirkan pemerintah sipil di Myanmar menjadi titik penting bagi perkembangan sikap India terhadap Myanmar selanjutnya. Banyak pihak menyangsikan kesunguhan Junta dalam menyelenggarakan pemilu tersebut yang implikasinya berarti juga penyangsian pemerintah sipil baru hasil pemilu yang dianggap hanya sebagai kedok Junta untuk mengurangi tekanan asing. Prasangka buruk publik internasional bukan tanpa alasan. Selain rekam jejak pelanggaran HAM Junta yang sangat memprihatinkan, dominasi militer di legislatif pasca pemilu tersebut menjadi bukti ketidak seriusan Junta untuk membangun demokrasi di Myanmar.

Apapun motif Junta di balik penyelenggaraan pemilu tersebut, faktanya adalah Myanmar sekarang berada di bawah pemerintah sipil atau tepatnya kepala negara yang berlatar belakang non militer, yakni Tein Sein. ***Apa implikasi pergantian kekuasaan di Myanmar dari rezim militer ke pemerintahan sipil terhadap sikap India pada Myanmar?***

Pertama, bagi India yang selama ini menuai kritik karena agresifitasnya untuk merapatkan diri kepada Junta, maka progresifitas demokrasi di Myanmar membuat upaya India tersebut menjadi terlegitimasi secara moral. Hambatan moral sebagai negara demokrasi yang bersekongkol dengan Junta militer pelanggar HAM kini sirna. Sekarang era Myanmar baru yang ditandai dengan lahirnya pemerintahan sipil dan diperbolehkannya Aung San Suu Kyi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif bahkan terpilih sebagai anggota legislatif. Konteks sosial politik di tingkat domestik di Myanmar nampaknya membuat India semakin agresif. Dan dapat dipastikan India akan semakin mengintegrasikan perekonomiannya ke sisi Timur. Bagi India, Myanmar adalah jalur darat terdekat yang menghubungkannya dengan pasar raya Indocina;

Kedua, diplomasi yang dilakukan Aung San Suu Kyi—pasca terpilihnya beliau sebagai anggota legislatif—terutama ke negara-negara Eropa untuk menguatkan demokratisasi di Myanmar dan mengundang investasi ke negara tersebut, nampaknya akan menghadapkan India pada dua situasi: [1] India akan lebih mudah memperdalam relasi-relasi bisnisnya dengan Myanmar, karena perubahan rezim dibarengi dengan transparasi dan kemudahan iklim bisnis, namun di saat yang bersamaan [2] kehadiran banyak pemain ekonomi dari Eropa di Mynmar akan membuat India harus bekerja keras untuk dapat bertahan dan berkembang dalam bisnis di Myanmar dan Indocina.

Ketiga, pertemuan para pebisnis India dengan terutama para pebisnis Cina di Myanmar, akan menciptakan persaingan bisnis yang sangat ketat di Mynamar. Myanmar akan menjadi tempat yang sangat dinamis secara ekonomi, sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Myanmar dan pada level regional Asia. Semakin eratnya "dekapan" India terhadap

Myanmar akan membawa implikasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan. Tali-temali ekonomi yang terjalin semakin erat di antara para pelaku bisnis India-Cina di Myanmar akan berimplikasi pada;

Keempat, menguatnya interdependensi ekonomi Myanmar dengan India dan negara-negara lain akan diikuti dengan semakin kuatnya komitmen dan tanggung jawab pemerintah Myanmar untuk menciptakan stabilitas, keamanan dan kenyamanan bagi para investor, sehingga di masa depan isu pembangunan ekonomi akan lebih mewarnai hubungan India-Myanmar ketimbang di masa-masa sebelumnya.

BAB 7
PENUTUP

Terdapat aktor, peristiwa dan konteks yang sangat majemuk baik di tingkat domestik maupun internasional yang mempengaruhi pergeseran sikap India terhadap Myanmar. Memposisikan secara eksklusif aktor tertentu, semisal negara seperti yang dilakukan para teoritisi realis alih-alih dapat mengungkap banyak informasi justru seringkali sebaliknya, menyembunyikan banyak fakta penting. Baik Oatley maupun Milner sama baiknya dalam memberikan perspektif alternatif terhadap paradigma dominan tersebut. Aktor-aktor non negara sangat perlu diberi porsi perhatian yang proporsional dalam pekerjaan analisa. Berpijak pada perspektif anti *state centric* ini gambar yang lebih komperhensif dari realitas dapat tertangkap jauh lebih detail. Dengan tidak mengecilkan peran negara sejumlah catatan berikut penulis intisarikan dari riset sederhana ini.

Pertama, pertumbuhan ekonomi India dibarengi dengan: (1) meningkatnya relasi ekonomi di antara para pelaku bisnis di India, Myanmar dan Indocina; dan (2) semakin abainya negeri ini terhadap aneka permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Myanmar. Bila dulu India sangat keras

terhadap Myanmar karena aneka pelanggaran HAM yang dilakukan junta militer terhadap para demonstran dalam aksi di tahun 1988, maka sejak tahun 1993 hingga 2011, sikap India justru semakin lunak bahkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia India telah melakukan banyak sekali kerjasama dengan negara otoriter militeristik itu. Dengan kalimat yang berbeda bisa dikatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi di India dibarengi dengan semakin abainya negara ini terhadap penegakan HAM di Myanmar.

Kedua, mendekatnya India ke Myanmar juga dibarengi dengan kemajuan demokrasi di Myanmar. Indikator yang menunjukkan kemajuan demokrasi di negeri itu di antaranya adalah: (1) munculnya pemerintahan sipil baru di Myanmar; dan (2) diizikannya Aung San Suu Kyi (tokoh demokrasi yang paling ditakuti Junta) untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan 1 April 2012. Suu Kyi mencalonkan diri sebagai anggota Parlemen dari daerah pemilihan Kawhmu, barat daya Rangoon, dan memenangkannya;

Ketiga, merapatnya India ke Myanmar menjadi tonggak penting bagi pertumbuhan perekonomian setidaknya di Indocina, bila bukan di Asia tenggara. Perdagangan India-Indocina tumbuh terutama seiring dengan mencairnya hubungan india-Myanmar. Bila sebelumnya produk-produk Cina mendominasi pasar Indocina, maka kehadiran India menjadi pengimbang bagi dominasi Cina itu. Sementara bagi Indocina, maka kehadiran India yang lebih intens akan membuat negara-negara di daratan tersebut berkurang ketergantungannya terhadap Cina.

Keempat, bagi ASEAN berkurangnya sanksi-sanksi dari Barat kepada Junta sebagai akibat dari kemajuan demokrasi di Myanmar menjadi indikasi betapa Myanmar akan berperan penting dalam dinamika perekonomian di Indocina bahkan Asia Tenggara mengingat Myanmar menjadi penghubung tiga

kekuatan besar Asia: India, Cina dan Indocina untuk tidak menyebut ASEAN.

Demikian empat catatan tersebut mengakhiri laporan riset ini. Penulis berharap riset ini akan bermanfaat bagi: ***pertama*** para peneliti khususnya yang akan mempelajari hubungan India-Myanmar lebih lanjut. Temuan-temuan dalam riset ini bisa menjadi pintu masuk untuk menguak pola-pola baru yang belum terungkap dalam riset penulis.

Kedua, bagi para pembuat kebijakan, pengetahuan yang dihasilkan riset ini setidaknya dapat menjadi peta, kendati sangat sederhana, untuk menjadi acuan dalam membuat kebijakan. Selanjutnya tegur sapa berupa saran dan kritik konstruktif selalu penulis tunggu demi mendapatkan pengetahuan baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

BIBLIOGRAPHY

Ashraf, F (n.d.). *India-Myanmar Relations*. http://www.issi.org.pk/publication-files/1303370395_33739096.pdf, diakses 18 Oktober 2011.

Ashton, William. 2009. *Pakistan Myanmar Relations: Past, Present & Future.* http://rupeenews.com/2009/03/pakistan-myanmar-relations-past-present-future/, diakses Selasa 18 Oktober 2011.

AS kurangi sanksi untuk Burma, (7 Februari 2012). http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/02/120207_asburma.shtml, diakses 23 Februari 2012.

Australia Kurangi Sanksi untuk Myanmar, (9 Januari 2012). http://www.tempo.co/read/news/2012/01/09/120376215/Australia-Kurangi-Sanksi-untuk-Myanmar, diakses 23 Februari 2012.

Busyet! Penduduk India sudah 1,2 Miliar, (Jumat, 1 April 2011). http://www.suarapembaruan.com/home/busyet-penduduk-india-sudah-12-miliar/5170, diakses 14 Maret 2012.

Bhattacharya, Rakhee (2010). "Does Economic Cooperation Improve Security Situation: The Case of India-Myanmar

Relations". *Asia-Pacific Journal of Social Sciences*. Special Issue No.1.

Bose, Srinjoy (2007). "Energy Politics India-Bangladesh-Myanmar Relations". *IPCS.* Special Report. No 45.

Cahya, Fisty Ichti. 2007. *Runtuhnya Uni Soviet dan pengaruhnya terhadap eksistensi sosialisme komunisme* (Skripsi) Fak. KIP. USM.

Cipto, B. (2006). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

International IDEA. (2001). *Challenges to Democratizaton in Burma, Perspectives on multilateral and bilateral responses*. http://www.idea.int/asia_pacific/burma/upload/challenges_to_democratization_in_burma.pdf, diakses pada 10 April 2012.

Country Report Myanmar/ Burma. (2011). Economist Intelligence Unit 26 Red Lion Square London WC1R 4HQ United Kingdom.

Country Analysis Briefs Header. (21 November 2011). *India.* http://www.eia.gov/cabs/india/Full.html, diakses pada 10 April 2012.

Degnbol, Jhon dan Martinussen. (2001). *Policies, Institutions and Industrial Development: Coping with Liberalitation and International ompetition in India.* New Delhi: Sage Publications.

Export Import Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Government of India official. commerce.nic.in/eidb/default.asp., diakses pada 14 Maret 2012.

Ganesan, N. "Myanmar's Foregn Relations: reaching out to the world" dalam Hlaing, Kwaw Yin, *et all*. (ed). (2005). *Myanmar: beyond politics to societal imperatives.* Singapure: ISEAS.

Goldman Sachs. (2011). *Introducing "The Growth Map"*. http://www.goldmansachs.com/our-thinking/global-economic-outlook/the-growth-map/index.html, diakses pada 10 April 2011.

Hussain, Wasbir. 2009. "India's Northeast, The Super-highway to Southeast Asia?" *IPCS.* Issue Brief. No 104.

India's Tata Motors invests in Myanmar. http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific_business/view/1045243/1/.html, diakses 8 Mei 2012

Ilien Halina (2008) *Southeast Asia: Politics and Government.* Yogyakarta: Jurusan HI UGM (Materi kuliah tidak dipublikasikan).

Ikawati, Yuni (n.d.). "Membangun kekuatan dari Lembah Silikon" dalam Irwan Suhanda (ed). (2007). *India, bangkitnya raksasa baru asia: calon pemain utama dunia di era globalisasi*. Jakarta: Kompas.

India Bakal Bangun PLTA di Myanmar, (3 Mei 2010). http://indonesian.cri.cn/201/2010/05/03/1s109958.htm. diakses pada 30 November 2011.

Indian Companies to invest more in Myanmar offshore gas projects. http//www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews/articleid/3903415, diakses pada 20 Oktober 2011.

Jemadu, Aleksius (2008). *Politik Global: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

John Rennie Short, J., R. (2003). *an Introduction to Political Geography*. New York: Roudledge.

Kanwal, Gurmeet (2010). *Why india needs Myanmar on its side*. http://news.rediff.com/column/2010/jul/26/why-india-needs-myanmar-on-its-side.htm.

Kumar, R. (2008). "India as a Foreign Policy Actor–Normative Redux". *CEPS*. Working Document No. 285/February 2008.

Mansur. (2008). *Kebijakan look east policy India terhadap negara-negara Asean pasca perang dingin periode 1992-2005* (Tesis). Dep. Ilmu HI. FISIP. UI.

Meredith, Robyn (2010). *Menjadi Raksasa Dunia: fenomena kebangkitan India dan Cina yang luar biasa dan pengaruhnya terhadap kita* (terj: Haris Priyatna dan Asep Nugraha). Yogyakarta: Nuansa.

Milner, Helen V. (n.d.). "Rationalizing Politics: The Emerging Synthesis of International, American, and Comparative Politics". *International Organization*. 52, 4, Autumn 1998, 759-786.

Mohan, R. (2010). "Embracing Myanmar: India's Foreign Policy Realism". *RSIS COMMENTARIES*. www.rsis,edu.sg. Diakses pada 20 Oktober 2011.

More India Companies to Invest in Myanmar this Year. http//www.globaltimes.cn/business/world/2009-08/462063.html, diakses 20 Oktober 2011.

Mujtaba, Raja. (2012). *Pakistan-Myanmar relation: defence and diplomacy* http://www.opinion-maker.org/2012/01/pakistan-myanmar-relations, diakses pada 20 Oktober 2011.

Myoe, Maung Aung. (2007). *Sino-Myamar Economic Relations Since 1988.* Working Paper Series No. 86, Asia Reseach Institute, National Universtity of Singapure.

Myanmar president's India visit to boost bilateral ties (12 Oktober 2011) http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/678984/Myanmar-presidents-India-visit-to-boost-bilateral-ties.aspx, diakses 8 Mei 2012

Panagariya, Arvid . (2006). *India: the emerging giant.* New York: Oxford.

Pemerintah minta Aung San Suu Kyi gunakan nama Myanmar (29 Juni 2012) http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120629_burma_suukyi.shtml

India at a glance-profil know-India. http://india.gov.in/knowindia/profile.php?id=2, diakses pada 20 Oktober 2011

Oil and Gas in Myanmar. http://birmanie.total.com/en/contexte/p_1_2.htm, diakses pada 23 Desember 2010.

Renaud, Egreteaud. (2003). "India and Burma/ Myanmar Relations From Idealism to Realism (paper draft)". *Conference on India and Burma/ Myanmar Relations: From Idealism to Realism*. Thursday 11th September 2003, Conference Room I, India International Center, New Delhi, India.

RI Tegas Inginkan Sanksi Myanmar Dicabut, (24 Januari 2012) http://international.okezone.com/read/2012/01/24/411/562471/ri-tegas-inginkan-sanksi-myanmar-dicabut, diakses pada 23 Februari 2012.

Shekar, Vibhanshu. (2008) "India investment in the Indocina: Emerging Trends" dalam *Southeast Asia-Articles*. www.icps.org/article/southeast-asia/indian-investment-in-the-indocina-emerging-trends-2741.html, diakses pada 22 Oktober 2011.

Steinberg, D. I. (2010). *Burma/ Myanmar: What everyone needs to know*. New York: Oxford University Press.

Oatley, Thomas. (2006). *International Political Economy: Interests and Intitutions in Global Economy*. New York: Pearson.

The Burma Campaign UK. (2007).*"Burma-India Relation: a Betrayal of Democracy and Human Rights (a Summary of the Key Issues Relating to Burma-India)".* http://www.burmacampaign.org.uk/reports/India_Briefing.pdf, diakses pada 20 Oktober 2011.

Yhome, K. (2009). *India-Myanmar Relations (1998-2008): A Dacade of Redefining Bilateral Ties.* New Delhi: Observer Research Foundation.

Weston, Fred (n.d). *Tragedy of Myanmar* (Penterjemah: Ted). http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/7727761.html, diakses pada 29 Februari 2012.

Winarno, Budi (2010). *Melawan Gurita Neo Liberalisme*. Jakarta: Erlangga.

Lampiran 2

Tabel
India-Myanmar *Agreement*/ MoU 1951-2011

No	MoU/ Agreement	Remark
	1951	
1	Treaty of Friendship.	
	1967	
2	Land Boundry Agreement.	
	1986	
3	Aritime Boundry Agreement.	
	1994	
4	Trade Border Agreement.	Realized 1995
	1995	
5	Golden Bird.	
	1999	
6	Agreement on science and technology.	
	2003	
7	Establishment of Joint Trade Commite (JTC).	Signed during the visit of Arun Jaitley, India minister of commerce and Industry, to Myanmar from 14-16 July.
8	Agreement on extension of a credit line of US$ 25 million to Myanmar.	
9	Protocol on consultations between the Ministry of External Affair of	

	India and the Ministry Foreign Affairs of Myanmar.	
10	Agreement on Visa and exemption for official and diplomatic passport holders.	Agreement signed during Indian Vice President Bhairon Singh Shekhawat's visit to Myanmar (November 2-5).
11	MoU for deputation of teaching personnel from India for short term courses at Universities in Myanmar.	
12	MoU between Human Resource Development Ministry of India and Education Ministry of Myanmar.	Agreement signed during Indian Vice President Bhairon Singh Shekhawat's visit to Myanmar (November 2-5).
13	MoU on cooperation in Communication, Information Technology and services between India Ministry of Communication, Post and Telegraphs.	Signed during the visit of Arun Shourie, Indian minister of communication and IT, from 25-30 August.
2004		
14	MoU for Setting up Entrepreneurship Development Centre at Yangon.	MoU was Signed on July 27.
15	MoU on cooperation in the field of railways.	MoU was Signed on July 27.
16	MoU for Cooperation in the field of Non-traditional Security issues (counter-terrorism).	MoU was signed during the visit of Sr. Gen. Than Shwe, Chairman of the SPDC, to India from October 24-26.
17	MoU on the Thamanthi Hydro Electric Power project on the	MoU was signed during the visit of

	Chindwin River.	Sr. Gen. Than Shwe, Chairman of the SPDC, to India from October 24-26.
2005		
18	MoU on cooperation in the Hydrocarbon sector.	Signed during the visit of India petroleum minister t o Myanmar from January 11-14.
2006		
19	Framework Agreement for Mutual Cooperation in the field of Remote Sensing.	Agreement was signed on 9 March during Indian President A.P.J. Abdul Kalam's visit to Myanmar in March.
20	MoU for Cooperation in Buddhist studies between India Council for Cultural Relations and Myanmar's Ministry of Religious Affairs.	MoU was signed on March 9 during Indian President A.P.J. Abdul Kalam's visit to Myanmar in March
	MoU for cooperation in petroleum sector between India ministry of petroleum and natural gas and Myanmar's ministry of energy.	MoU was signed on 9 March during Indian President A.P.J. Abdul Kalam's visit to Myanmar in March
2007		
21	MoU for Estabilishing Indian Myanmar Centre for enhancement of IT Skills.	MoU was signed on December 12 at Yangon.
22	MoU for Estabilishing Indian	MoU was signed on

	Myanmar Centre for Enhancement of Informations Technology Skills (IMCEITS).	December 10 at Yangon.
2008		
23	Agreement and two protocols os Kaladan Multi Modal Transit Transport project.	Agreement were signed during visit of Myanmar's Vice Senior General Maung Aye to India from 2-5 of April.
24	Agreement on setting up framework agreement for construction and operation of a multi modal transit transport facility on Kaladan river.	Agreement were signed during visit of Myanmar's Vice Senior General Maung Aye to India from 2-5 of April.
25	A Double Taxation Avaidance Agreement (DTAA).	Agreement were signed during visit of Myanmar's Vice Senior General Maung Aye to India from 2-5 of April.
26	Bilateral Investmen Promotion Agreement (BIPA) to facilitate greater Indian investment in Myanmar and viceversa.	Agreement was signed during the visit of Indian minister for Commerce and Power, Jairan Ramesh to Myanmar on June 24.
27	A credite line agreement between the Exim Bank of India the Myanmar Foreign Trade Bank for US$ 64 million for financing three 230 kv transmission lines n Myanmar to be executed by the Power Grid Corporation of India.	Agreement was signed during the visit of Indian minister for Commerce and Power, Jairan Ramesh to Myanmar on June 24.
28	A credite line agreement between the Exim Bank of India the Myanmar	Agreement was signed during the

	Foreign Trade Bank for US$ 20 million for financing the establishment of an aluminium conductor steel reinforced (ACSR) wire manufacturing facility to be used for expansion of the power distribution network in Myanmar.	visit of Indian minister for Commerce and Power, Jairan Ramesh to Myanmar on June 24.
29	Agreemen between the United Bank of India and the MyanmarEconomic Bank for providing banking arrangement for the implementation of the border trade agreement between the two governments that takes place at Moreh (in Manipur) at present.	Agreement was signed during the visit of Indian minister for Commerce and Power, Jairan Ramesh to Myanmar on June 24.
30	Convert the exiting border trade at Moreh in Manipur and Zowkhathar in Moziram into normal trade.	During the 3rd India-Myanmar Join TradeCommittee from October 14-15.
31	Develop Avankhu in Nagaland as a third border trade point with Myanmar.	During the 3rd India-Myanmar Join Trade Committee from October 14-15.
32	Expand the list of commodities under Indo-Myanmar border Trade Agreement from the existing 22 items to 40 items.	During the 3rd India-Myanmar Join Trade Committee from October 14-15.
33	Operasionalise the banking arrangements.	During the 3rd India-Myanmar Join Trade Committee from October 14-15.
34	MoU signed between Myanmar's Hidroelectric Power Development and India's National Hidroelectric Ltd to buil the 120-megawatt Thamanthi hydroelectric power project and the 600-megawatt Shwezaye project in northwestern Chin state of Myanmar on September 16, 2008.	Agreement was signed during the visit of Indian minister for Commerce and Power, Jairan Ramesh to Myanmar on June 24.

2009		
35	Myanmar-India Industrial Traning Center at Pakokku.	During Vice President Shri H. Ansari visited Myanmar in February at the invitation of Vice Senior General Maung Aye (Vice Chairman of SPDC).
2010		
36	MoU regarding Indian grant assistance for implementation of small developmental projects.	During a state visit of General Than Shwe (Chairman of SPDC of Union of Myanmar) July 25-29 at the invitation of Rashtrapatiji.

Sumber: Yhome, 2009, 23-26; Embassy of India.

Lampiran 3
SUMBER GAMBAR PADA SAMPUL DEPAN BUKU

Mahatma Gandhi, sumber gambar: http://sonekichidiya.in/your-platform-to-reform-india-lets-join-hands-and-do-it-january-2013-announcing-a-total-reform-movement/mahatma-gandhi/, diakses 15 Januari 2013.

Aung San Syu Kyi, sumber gambar: http://suneeshas.wordpress.com/2012/07/05/about-aung-san-suu-kyi-a-biography/, diakses 15 Januari 2013.

Tajmahal, sumber gambar: http://rajivawijesinha.wordpress.com/2010/08/13/historic-buildings-x-the-taj-mahal-at-agra-c-1650-ad/, diakses 15 Januari 2013.

Salah satu bangunan di Bangalore, sumber gambar: http://www.pc-progress.com/Documents/Workshop_2012_India/bangalore1.JPG, diakses 15 Januari 2013.

Demonstrasi di Myanmar, sumber gambar: http://www.sawkyawoo.com/2012/08/blog-post_4386.html, diakses 15 Januari 2013.

Tentara Myanmar, sumber gambar: http://article.wn.com/view/WNATEDA7DBC81A7ED8F9DE6B8949E92BFEF2/, diakses 15 Januari 2013.

Bendera India, sumber gambar: http://www.deplu.go.id/Lists/BilateralCooperation/DispForm.aspx?ID=13.

PERGESERAN POLITIK LUAR NEGERI INDIA TERHADAP MYANMAR

Prilaku India, menarik untuk diamati tidak hanya karena India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dan digadang-gadang menjadi pemain penting ekonomi di masa datang namun juga karena: *Pertama*, bagi Indonesia, mendekatnya India ke Myanmar yang juga berarti masuknya India ke dalam pusaran ekonomi Asia Tenggara menjadi pengimbang bagi dominasi ekonomi Cina di kawasan ini. Ketergantungan Asia Tenggara termasuk Indonesia terhadap Cina akan terkurangi seiring dengan semakin kuatnya penetrasi India ke kawasan tersebut.

Kedua, bagi ASEAN, masuknya India ke dalam arena ekonomi kawasan ini berarti *energi* baru yang akan meningkatkan kemampuan ekonomi negara-negara ASEAN secara kolektif. Jalinan rantai ekonomi yang saling terkoneksi di antara para pelaku ekonomi di kawasan Asia Tenggara akan semakin meluas seiring dengan terintegrasinya ekonomi India ke ASEAN yang maknanya progresifitas ekonomi kawasan akan terdorong.

Ketiga, di tingkat global, Myanmar menjadi jalur kunci yang menghubungkan tiga kekuatan ekonomi penting: Cina, India dan Indocina, bila bukan Asia Tenggara. Mencairnya hubungan India-Myanmar sudah barang tentu akan memiliki multi efek bagi ekonomi Asia yang pada akhirnya berkontribusi pada progresifitas ekonomi global. Pada tahap ini maka Asia memainkan peran krusial dalam konstalasi ekonomi global.

Studi ini kian menarik mengingat India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia menjalin relasi kuat dengan Junta militer yang anti demokrasi dan telah melakukan pelanggaran HAM berat. Dalam konteks mengejar kepentingan ekonomi nampaknya penegakan nilai-nilai HAM semakin terabaikan. Buku ini sangat menarik sehingga wajib dibaca mahasiswa dan dosen Hubungan Internasional, pengamat ekonomi politik, para pelaku bisnis dan para pembuat kebijakan.

Sugiarto Pramono, SIP., MA. aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang. Menamatkan pendidikan Sarjana pada Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UNWAHAS pada tahun 2005 dan menyelesaikan studi S2 nya di Jurusan yang sama pada FISIP UGM pada tahun 2012.

Wahid Hasyim University Press

ISBN: 978-602-8273-41-1